

**ANALISIS
KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 1996 S/D 2005**

TESIS

**diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
MAGISTER EKONOMI**

**NYIMAS DESI LUSIANA
NPM 0706299265**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
KEKHUSUSAN EKONOMI KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH
DEPOK
DESEMBER 2008**

Universitas Indonesia

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : NYIMAS DESI LUSIANA
NPM : 0706299265

Tanda Tangan :



Tanggal : 30 DESEMBER 2008

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : NYIMAS DESI LUSIANA
NPM : 0706299265
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul Tesis : Analisis Kemiskinan dan Ketimpangan
Pendapatan di Provinsi Lampung Tahun 1996
s/d 2005

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Sonny Harry B. Harmadi.

Penguji I : Dr. Jossy P. Moeis

Penguji II : Darlis Rabai, SE, MA.

Ditetapkan : DEPOK,

Tanggal : 30 DESEMBER 2008

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan Tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Ekonomi Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

- (1) Bapak Dr. Sonny Harry B.Harmadi, selaku dosen pembimbing yang telah sangat baik menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran serta senantiasa mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran dalam penyusunan tesis ini;
- (2) Bapak Dr. Raksaka Mahi, Ibu Hera Susanti, SE, MSc, dan seluruh dosen, staf, serta karyawan Program MPKP FEUI yang telah banyak membantu penulis sejak berawalnya perkuliahan hingga terselesaikannya studi ini;
- (3) Pemda Provinsi Lampung beserta jajarannya yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang penulis perlukan ;
- (4) Bappeda Provinsi Lampung, Khususnya kepada Bpk.Dr. Didi terimakasih banyak atas masukan dan bantuan pengumpulan dan pengolahan datanya.
- (5) Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang penulis perlukan.
- (6) Dinas Pendapatan Provinsi Lampung dimana penulis bertugas sebelum menjalankan perkuliahan,terutama kepada Kepala Dinas,Ibu Suresmi Ramli dan seluruh rekan-rekan penulis di Dinas Pendapatan yang selalu memberi semangat untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini.
- (7) Tesis ini secara khusus dipersembahkan kepada " Papaku tercinta, Alm. Kemas Arsyad, SH, MM, MSc." Terimakasih atas semangat dan kerja keras yang telah papa wariskan ke ananda, ananda berharap dapat membuat bangga dan bahagia papa

walaupun papa tidak langsung mendampingi ananda menyelesaikan tesis ini maupun saat wisuda nanti namun ananda yakin bahwa papa dapat melihat kesuksesan ananda.

- (8) Teruntuk Suami Kumpul Rahmad Hidayat, SE yang telah memberikan restu dan senantiasa mendukung serta memberikan semangat selama menjalankan perkuliahan hingga terselesaikannya tesis ini. Anakku tersayang Muhammad Daffa Rizqy Hidayat (Daffa) atas segala pengorbanannya jauh dari mama, “ maafin mama yach sering ninggalin Daffa selama mama kuliah” sehingga waktu bersama mama berkurang dan mama merasa bahagia melihat Daffa dapat tumbuh menjadi anak yang pengertian dan mandiri, I love U my lovely Son!. Buat Ibundaku terpenulisng Hj.Siti Rohaiti atas restu dan do’a yang tak henti untuk ananda serta kesabarannya mengasuh daffa selama ananda menjalankan kuliah.
- (9) Kakakku Nyimas Hamidayanti dan adikku, atas doa dan dukungan selama menjalankan perkuliahan.
- (10) Serta Ayahanda Hi.Zainal Abidin dan Hj. Wardiah atas restu dan do’a yang tak henti-hentinya sehingga ananda dapat menyelesaikan pendidikan di MPKP FE-UI sesuai dengan waktu yang di tetapkan oleh Beasiswa Bappenas.
- (11) Sahabat-sahabatku satu angkatan XVII Beasiswa Bappenas serta yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu- memberikan dorongan semangat dalam menyelesaikan tesis ini.
- (12) Buat Kak Izoel dan mbak kiki, atas kebaikan dan kemurahan hati selama ananda tinggal di kebagusan.Mudah-mudahan keluarga kebagusan selalu dalam limpahan rizqy dan menjadi keluarga yang berbahagia selalu.
- (13) Buat Firdha dan ibu yang telah telah berbaik hati menerima tinggal dan transit dirumah selama desi tidak kos lagi.
- (14) Serta berbagai pihak yang senantiasa memberikan banyak support dan masukan dalam penulisan tesis ini maupun selama perkuliahan berjalan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, trimakasih atas bantuan semuanya.

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah :

Nama : NYIMAS DESI LUSIANA
NPM : 0706299265
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Departemen : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Analisis Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Lampung, Tahun 1996 s/d 2005

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok,
Pada Tanggal : 30 Desember 2008

Yang menyatakan,



(NYIMAS DESI LUSIANA)

ABSTRAK

Nama : Nyimas Desi Lusiana
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul : Analisis Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Lampung Tahun 1996 s/d 2005

Secara umum, kinerja perekonomian Provinsi Lampung selama periode 1996-2005 kurang memadai ditinjau dari beberapa indikator kesejahteraan. Sebagai daerah yang berbatasan dengan Pulau Jawa, dimana menjadi pusat aktifitas Indonesia, Provinsi Lampung seharusnya memperoleh banyak manfaat dalam pembangunannya. Dalam proses pembangunannya, persentase penduduk miskin di Provinsi Lampung relatif tidak banyak berubah selama periode 1996-2005. Selain itu, ketimpangan pendapatan di dalam masyarakat meningkat, serta ketimpangan antar kabupaten/kota juga meningkat, khususnya selama periode pemberlakuan otonomi daerah. Kenaikan ketimpangan disebabkan karena penduduk terkaya mengalami peningkatan pendapatan yang lebih tinggi ketimbang penduduk termiskin.

Strategi pengentasan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan secara berhati-hati perlu segera dilaksanakan di Provinsi Lampung dengan mengenali beberapa karakteristik demografi yang ada. Berdasarkan kondisi yang ada, pertumbuhan ekonomi dapat distimulasi untuk menghasilkan manfaat bagi penduduk miskin. Ini didasarkan pada kenyataan hubungan berkebalikan antara pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk miskin. Berbagai program pendidikan dan kesehatan juga memiliki dampak yang positif terhadap pengurangan kemiskinan dan ketimpangan. Dengan adanya kecenderungan ketimpangan antar daerah yang meningkat, program pro kemiskinan akan lebih tepat jika dilakukan secara spesifik di masing-masing kabupaten/kota di masa yang akan datang.

Kata kunci:

Kemiskinan, Ketimpangan Pendapatan, Indeks Gini, Kurva Lorenz

ABSTRACT

Name : Nyimas Desi Lusiana
Study Program: Master of Planning and Public Policy
Title : The Analisis of Poverty and Income Inequality in Lampung Province
Year 1996 to 2005

In general, the overall economic performance of Lampung Province during 1996-2005 period as measured by several welfare indicators could be regarded as quite insufficient. As a province nearby Java Island, a central of economic activities in Indonesia, Lampung Province should be benefited in their development process. In spite of this development process, however, the percentage of people living in poverty has not changed significantly. Aligned with this, the distribution of income became dispersed over time, suggesting increasing inequality, particularly after the implementation of regional autonomy. This was because the highest income group experienced higher increasing in income rather than the lowest income group.

Strategic policy for poverty alleviation and income inequality should be implemented prudentially with regards to the existing demographic charactersitic in the area. As a matter of fact, economic growth which benefit the low income people, could be stimulated to reduce the poverty incidence and income inequality. Another fact, education and health programs have positive impacts to alleviate poverty and prevent income inequality. With having problem in increasing of between regional inequality, a geographically targeted pro-poor program will be more appropriate to overcome such problem in the next years.

Keyword:

Poverty, Income Inequality, Gini Index, Lorenz Curve

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
1. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	12
1.4. Manfaat Penelitian.....	12
1.5. Ruang Lingkup.....	12
1.6. Sistematika Penulisan.....	13
2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Definisi Kemiskinan dan konsep pengukurannya.....	15
2.1.1. Definisi Kemiskinan.....	15
2.1.2. Kemiskinan Absolute dan Relatif.....	17
2.1.3. Derajat Kemiskinan.....	21
2.1.4. Pengukuran kemiskinan.....	24
2.2. Teori Ketimpangan dan Distribusi Pendapatan.....	27
2.1.1. Konsep Dasar Ketimpangan.....	27
2.1.2. Konsep Dasar Distribusi Pendapatan.....	31
2.3. Beberapa Ukuran Ketimpangan Pendapatan.....	33
2.4. Pembangunan Ekonomi Daerah.....	41
2.4.1. Kesenjangan Antar Daerah.....	41
2.4.2. Ruang Lingkup Pembangunan Fkonomi.....	42
2.4.3. Indikator Keberhasilan Pembangunan Ekonomi.....	43
2.4.4. Beberapa Isue dalam Pembangunan Ekonomi.....	44
2.5. Penelitian Sebelumnya.....	46

3. METODE PENELITIAN

3.1. Tahapan Penelitian.....	48
3.2. Konsep Pengukuran Garis Kemiskinan dan Indikatornya	48
3.2.1. Definisi.....	48
3.3. Metode Penyelesaian	49
3.3.1. Analisis Deskriptif.....	49
3.3.2. Ukuran Kemiskinan	50
3.4. Konsep Pengukuran Ketimpangan Pendapatan	56
3.4.1. Ukuran Ketimpangan	56

4. GAMBARAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

4.1. Geografis dan Administrasi	59
4.2. Kependudukan	62
4.3. Sosial Budaya.....	63
4.4. Perekonomian	64
4.5. Kemiskinan di Provinsi Lampung	66
4.6. Faktor Penyebab Kemiskinan	66
4.7. Klasifikasi Kemiskinan.....	69
4.7.1 Kemiskinan Atas Dasar Wilayah.....	69
4.7.2 Kemiskinan Atas Dasar Rumah Tangga Miskin (RTM)	69
4.7.3 Kemiskinan Atas Dasar Pendidikan.....	72
4.7.4 Kemiskinan Atas Dasar Kesempatan Kerja.....	73
4.8. Survei Desa IDT	74

5. HASIL DAN ANALISIS

5.1. Tren Kemiskinan di Lampung	78
5.2. Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Lampung.....	82
5.3. Ketimpangan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.....	93

6. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. Kesimpulan	98
6.2. Rekomendasi Kebijakan	100

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Halaman
1.1. Alur Pikir	15
2.2. Gambar Kurva Lorenz untuk Kasus Pemerataan Sempurna.....	36
2.3. Gambar Kurva Lorenz untuk Kasus Ketimpangan Sempurna.....	36
2.4. Gambar Kurva Lorenz untuk Kasus Umum	37
3.1. Gambar Kurva Lorenz Provinsi Lampung.....	54
5.1. Penduduk Miskin, Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi.....	78
5.2. Peta Jumlah Rumah Tangga Miskin per Kecamatan di Provinsi Lampung	80
5.3. Peta Arah Program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Lampung	81
5.4. Kurva Lorenz Provinsi Lampung tahun 1996.....	83
5.5. Kurva Lorenz Provinsi Lampung tahun 1999.....	83
5.6. Perkembangan Koefisien Gini Provinsi Lampung	84
5.7. Kurva Lorenz Provinsi Lampung tahun 2002.....	85
5.8. Kurva Lorenz Provinsi Lampung tahun 2005.....	85
5.9. Perkembangan Pengeluaran Masing-Masing Kelompok Kuartil	89
5.10. Rata-Rata Pertumbuhan Pengeluaran Setiap Kuartil	90
5.11. Persentase Kepala Rumah Tangga Menurut Jenis Kelamin	91
5.12. Pendidikan Kepala Rumah Tangga Menurut Kuartil.....	92
5.13. Ketimpangan Antar Daerah di Provinsi Lampung, 1996-2005	94
5.14. Ketimpangan Dalam Daerah di Provinsi Lampung, 2005	96

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
1.1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, P1, P2, dan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota tahun 2004.....	6
1.2. Data Jumlah Keluarga Miskin di Provinsi Lampung, Tahun 2003-2004.....	8
2.1. Ringkasan Pendekatan Kebijakan yang Dapat Mendukung Pengurangan Ketimpangan Horisontal.....	30
4.1. Rekapitulasi Jumlah Kecamatan, Desa/Kampung/Pekon, Kelurahan, Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Provinsi Lampung tahun 2007.....	65
4.2. Tabel Jumlah Keluarga Miskin tahun 2003 dan 2004.....	73
4.3. Tabel Jumlah Keluarga Miskin tahun 2005 dan 2006.....	74
4.4. Data Perkembangan Wajar Dikdas Lampung Tahun 2003/2004 dan 2005/2006.....	75
4.5. Kondisi Tenaga Kerja Provinsi Lampung tahun 2004-2006.....	76
4.6. Rencana Realisasi Survei serta Distribusi Desa IDT, Peserta Program Penanggulangan Kemiskinan di Setiap Kabupaten/Kota.....	78
5.1. Berbagai Indikator Kesejahteraan Provinsi Lampung (2004-2007).....	82
5.2. Nilai Kuartil Pengeluaran Rumah Tangga per Bulan di Lampung.....	86
5.3. Pertumbuhan Pengeluaran Rumah Tangga per Kuartil.....	86
5.4. Rata-Rata Pengeluaran Setiap 25% Kelompok Pendapatan.....	88
5.5. Jumlah Anggota Rumah Tangga Menurut Kuartil (Orang).....	93
5.6. Ketimpangan Antar Daerah di Provinsi Lampung, 1996-2005.....	94

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Pemikiran

Sepanjang sejarah kehidupan manusia, masalah kemiskinan sepertinya tidak pernah akan ada habisnya. Kemiskinan yang identik dengan ketidakmampuan seseorang, sebuah keluarga, atau suatu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak hanya masih dirasakan oleh banyak negara-negara berkembang, seperti Indonesia, tetapi juga oleh negara-negara maju lainnya. Mungkin beberapa negara relative sudah berhasil mengatasi kemiskinan, namun tidak menutup kemungkinan kemiskinan tersebut akan muncul kembali akibat terjadinya berbagai krisis atau bencana, seperti bencana alam (banjir, kekeringan, dan gunung meletus), krisis ekonomi, kerusakan dan peperangan, atau banyak lagi yang lainnya.

Pada hakekatnya, suatu kondisi kehidupan yang miskin sesungguhnya merupakan refleksi suatu masyarakat yang sedang sakit. Implikasi dari masalah ini dapat melibatkan berbagai segi kehidupan di dalam masyarakat. Kondisi demikian bukan saja menjadi problema bagi penduduk miskin, melainkan juga bagi penduduk yang kaya. Hal tersebut dianggap penting untuk digarisbawahi karena kemiskinan sebenarnya merupakan konsep nilai tentang realitas hidup. Kemiskinan merupakan tanggung jawab dan kewajiban masyarakat keseluruhan untuk mengatasinya, dan kebijakan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan (dengan berbagai program atau proyek pembangunan) merupakan suatu kebijakan yang sangat bermoral. Di sini, persoalan bagaimana cara mengatasi masalah kemiskinan menjadi sebuah topik yang sangat krusial untuk didiskusikan. Argumentasi seperti itu telah menempatkan kemiskinan sebagai salah satu isu atau permasalahan penting dalam kebijakan ekonomi dan sosial.

Di Indonesiapun kemiskinan tetap menjadi permasalahan utama sebagai suatu negara yang sedang berkembang, oleh sebab itu masalah kemiskinan maupun hidup sejahtera bagi seluruh masyarakatnya menjadi sebuah komitmen dalam menjalankan roda pemerintahan, karena hidup layak bagi seluruh masyarakat sudah merupakan hak asasi yang diakui secara universal, hal ini

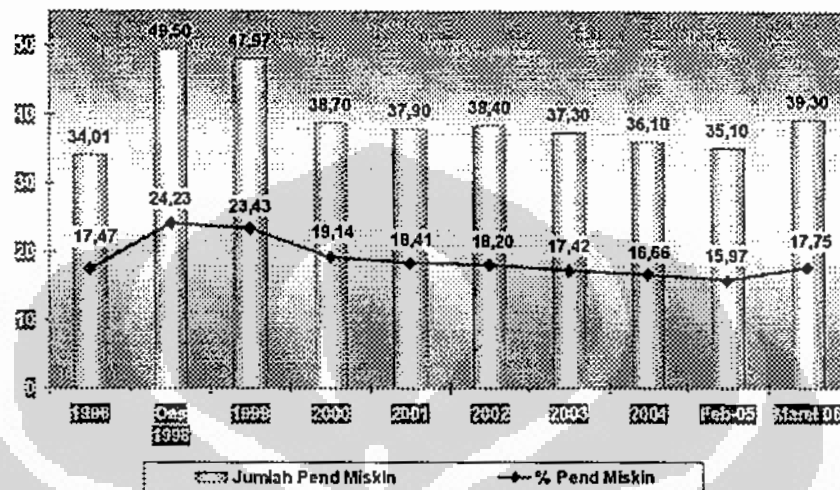
Universitas Indonesia

sebagaimana tertuang dalam konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, secara eksplisit mengakui hal tersebut dengan mengamanatkan bahwa salah satu tugas pokok pemerintah Republik Indonesia adalah '*memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*'. Sebagaimana Tertuang dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi '*Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara*'. Hal ini menjelaskan bahwa, hidup terbebas dari kemiskinan atau menikmati kehidupan yang layak merupakan hak azasi setiap warga negara dan adalah tugas pemerintah untuk menjamin terwujudnya keinginan tersebut.

Pembangunan nasional pada dasarnya meningkatkan kesejahteraan umum yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia dan Pembangunan ekonomi merupakan salah satu pilar penting untuk mencapai peningkatan kesejahteraan rakyat dalam mengentaskan kemiskinan, hal ini merupakan prioritas utama dari pelaksanaan pembangunan. Salah satu indikator utama keberhasilan dalam suatu pembangunan ialah adanya laju penurunan jumlah penduduk miskin, Efektifitas dalam menurunkan jumlah penduduk miskin merupakan pertimbangan utama dalam memilih strategi atau instrumen pembangunan. Pemikiran ini didasarkan pada hipotesis bahwa dampak pembangunan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin berbeda menurut sektor.

Ekonomi selalu berbicara pada tiga konsep penting yang saling terkait, yaitu keterbatasan sumberdaya, pilihan, dan pengambilan keputusan. Setiap orang memiliki keinginan untuk mencapai tingkat kepuasan tertinggi, dengan keterbatasan sumberdaya yang dimilikinya. Yang menjadi permasalahan bahwa distribusi kepemilikan sumberdaya setiap orang tidak sama, sehingga tingkat utilitas yang dapat dicapai juga tidak sama. Akibatnya, terdapat orang yang memiliki pendapatan rendah, di bawah standar hidup yang layak, sehingga orang tersebut dikatakan miskin.

TREND KEMISKINAN DI INDONESIA: 1996-2006



Sumber : BPS Prov.Lampung

Kemiskinan merupakan suatu keadaan yang dikaitkan dengan kesulitan dan kekurangan di berbagai sisi kehidupan. Keadaan atau kondisi menunjukkan kemampuan seseorang dalam mencukupi kebutuhan. Berbicara mengenai kebutuhan seringkali dihadapkan pada kebutuhan yang tidak terbatas, bahkan duniapun kalau ada dalam genggam tangan tetap mereka masih ingin memiliki kebutuhan yang lainnya. Dengan demikian, apakah semua orang akan selalu berada dalam kemiskinan? Disinilah permasalahan kemiskinan menjadi sesuatu yang sangat relatif bahkan abstrak, bergantung dari cara pandang seseorang dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Banyak orang-orang yang tidak sadar bahwa dirinya berada dalam kemiskinan dan ketidakmampuan. Karena mereka tidak lagi mengenal kebutuhan-kebutuhan lain, selain hal-hal yang mereka hadapi sehari-hari. Meskipun mereka hanya mampu makan sehari sekali, tetap saja terkadang tidak mau dikatakan sebagai orang miskin. Kondisi ini dapat terjadi jika kehidupan masyarakat secara umum berada dalam kondisi kehidupan yang relatif sama.

Dalam konteks pembangunan, kebutuhan hidup yang harus dipenuhi masyarakat memiliki standar minimal atau batasan tertentu. Cakupan kebutuhanpun memiliki berbagai dimensi, tidak hanya kebutuhan terhadap makan dan minum saja. Berbagai konsep kemiskinan telah banyak dibicarakan dan didiskusikan oleh para ahli. Demikian juga pendekatan-pendekatan yang digunakan bervariasi, seperti pendekatan kebutuhan kalori, pendekatan pendapatan dan lain sebagainya. Istilah kemiskinan seringkali meliputi:

- o *Penggambaran kebutuhan material* termasuk kekurangan bahan pokok dan pelayanan. Kebutuhan pokok ini merupakan kebutuhan paling mendasar dalam kehidupan seseorang. Karena pemenuhan kebutuhan makanan merupakan syarat bagi seseorang agar dapat beraktifitas secara normal dan wajar. Kekurangan bahan makanan pokok dapat menyebabkan terganggunya kemampuan untuk beraktivitas, seperti bekerja, belajar, berolah raga, dan lain sebagainya.
- o *Dimensi ekonomi* menunjukkan kemampuan atau kekayaan (biasanya dianggap sebagai modal, uang, barang material, atau sumber daya). Dalam dimensi ekonomi ini biasanya dilakukan dengan pendekatan pendapatan dan aset. Semua kebutuhan dasar manusia dapat dihitung dan dikonversi dalam mata uang tertentu. Menurut ilmu ekonomi, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, seseorang harus dapat memiliki batas pendapatan tertentu. Inilah yang biasanya dikenal dengan pendekatan pendapatan. Bank Dunia mensyaratkan seseorang minimal harus mendapatkan \$ 1 US per orang per hari untuk mencukupi kebutuhannya. Berarti dalam sebulan satu orang harus memiliki pendapatan minimal \$ 30 US. Jika satu rumah tangga memiliki anggota rumah tangga (ART) sebanyak 7 orang, maka rumah tangga tersebut harus memiliki pendapatan \$ 210 US dalam sebulan. Semakin banyak anggota rumah tangga atau anak, maka pendapatan yang harus dimiliki rumah tangga tersebut akan semakin tinggi pula. Karena itu, anak dalam pandangan ekonomi merupakan *cost* yang harus ditanggung orang tua, bukan sebagai aset yang mendatangkan pendapatan. Pandangan banyak anak banyak rejeki barangkali bertentangan dengan pandangan ilmu ekonomi.

- o *Dimensi sosial*, rendahnya kemampuan seseorang untuk hidup dalam apa yang dianggap masyarakat sebagai hidup "normal"; contohnya, kemampuan untuk mendidik anak dan berpartisipasi dalam aktivitas masyarakat. Untuk pendidikan misalnya, kemiskinan mempengaruhi kemampuan murid untuk belajar secara efektif dalam suatu lingkungan pendidikan. Menurut Abraham Maslow dalam hirarki kebutuhan Maslow; kebutuhan rumah, pakaian, dan makan yang teratur membayangi kemampuan murid-murid untuk belajar, terutama dari keluarga miskin. Pendidikan memiliki dampak terhadap kemiskinan, sehingga muncul fenomena "yang kaya akan tambah kaya dan yang miskin bertambah miskin". Untuk akses ke pendidikan dibutuhkan biaya yang tidak murah, sementara orang miskin yang kesulitan biaya semakin sulit untuk akses ke pendidikan yang berkualitas. Karena itu, seseorang yang memiliki tingkat pendidikan rendah akan cenderung miskin, sementara orang yang berpendidikan tinggi akan memiliki kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhannya.
- o *Dimensi Kesehatan*, menunjukkan kondisi fisik dan mental seseorang yang terbebas dari gangguan. Setiap gangguan fisik dan mental yang dialami seseorang akan berdampak pada terganggunya fungsi fisik dan mental. Kondisi yang membiarkan fungsi fisik dan mental dalam keadaan terganggu menunjukkan ketidakmampuan atau kemiskinan. (Harmady, 2006)

Di sisi lain, keberadaan orang yang dikatakan tidak miskin telah menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat. Isu mengenai kemiskinan dan ketimpangan pendapatan hingga saat ini tetap menjadi program pembangunan hampir di setiap negara terutama negara-negara berkembang dan yang tergolong miskin. Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masih selalu menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan ekonomi, tidak hanya bagi mereka yang miskin saja, tetapi juga bagi yang tidak miskin. Perhatian terhadap kemiskinan bahkan menjadi isu global yang terungkap secara tegas dalam sasaran Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals, MDGs). MDGs menetapkan penghapusan kemiskinan ekstrim (*extreme poverty*) dan kelaparan (*hunger*) pada tahun 2015 sebagai sasaran utamanya.

Target ini mencapai acuan capaian kemajuan suatu negara. Sekalipun sudah merupakan komitmen global, upaya penanggulangan kemiskinan disadari bukan merupakan hal sederhana karena kemiskinan bersifat kompleks dan bermatra-ganda (multi-dimensional). Jika penduduk yang termasuk ke dalam kategori miskin tidak banyak menerima manfaat dari pembangunan, sedangkan penduduk yang tidak miskin memperoleh manfaat pembangunan lebih besar, maka selisih pendapatan diantara kedua kelompok tersebut akan meningkat. Dalam konteks normatif, pembangunan dapat menyebabkan peningkatan kemakmuran setidaknya bagi sebagian masyarakat, sedangkan masyarakat lainnya tidak dirugikan. Jika hal ini yang terjadi, maka kondisi Pareto optimal dapat tercapai dan hakekat pembangunan yang sebenarnya dapat terjadi.

Ketimpangan pendapatan tidak dapat dibiarkan dan dituntut adanya kebijakan serta strategi yang tepat yang mencakup lintas sektor serta terintegrasi. Kebijakan tersebut harus dapat memperbesar akses masyarakat berpendapatan rendah, sehingga mereka dapat mengejar ketertinggalannya dari kelompok pendapatan lainnya. Diperlukan berbagai program perluasan kesempatan kerja yang produktif, pemberdayaan manusia dan kemudahan untuk mengakses berbagai peluang sosial ekonomi yang ada. Karena pemerintah memiliki keterbatasan sumberdaya, maka program pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan pendapatan membutuhkan penekanan skala prioritas. Selain itu pada era otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki peran lebih besar dalam kebijakan ini. Pemerintah daerah dianggap lebih paham preferensi masyarakatnya, sehingga mampu menetapkan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Pada dasarnya, konsep pengukuran kemiskinan dapat dibagi menjadi 2, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Secara absolut, seseorang dikatakan miskin jika pendapatan atau pengeluarannya di bawah garis kemiskinan tertentu. Sedangkan konsep kemiskinan relatif terkait dengan suatu perbandingan antara suatu kelompok pendapatan tertentu dengan kelompok pendapatan lainnya. Kemiskinan absolut mencerminkan suatu kondisi di mana tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan absolut merujuk pada

ketidakmampuan atau ketidakberdayaan seseorang untuk hidup secara layak. Pada konsep kemiskinan relatif, perhitungan kemiskinan didasarkan pada proporsi distribusi pendapatan dalam suatu wilayah. Kemiskinan jenis ini dikatakan relatif karena lebih berkaitan dengan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat. Suatu kelompok masyarakat dianggap miskin relatif jika pendapatannya termasuk 20% terendah dari distribusi pendapatan.

Salah satu syarat penting agar suatu kebijakan untuk mengatasi kemiskinan dapat tercapai ialah adanya kejelasan mengenai "kriteria" tentang siapa atau kelompok masyarakat mana yang termasuk ke dalam kategori miskin dan menjadi sasaran program. Sedangkan syarat penting selanjutnya ialah memahami secara tepat apa yang menjadi penyebab kemiskinan di suatu komunitas. Dengan memahami kedua hal tersebut, maka pemerintah dapat menyusun prioritas kebijakan sesuai dengan konteks yang ada di daerah/ komunitas tersebut. Oleh karenanya, kebijakan pengentasan kemiskinan memiliki dimensi spasial yang memungkinkan adanya perbedaan pendekatan di masing-masing daerah.

Tabel 1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, P1, P2 dan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2004

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin (%)	P1	P2	Garis Kemiskinan (Rp/kap/ bulan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(01) Lampung Barat	82,7	21,66	2,95	0,64	109 055
(02) Tanggamus	173,2	20,97	4,52	1,16	111 928
(03) Lampung Selatan	340,9	28,49	6,23	1,80	104 567
(04) Lampung Timur	257,2	28,31	5,98	1,94	116 500
(05) Lampung Tengah	210,6	18,97	2,81	0,63	110 467
(06) Lampung Utara	189,0	33,81	5,06	1,17	124 423
(07) Way Kanan	112,3	30,06	5,22	1,27	106 769
(08) Tulangbawang	126,3	16,98	2,68	0,74	97 184
(71) Kota Bandar Lampung	58,9	7,38	1,38	0,40	133 473
(72) Kota Metro	10,7	8,16	0,98	0,19	124 744
Lampung	1561,7	22,22	4,12	1,12	117 135

Sumber data : BPS Prop. Lampung.

Dalam konteks Provinsi Lampung, indeks kedalaman kemiskinan provinsi ini pada 2004 cukup buruk. Hal ini ditunjukkan dengan angka indeks kedalaman kemiskinan sebesar 4,12 dan lebih tinggi dari indeks rata-rata provinsi secara nasional (3,22). Artinya bahwa secara rata-rata pendapatan orang miskin masih lebih rendah 4,12% dibanding garis kemiskinan. Jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia, kedalaman kemiskinan Provinsi Lampung hanya lebih baik dibanding Provinsi NAD, NTB, NTT, Gorontalo, Maluku, Irian Jaya, dan Papua.

Hal ini menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan di Lampung paling buruk di Kawasan Indonesia Barat. Jika diamati per kabupaten, pada tahun 2004 kabupaten di Provinsi Lampung yang kondisi kemiskinannya paling buruk secara berurutan yaitu Lampung Selatan, Way Kanan, dan Tanggamus. Sedangkan yang kondisinya paling baik secara berurutan yaitu Kota Metro, Kota Bandar Lampung, dan Kabupaten Lampung Tengah.

Publikasi dari BPS menunjukkan bahwa Provinsi Lampung menduduki peringkat kedelapan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia dan peringkat kedua termiskin di Pulau Sumatera setelah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Tingginya jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung dibandingkan provinsi lain di Indonesia dan Sumatera disebabkan tingkat kemiskinan diukur secara kumulatif bukan persentase/proporsi. Tingginya jumlah penduduk Provinsi Lampung yang mencapai 7 juta jiwa lebih menyebabkan secara kuantitas jumlah penduduk miskinnya juga lebih banyak dibandingkan provinsi lain.

Menurut data BKKBN, jumlah keluarga miskin di Propinsi Lampung mengalami peningkatan dari 485.481 KK pada Tahun 2003 menjadi 510.885 KK pada Tahun 2004. Indikator Kemiskinan menurut BKKBN berdasarkan karakteristik keluarga miskin pada aspek kegiatan ekonomi dapat ditinjau dari sumber penghasilannya. Secara umum kondisi keluarga miskin tersebut ditandai dengan:

1. Kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, sandang pangan dan kesehatan
2. Kesulitan membiayai pendidikan anak
3. Penghasilan yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar secara layak

4. Sanitasi dan kesehatan lingkungan yang buruk
5. Kondisi fisik rumah yang tidak layak dari segi kesehatan, kebersihan dan keleluasan cahaya matahari untuk masuk ke rumah
6. Pemanfaatan lahan/pekarangan tidak maksimal
7. Rendahnya tingkat pendidikan kepala keluarga
8. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan
9. Terindikasi Kekurangan Gizi

Tabel 1.2. Jumlah Keluarga miskin di Propinsi Lampung Tahun 2003 – 2004

NO.	KAB/KOTA	JUMLAH PENDUDUK MISKIN		PROSENTASE	
		2003	2004	2003	2004
1	Lampung Selatan	90.565	94.065	18,65%	18,41%
2	Lampung Tengah	40.020	38.316	8,24%	7,50%
3	Lampung Utara	38781	41.585	7,99%	8,14%
4	Bandar Lampung	28.776	32.265	5,93%	6,32%
5	Lampung Barat	16.170	17.299	3,33%	3,39%
6	Tulang Bawang	105.839	111.780	21,80%	21,88%
7	Tanggamus	57.682	58.865	11,88%	11,52%
8	Kota Metro	2.636	2.557	0,54%	0,50%
9	Lampung Timur	58.638	64.002	12,08%	12,53%
10	Way Kanan	46.374	50.151	9,55%	9,82%
	Propinsi	485.481	510.885	100%	100%

Sumber : BKKBN Provinsi Lampung

Sedangkan secara makro menurut BPS, Tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung menempati ranking 8 dari 30 provinsi di Indonesia, dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 1.561.700 jiwa. Menurut BPS, Rumah Tangga Miskin (RTM) yang berhak mendapatkan kompensasi BBM adalah rumah tangga yang memenuhi 9 (sembilan) atau lebih dari 14 kriteria sebagai berikut:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 3 m² per orang.
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal dari tanah/bambu/kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.

4. Tidak memiliki fasilitas Buang Air Besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air yang tidak terlindung/sungai/air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar dari arang/minyak tanah.
8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam 1 kali dalam 1 minggu.
9. Hanya dapat membeli 1 stel pakaian baru dalam 1 tahun.
10. Hanya sanggup makan sehari 1 kali/2 kali.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/klinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 ha. Buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan atau pekerjaan lain dengan pendapatan di bawah Rp 600.000,- per bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah, tidak tamat SD/hanya SD.
14. Tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp 500.000,- seperti sepeda motor (kredit/nonkredit), kapal motor atau barang modal lainnya.

Pola sebaran penduduk miskin di Provinsi Lampung sedikit berbeda. Pada tahun 2002 jumlah penduduk miskin mencapai 476.048 KK atau sekitar 29,21% dari total 1.629.771 KK. Tahun 2003 jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 485.481 KK dari total 1.666.520 KK, meskipun secara proporsional menurun menjadi 29,13%. Bappeda Provinsi Lampung melaporkan bahwa pada tahun 2004, jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan menjadi 510.885 KK dari total 1.707.646 KK atau sekitar 29,92% (Anonimus^a, 2006). Menurut data PMD Provinsi Lampung, penduduk miskin itu tinggal secara tersebar di 765 desa tertinggal (Anonimus^c, 2006). Total desa di Provinsi Lampung adalah 2.198 desa, sehingga jumlah desa IDT tersebut mencapai sekitar 34,84%. Proporsi tersebut jelas sangat signifikan dan memerlukan penanganan secara serius dari semua *stake holder*.

Pada tahun 2006, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung berupaya menurunkan jumlah penduduk miskin melalui "Program Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Lampung Tahun 2007". Program tersebut menangani 200 desa IDT yang memiliki Rumah Tangga Miskin (RTM) terbesar (Anonimus⁶, 2006). Dengan demikian setelah pelaksanaan program, dari 765 desa IDT akan tersisa 565 desa IDT. Jumlah ini masih tetap cukup tinggi, sehingga tetap memerlukan penanganan lebih lanjut. Pada umumnya, lokasi desa IDT terletak di daerah terpencil, tersebar, dan cukup jauh. Sementara itu, Komite Penanggulangan Kemiskinan mengatakan bahwa kemiskinan bersifat multidimensional dan bersifat sangat spesifik lokal, sehingga perlakuan pada sebuah lokasi tidak dapat digeneralisasikan pada lokasi lain.

Dengan demikian, proses pemilihan desa berikutnya untuk Program Penanggulangan Kemiskinan pada tahun 2008 dan penetapan program yang tepat untuk masing-masing desa tersebut memerlukan persiapan dan penanganan dengan cermat, karena ketidakcermatan proses perencanaan program akan menyebabkan terjadinya berbagai hal yang sangat tidak diinginkan, baik secara teknis maupun non teknis. Berkaitan dengan kebutuhan tersebut, maka karakteristik utama yang diperlukan dalam proses perencanaan lokasi yang dianggap perlu adalah "Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2008" adalah unsur komprehensivitas, kecepatan, akurasi, dan kemampuan interaktif, sehingga respon terhadap situasi yang berkembang dapat dengan dipertimbangkan dengan cepat dan dilakukan dengan lebih baik. Secara simultan, kombinasi dari semua unsur ini akan memungkinkan terjadinya transparansi.

Dengan adanya transparansi akan memungkinkan partisipasi *stake holder* lebih luas dan proses perencanaan pemilihan lokasi calon peserta program dapat dilakukan sesuai dengan yang diharapkan sehingga pada akhirnya akan memudahkan dalam proses perencanaan pada suatu wilayah. Meskipun kebijakan pengentasan kemiskinan telah banyak dilakukan di Provinsi Lampung, namun belum banyak kebijakan yang terkait dengan upaya mengurangi kesenjangan pendapatan antar masyarakat. Kebijakan ini seharusnya menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Lampung, dan akan lebih efektif dilakukan di tingkat Provinsi dibandingkan di tingkat kabupaten/kota karena bila setiap pemerintah

kabupaten/kota melakukan sendiri kebijakan redistribusi pendapatan, hal ini tidak akan efektif. Sebagai contoh, misalnya Pemerintah Kabupaten Lampung Barat membuat kebijakan yang menguntungkan penduduk berpendapatan rendah.

Sedangkan pemerintah kabupaten/kota lainnya tidak melakukan kebijakan serupa. Akibatnya penduduk miskin dari kabupaten/kota lain akan berbondong-bondong masuk ke Kabupaten Lampung Barat. Sebaliknya penduduk kaya di Kabupaten Lampung Barat akan keluar dari wilayahnya. Maka akan terjadi penumpukan penduduk miskin di Lampung Barat, dan kebijakan redistribusi pendapatan sulit dilakukan, karena potensi pajak dari penduduk kaya telah hilang dengan eksodusnya mereka ke kabupaten/kota lain. Oleh sebab itu, kebijakan redistribusi pendapatan akan lebih efektif bila dilakukan pada tingkat pemerintahan yang lebih luas, dalam hal ini Provinsilah yang dianggap tepat mengambil kebijakan yang dimaksud.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang pemikiran yang telah dijelaskan di atas, maka beberapa pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana karakteristik serta tren kemiskinan di Provinsi Lampung?
2. Bagaimana kondisi ketimpangan pendapatan di Provinsi Lampung?
3. Rekomendasi kebijakan apa saja yang dapat diajukan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Provinsi Lampung?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui karakteristik serta tren kemiskinan dan ketimpangan pendapatan rumah tangga di Provinsi Lampung.
2. Menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah kemiskinan di Provinsi Lampung.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Secara akademis dapat diketahui karakteristik kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Provinsi Lampung, sehingga dapat

digunakan sebagai referensi penelitian tentang kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di daerah lainnya ;

2. Sebagai bahan masukan bagi para pengambil kebijakan di daerah tentang kondisi pembangunan yang bagaimana yang berpengaruh terhadap kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Provinsi Lampung.
3. Sebagai bahan masukan bagi penyusunan program-program pembangunan yang dapat mengurangi jumlah penduduk miskin serta meminimalkan adanya ketimpangan pendapatan di dalam daerah. Serta hasil-hasil yang diperoleh diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengambilan keputusan di kemudian hari.

1.5. Ruang Lingkup

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini akan dibahas dalam ruang lingkup ekonomi regional, konsep kesejahteraan sosial dan kemiskinan. Asumsinya ialah bahwa karakteristik dan tren kemiskinan serta ketimpangan pendapatan di Provinsi Lampung spesifik dan memiliki dimensi spasial yang dapat saja berbeda atau memiliki kemiripan dengan Provinsi lainnya di Indonesia.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan latar belakang pemikiran yang melandasi munculnya ide penelitian ini, permasalahan yang akan dijawab, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan tesis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II menjelaskan berbagai landasan teori yang digunakan untuk menjelaskan masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Pada bab ini juga dideskripsikan beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi.

BAB III METHODOLOGI

Bab ini akan membahas tentang konsep pengukuran yang digunakan untuk menghitung kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Provinsi Lampung.

BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH

Bab ini akan menyajikan berbagai hasil statistik deskriptif. Analisis akan dilakukan secara mendalam untuk melihat karakteristik, tren dan penyebab kemiskinan serta ketimpangan pendapatan di Provinsi Lampung

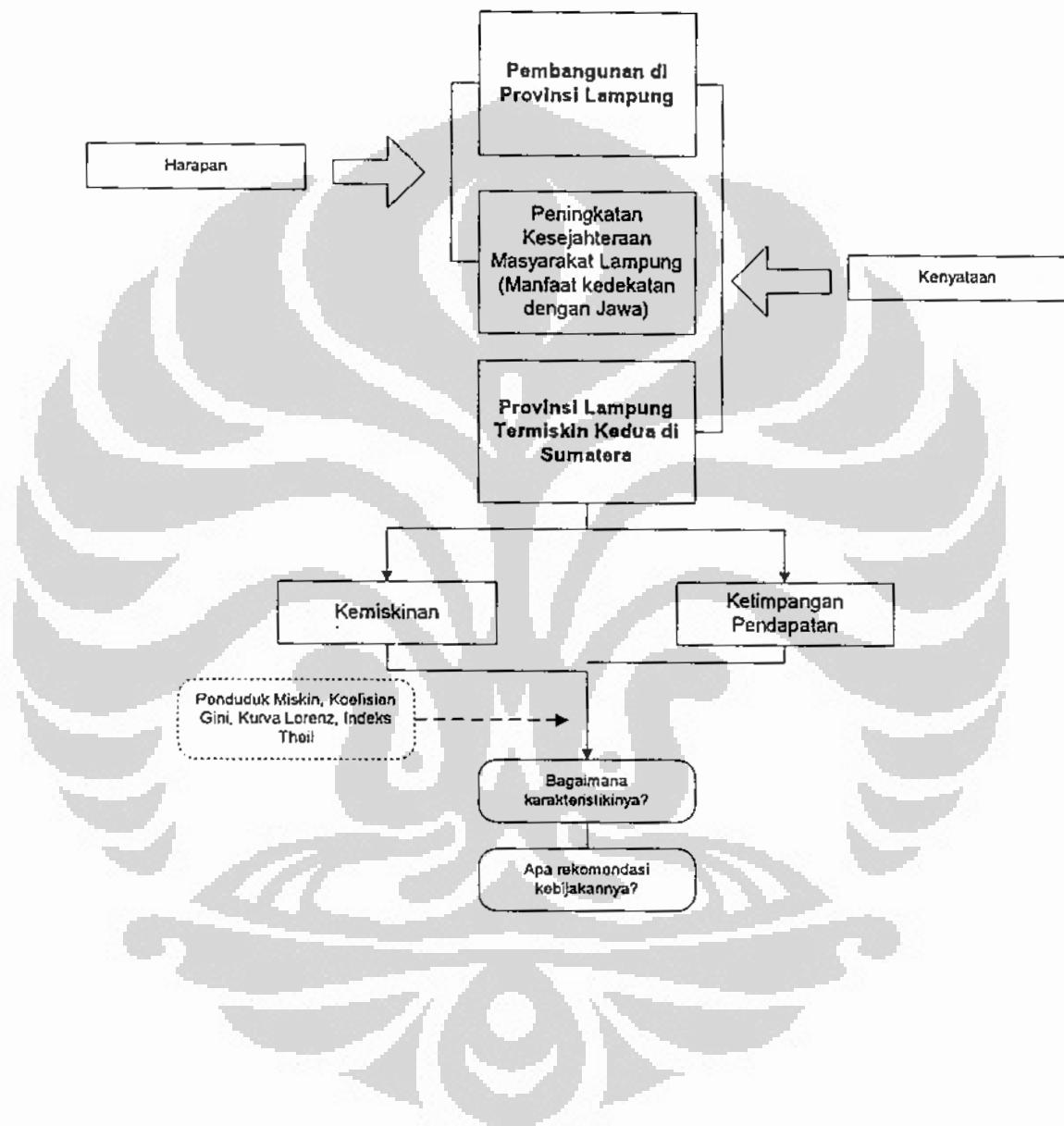
BAB V ANALISIS DATA

Bab ini akan menyajikan berbagai hasil analisis deskriptif dan membahas hasil perhitungan yang telah dilakukan. Analisis akan dilakukan secara mendalam untuk melihat karakteristik, tren, dan penyebab kemiskinan dan terjadinya ketimpangan(disparitas) pendapatan di Provinsi Lampung.

BAB VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab ini menyajikan berbagai kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, beserta rekomendasi kebijakan untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Tentunya kesimpulan yang diperoleh untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya dan apa yang baiknya dilakukan pada periode waktu yang akan datang.

1.6. Alur Berpikir



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi Kemiskinan dan Konsep Pengukurannya

2.1.1. Definisi Kemiskinan

Kemiskinan merupakan persoalan yang dihadapi oleh banyak negara berkembang. Dampak buruk kemiskinan di masyarakat sendiri sangat nyata. Kemiskinan sering dihubungkan dengan kelaparan, kriminalitas, rendahnya tingkat pendidikan, dan rendahnya kualitas kesehatan. Hal ini menyebabkan kemiskinan menjadi indikator kesuksesan suatu pemerintahan. Walaupun pertumbuhan ekonomi suatu negara tinggi, namun apabila tingkat kemiskinan di negara tersebut masih tinggi maka tingginya pertumbuhan ekonomi tersebut menjadi sia-sia karena munculnya berbagai permasalahan lain yang diakibatkan oleh kemiskinan serta terciptanya kondisi instabilitas nasional di negara tersebut yang dalam jangka panjang kondisi tersebut sangat tidak baik, untuk masyarakat maupun jalannya roda pemerintahan.

Kemiskinan merupakan sebuah konsep abstrak, yang dapat di jelaskan secara berbeda, tergantung dari pengalaman dan prespektif penilai/analisis. Cara pandang analisis akan menentukan pemahaman tentang kondisi, sifat dan konteks kemiskinan; bagaimana masalah kemiskinan dapat diatasi. Oleh karena itu, agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara tepat, hal pertama yang harus dilakukan adalah elaborasi pengertian kemiskinan secara komprehensif dan obyektif. Pengertian kemiskinan yang demikian luas memiliki dimensi yang luas pula meliputi : ekonomi, sosial-budaya maupun politik. Dimensi kemiskinan yang bersifat ekonomi memandang kemiskinan sebagai ketidak mampuan dalam memenuhi kebutuhan material manusia seperti : pangan, sandang papan dan sebagainya. Dimensi ini dapat diukur dengan nilai uang, meskipun harganya akan selalu berubah, tergantung pada tingkat inflasi yang terjadi.

Dimensi Sosial dan Budaya dalam kemiskinan, memandang kemiskinan sebagai pelembagaan dan pelestarian nilai-nilai apatis, apolitis, fatalistis, ketidak berdayaan dan sebagainya. Lapisan masyarakat miskin dalam hal

ini akan membentuk kantong-kantong kebudayaan kemiskinan. Dimensi lain mengenai kemiskinan menyangkut aspek struktur atau politik yang dialami masyarakat. Lemahnya masyarakat dalam mengakses proses-proses politik karena tidak adanya lembaga yang mewakili kepentingan mereka menyebabkan terhambatnya kelompok masyarakat itu untuk memperjuangkan aspirasinya.

Dimensi-dimensi kemiskinan yang demikian luas berimplikasi pada upaya untuk mendefinisikan kemiskinan, termasuk ukuran-ukuran yang digunakan. Upaya mendefinisikan kemiskinan secara luas antara lain telah dilakukan dalam konferensi Dunia untuk pembangunan Sosial, yaitu sebagai berikut :

" Kemiskinan memiliki wujud yang majemuk, termasuk rendahnya tingkat pendapatan dan sumber daya produktif yang menjamin kehidupan berkesinambungan; kelaparan dan kekurangan gizi; rendahnya tingkat kesehatan; keterbatasan dan kurangnya akses kepada pendidikan dan layanan-layanan pokok lainnya; kondisi tak wajar dan kematian akibat penyakit yang terus meningkat; kehidupan bergelandang dan tempat tinggal yang tidak memadai; lingkungan yang tidak aman; serta diskriminasi dan keterasingan sosial. Kemiskinan juga didirikan oleh rendahnya tingkat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan dalam kehidupan sipil, sosial dan budaya".

Lebih dari itu, Asian Development Bank/ADB (1999) memahami masalah kemiskinan sebagai perampasan terhadap aset-aset dan kesempatan-kesempatan penting dimana individu pada dasarnya berhak atasnya. Dalam pendekatan baru ini diakui adanya hambatan-hambatan struktural yang menyebabkan tidak terealisasinya hak-hak orang miskin. Office of the high Commissioner for Human Rights, United Nations menyatakan bahwa kemiskinan terjadi karena adanya pengingkaran hak-hak manusia, karena itu kemiskinan tidak mungkin diatasi tanpa realisasi hak-hak manusia.

Dari definisi tentang kemiskinan diatas, secara umum semuanya menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau suatu keluarga dalam keadaan ;

" Kekurangan dan atau ketidak layakkan hidup menurut standar-standar tertentu, kurang kemampuan secara fisik, ketiadaan atau kekurangan akses dalam memperoleh pelayanan minimal dalam berbagai bidang kehidupan, serta kurang memperoleh akses dalam proses-proses pengambilan kebijakan".

2.1.2. Kemiskinan Absolut dan relatif

Berbagai upaya untuk mendefinisikan kemiskinan dan mengidentifikasi penyebab kemiskinan sebenarnya menghasilkan suatu konsep pemikiran yang dapat disederhanakan. Pertama, dari sudut pandang pengukuran, kemiskinan dibedakan menjadi dua yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kedua, dari sudut pandang penyebab, kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi kemiskinan alamiah dan struktural. Salah satu syarat penting agar suatu kebijakan untuk mengatasi kemiskinan dapat tercapai ialah adanya kejelasan mengenai "kriteria" tentang siapa atau kelompok masyarakat mana yang termasuk ke dalam kategori miskin dan menjadi sasaran program. Sedangkan syarat penting selanjutnya ialah memahami secara tepat apa yang menjadi penyebab kemiskinan di suatu komunitas.

Kemiskinan Absolut dan relatif adalah konsep kemiskinan yang mengacu pada kepemilikan materi dikaitkan dengan standar kelayakan hidup seseorang/keluarga. Kedua istilah itu menunjuk pada perbedaan sosial (sosial distinction) yang ada dalam masyarakat berangkat dari distribusi pendapatan. Perbedaannya adalah bahwa pada kemiskinan absolut ukurannya sudah terlebih dahulu ditentukan dengan angka-angka nyata (garis kemiskinan) dan atau indikator/ kriteria yang digunakan, sementara pada kemiskinan relatif kategorisasi kemiskinan ditentukan berdasarkan perbandingan relatif tingkat kesejahteraan antar penduduk.

Kemiskinan Absolut

Pengertian kemiskinan absolut atau mutlak berkaitan dengan standar hidup minimum suatu masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk garis kemiskinan (*poverty line*) yang sifatnya tetap tanpa dipengaruhi oleh keadaan

ekonomi suatu masyarakat. Pembentukan garis kemiskinan tergantung pada definisi mengenai standar hidup minimum.

Pendekatan biologis yang diajukan Rowntree mendefinisikan suatu keluarga dalam "kemiskinan Primer" apabila pendapatan total mereka tidak dapat menutupi kebutuhan-kebutuhan minimum, yaitu untuk memelihara 'efisiensi fisik' guna kelangsungan hidup (survival) mereka. Pendekatan biologis ini merupakan ciri studi-studi rintisan tentang kemiskinan dengan tekanan pada masalah kelaparan. Maka dari itu analisis kemiskinan ditekankan pada perhitungan pendapatan minimum. Garis kemiskinan ditetapkan menurut komposisi keluarga dan penentuan tingkat kemiskinan didasarkan pada kebutuhan nutrisi (diet) minimum yang meliputi kalori, protein dan lemak

Identifikasi dilakukan melalui spesifikasi kebutuhan dasar atau kebutuhan minimum dan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan itu dianggap sebagai tes kemiskinan. Ada sejumlah keberatan terhadap pendekatan biologis. Pertama, karena terdapat variasi penting yang berhubungan dengan sifat-sifat fisik, kondisi iklim, dan kebiasaan kerja. Keberatan pertama ini menunjuk pula pada kesulitan menentukan kebutuhan nutrisi minimum (selanjutnya disebut kebutuhan minimum) karena kebutuhan tersebut bersifat arbitrer menurut variasi kelompok masyarakat dan wilayah. Kedua, ada juga kesulitan menerjemahkan kebutuhan nutrisi (gizi) minimum kedalam kebutuhan bahan pangan minimum karena hal ini tergantung pada pemilihan komoditi. Ketiga, kebutuhan-kebutuhan bukan bahan pangan tidak mudah untuk ditentukan.

Selain pendekatan biologis, dikenal pula pendekatan kebutuhan dasar (basic needs). Pendekatan kebutuhan dasar sebenarnya merupakan perluasan pendekatan biologis. Dalam pendekatan ini, konsep kemiskinan tidak saja mencakup kebutuhan konsumsi minimum suatu keluarga, yaitu pangan, perumahan (papan) dan pakaian yang memadai. Disamping itu, konsep tersebut mencakup pula layanan (services) esensial yang disediakan untuk masyarakat luas, seperti air bersih, sanitasi, transportasi umum, fasilitas kesehatan dan pendidikan.

Kemiskinan absolut mencerminkan suatu kondisi di mana tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti

pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan absolut merujuk pada ketidakmampuan atau ketidakberdayaan seseorang untuk hidup secara layak. Kemiskinan absolut umumnya diukur dengan menggunakan garis kemiskinan yang konstan sepanjang waktu dalam bentuk jumlah maupun nilai pendapatan atau pengeluaran (uang). Namun pengukurannya juga dapat mengacu pada jumlah konsumsi kalori, dimana kriteria pengukuran seperti ini dikenal sebagai pendekatan biologis dan pendekatan kebutuhan dasar. Deklarasi Copenhagen menjelaskan kemiskinan absolut sebagai "sebuah kondisi yang dicirikan dengan kekurangan kebutuhan dasar manusia, yang mencakup kebutuhan makanan, air minum, fasilitas sanitasi, kesehatan, perumahan, pendidikan, dan informasi."

Pendekatan biologis yang diajukan *Rowntree (Rowntree dan Lavers, 1951)* mendefinisikan seseorang atau suatu keluarga termasuk ke dalam kategori 'kemiskinan primer' jika jumlah pendapatannya tidak mencukupi untuk dapat memelihara 'efisiensi fisik' guna mempertahankan keberlangsungan hidup (*survival*)-nya secara normal. Pendekatan biologis ini menjadi karakteristik berbagai studi yang menekankan kemiskinan pada masalah kelaparan. Oleh karena itu, definisi kemiskinan umumnya diukur dengan pendapatan minimum. Tentunya tidak semua pihak setuju dengan pendekatan ini. Alasan pertama ialah bahwa kebutuhan nutrisi setiap orang tidak sama, misalnya tergantung pada iklim dan cuaca maupun pola hidup dan kebiasaan aktifitas. Selain itu, kandungan nutrisi setiap komoditas pangan tidak sama, bahkan di beberapa wilayah ditemukan kesulitan untuk memperoleh bahan pangan.

Beberapa pihak berargumen bahwa seharusnya kemiskinan tidak hanya diukur dari pendekatan biologis saja, tetapi juga ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) non-pangan. Konsep ini mencakup kebutuhan perumahan (papan), dan pakaian yang memadai, serta kemampuan akses terhadap berbagai pelayanan dasar, seperti air bersih, sanitasi, transportasi umum, fasilitas kesehatan, dan pendidikan.

kemiskinan Relatif

Berbeda dengan kemiskinan absolut, kemiskinan relatif pada dasarnya menunjuk pada perbedaan relatif tingkat kesejahteraan antar kelompok masyarakat. Mereka yang berada lapis terbawah dalam presentil ataupun kuartil derajat kemiskinan suatu masyarakat digolongkan sebagai penduduk miskin. Dengan kategorisasi seperti ini, dapat saja mereka yang digolongkan sebagai miskin sebenarnya sudah dapat mencukupi hak dasarnya, namun tingkat keterpenuhannya berada di lapisan terbawah.

Kemiskinan relatif memahami kemiskinan dari dimensi ketimpangan antar kelompok penduduk. Pendekatan ketimpangan tidak berfokus pada pengukuran garis kemiskinan, tetapi pada besarnya perbedaan antara 20 atau 10 persen masyarakat paling bawah dengan 80 atau 90 persen masyarakat lainnya. Kajian yang berorientasi pada pendekatan ketimpangan tertuju pada upaya memperkecil perbedaan antara mereka yang berada dibawah (miskin) dan mereka yang makmur (better-of) dalam setiap dimensi stratifikasi dan diferensiasi sosial. Ketimpangan merupakan suatu permasalahan yang berbeda dengan kemiskinan.

Pada konsep kemiskinan relatif, perhitungan kemiskinan didasarkan pada proporsi distribusi pendapatan dalam suatu wilayah. Kemiskinan jenis ini dikatakan relatif karena lebih berkaitan dengan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat. Suatu kelompok masyarakat dianggap miskin relatif jika pendapatannya termasuk 30% terendah dari distribusi pendapatan. Dengan menggunakan kriteria ini, maka dapat dipasitikan bahwa akan selalu ada penduduk miskin dalam suatu wilayah. namun begitu dengan adanya asumsi pendapatan rata-rata masyarakat yang terus meningkat maka, garis kemiskinan juga terus meningkat.

Sebenarnya ketimpangan merupakan suatu permasalahan yang berbeda dengan kemiskinan. Beberapa orang mengeluhkan bahwa mereka merasa terkucil dan rendah diri di dalam pergaulan dengan orang yang "tidak miskin", meskipun secara absolut, sebenarnya orang tersebut tidak termasuk ke dalam kategori miskin.

2.1.3. Derajat Kemiskinan (*Potensial, Sementara dan Kronis*)

Kondisi kemiskinan dapat berlangsung dalam beberapa derajat, dari tingkat yang paling ringan ke tingkat yang lebih parah. Situasi paling ringan disebut sebagai kemiskinan potensial (*potential poor*), atau hampir miskin (*near poor*). Sementara itu orang yang tengah mengalami kemiskinan terbagi menjadi dua macam : pertama, mereka mengalami kemiskinan untuk sementara waktu karena kondisi eksternal yang membawanya ke situasi seperti itu, disebut kemiskinan sementara; kedua, mereka mengalami untuk waktu yang lama dan sulit diubah kepada tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi, disebut kemiskinan kronis.

- ***Kemiskinan Potensial (Potential poor)***

Orang mungkin belum berada pada situasi miskin, paling tidak karena pendapatannya berada diatas garis kemiskinan, sehingga sedikit guncangan eksternal dapat membuat mereka kehilangan pekerjaan atau berkurang perolehan pendapatannya sehingga jatuh dalam situasi kemiskinan yang lebih buruk. Orang yang berada pada situasi pendapatan seperti ini disebut sebagai hampir miskin (*near poor*). Orang yang berpotensi menjadi miskin jika memiliki latar pendidikan yang rendah, keterampilan kerja yang terbatas, atau kemampuan inovasi atau produksi yang juga terbatas. Potensi menjadi miskin bisa juga berasal dari faktor-faktor eksternal, seperti tempat tinggal yang rentan terhadap bencana alam (banjir, tanah longsor, kekeringan, gempa bumi, badai tsunami dan sebagainya). Tatanan sosial yang rusak sehingga rentan mengalami konflik horisontal juga dapat menjadi potensi untuk terjadinya kemiskinan yang lebih buruk.

Perubahan dan kebijakan politik dan ekonomi yang bisa mengguncang keamanan dan sekaligus berpengaruh menurunnya atau bahkan hilangnya pekerjaan (PHK, bangkrut, menurunnya produksi dan pendapatan, dsb), kebijakan perusahaan dalam hubungan-hubungan kerja kontraktual yang tidak setara, bencana alam yang datangnya tidak terduga dan secara langsung menghilangkan pekerjaannya, konflik sosial politik dan kondisi kesehatan manusia yang semakin menurun, ditengah tiadanya jaminan sosial yang memadai bagi keberlangsungan kehidupan seseorang/keluarga, menjadi faktor-faktor krusial yang membuat seseorang atau keluarga rentan terhadap kemiskinan. Faktor-faktor itu tentu saja

ada yang sejak awal bisa diduga (penurunan kinerja perusahaan tempat seseorang menggantungkan hidupnya), namun ada juga yang datang tiba-tiba tanpa memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk membuat persiapan (bencana alam, perang)

Krisis ekonomi yang berkepanjangan berakibat buruk pada ketersediaan lapangan kerja, dan hal demikian pada gilirannya menciptakan kerentanan penduduk untuk menjadi miskin. Demikian juga tidak adanya jaminan sosial yang memadai atau adanya sistem kontrak kerja yang ditentukan sepihak oleh pemilik lapangan kerja/pemilik modal dimana pekerja tidak memiliki posisi tawar yang setara dihadapan majikannya (atau dengan kata lain tetap berlangsung pola hubungan buruh majikan yang tidak setara sehingga setiap saat buruh terancam di- PHK) juga banyak menjadikan banyak orang rentan jatuh miskin.

- ***Kemiskinan sementara (Transient poverty)***

Merupakan kemiskinan yang terjadi hanya untuk waktu yang relatif sementara. Sedangkan kemiskinan yang terjadi dalam waktu singkat umumnya karena ada *shock* dalam perekonomian, seperti tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Akibatnya, beberapa penduduk yang tadinya tidak miskin menjadi miskin. Kondisi akan berubah jika perekonomian stabil kembali. Kemiskinan ini dialami oleh orang (keluarga) yang sebelumnya tidak miskin, tetapi karena kondisi eksternal tertentu (perang, konflik horizontal dalam masyarakat, bencana alam, kecelakaan dan sebagainya), orang atau keluarga tersebut jatuh dalam kemiskinan. Mereka yang mengalami kemiskinan sementara ini mungkin mempunyai latar belakang pendidikan dan keterampilan yang cukup memadai, atau memiliki etos kerja dan daya inovasi yang tinggi. Orang atau keluarga seperti itu dengan mudah dapat terbebas dari situasi miskin jika kondisi eksternal berubah kearah yang lebih positif.

- ***Kemiskinan Kronis (Cronic Poverty)***

Kemiskinan dapat bersifat kronis (berlangsung dalam jangka panjang) atau temporer (berlangsung dalam jangka pendek). Kemiskinan kronis biasanya sangat sulit untuk ditentukan karena terkait dengan faktor penyebab yang

kompleks dan saling berhubungan satu sama lain. Kemiskinan kronis juga berkaitan dengan kemiskinan antar generasi, dimana sebuah keluarga miskin dapat menciptakan keturunan yang miskin pula. Jika hal ini yang terjadi, maka kemiskinan dapat bersifat kronis, karena tidak ada kekuatan dari dalam diri masyarakat miskin untuk keluar dari kemiskinan.

Sedangkan kemiskinan kultural diakibatkan oleh faktor-faktor adat dan budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang tetap melekat dengan indikator kemiskinan. Padahal indikator kemiskinan tersebut seyogyanya bisa dikurangi atau bahkan secara bertahap bisa dihilangkan dengan mengabaikan faktor-faktor adat dan budaya tertentu yang menghalangi seseorang melakukan perubahan-perubahan kearah kehidupan yang lebih baik. Kemiskinan karena tradisi sosio kultural biasanya terjadi pada suku-suku terasing. Akibatnya kemiskinan dapat berlangsung dalam jangka waktu lama.

Kemiskinan dapat berlangsung secara terus menerus, atau lebih bersifat permanen. Dimana orang lahir dari keluarga miskin, hidup di masyarakat miskin, mungkin dengan kultur kemiskinan (fatalisme), atau tinggal di tempat yang tidak menguntungkan (tanah tandus, miskin sumberdaya alam, terisolasi secara spasial), sehingga sedikit kesempatan tersedia baginya untuk meningkatkan kualitas hidup. Kemiskinan kronis dapat diperparah oleh kebijakan negara yang tidak berpihak kepada masyarakat miskin atau daerah tertinggal, atau oleh sistem pasar yang tidak memberi ruang bagi mereka untuk masuk sebagai tenaga kerja atau untuk menjual produk-produk mereka karena tidak dapat bersaing dengan produk-produk lain di pasar bebas.

Terminologi kemiskinan lain yang juga pernah dikemukakan sebagai wacana adalah kemiskinan struktural dan kultural. Soetandyo Wingojoebroto dalam "kemiskinan Struktural : Masalah dan Kebijakan" yang dirangkum oleh Suyanto (1995:59) mendefinisikan "Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang ditenggarai atau disebabkan kondisi struktur atau tatanan kehidupan yang tidak menguntungkan" dikatakan tidak menguntungkan karena tatanan itu tidak hanya menerbitkan akan tetapi juga melanggengkan kemiskinan di dalam masyarakat. Kemiskinan dapat didekati secara obyektif (*utility*) maupun subyektif. Sebagian besar ukuran kemiskinan termasuk dalam pandangan

objektif. Komunitas internasional menaruh perhatian serius terhadap penghitungan kemiskinan dari sudut pandang subjektif. Namun, pandangan subyektif atau keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang memandang diri mereka sendiri sebagai orang miskin, kadang kala menyesatkan. Misalnya ada orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya namun menganggap dirinya tidak miskin.

Walaupun konsep kemiskinan dan keadilan sangatlah berbeda, namun indikator kemiskinan seringkali dihubungkan sebagai ukuran keadilan. Jalan pintas untuk mendapatkan gambaran umum dari keadilan adalah dengan menganggap kemiskinan sebagai salah satu bentuk dari ketidakadilan. Kemudian menghitung *poverty threshold* sebagai fungsi dari rata-rata pendapatan, walaupun di negara berkembang hal ini kurang relevan karena upah di sektor formal tidak mewakili mayoritas angkatan kerja yang bekerja di sektor informal. Kemiskinan juga sebagai salah satu bentuk ekstrem dari *underdevelopment*. Sehingga tidak aneh apabila banyak indikator kemiskinan yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan di suatu negara atau daerah. Hal ini tepat berlaku khususnya untuk indikator-indikator sosial (misalnya akses ke pelayanan dasar, angka kematian bayi, dan sebagainya).

2.1.4. Pengukuran Kemiskinan

Untuk mengetahui jumlah penduduk miskin, sebaran dan kondisi kemiskinan diperlukan pengukuran kemiskinan yang tepat sehingga upaya untuk mengurangi kemiskinan melalui berbagai kebijakan dan program pengurangan kemiskinan akan efektif. Pengukuran kemiskinan yang dapat di percaya menjadi instrumen yang tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Pengukuran kemiskinan yang baik akan memungkinkan dalam melakukan evaluasi dampak dari pelaksanaan proyek, membandingkan kemiskinan antar waktu dan menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk menguranginya.

Dalam mengukur kemiskinan, biasanya digunakan pendekatan konsep kemampuan kebutuhan dasar (*basic needs approach*) sebagaimana yang digunakan pula oleh BPS. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai

ketidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Pengukuran kemiskinan absolut menurut BPS ialah dengan menggunakan garis kemiskinan dan karakteristik rumah tangga. Sedangkan pengukuran kemiskinan BKKBN mengklasifikasikan keluarga sejahtera dan pra-sejahtera.

Menurut PBB indikator kemiskinan ditinjau dari sisi pendapatan adalah penduduk dengan pendapatan kurang dari US\$ 1 per hari. Sementara itu, menurut World Bank penghitungan kemiskinan dari sisi pendapatan dilakukan dengan menentukan garis kemiskinan. Penentuan garis kemiskinan dapat berubah-ubah menurut menurut spesifikasi lokalitas dan intensitas kemiskinan. Artinya, untuk menentukan intensitas kemiskinan diperlukan penjenjangan dalam penentuan garis kemiskinan. Secara umum cara mengidentifikasi kemiskinan dilakukan dengan:

- Mendefinisikan indikator kesejahteraan terhadap suatu negara/daerah tertentu sehingga dapat menentukan garis kemiskinan
- Mengumpulkan ringkasan data kemiskinan untuk menambahkan informasi garis kemiskinan
- Menetapkan standar minimum dari indikator di atas untuk membedakan kelompok miskin dari yang non-miskin

Adapun penentuan garis kemiskinan dasar atau standar minimum melalui:

- Penentuan garis kemiskinan biasanya berdasarkan tingkat pendapatan penduduk yaitu menurut besarnya pendapatan penduduk berpendapatan terendah per individu. Perhitungannya melibatkan pengukuran tingkat pendapatan per kapita keluarga untuk setiap anggota keluarga, dengan asumsi bahwa setiap anggota keluarga memiliki preferensi konsumsi yang sama. Perlu diperhatikan juga bahwa sebenarnya setiap individu memiliki karakteristik kebutuhan yang berbeda berdasarkan jenis kelamin, umur, jenis pekerjaan, dan sebagainya. Secara teknis, menurut World Bank, ada beberapa indikator dalam penentuan garis kemiskinan seperti *headcount index*, *poverty gap index*, *poverty severity index*, dan *Sen-Shorrocks Index*. Seluruh indikator tersebut menggunakan data pendapatan penduduk.

- Penentuan garis kemiskinan berdasarkan persentase nilai konsumsi terhadap pendapatan oleh penduduk berpendapatan terendah
- Tingkat konsumsi yang memenuhi persyaratan minimum kebutuhan energi harian per individu.
- Secara umum bila seorang individu termasuk ke dalam kelompok miskin berdasarkan kriteria garis kemiskinan di atas maka akan sulit baginya memenuhi kebutuhan pokok. Penentuan garis kemiskinan berdasarkan pemenuhan kebutuhan pokok lebih banyak mempertimbangkan aspek kualitas dari kebutuhan pokok itu sendiri seperti kecukupan nilai gizi yang baik menurut standar kesehatan WHO.
- Penentuan garis kemiskinan menurut tempat bernaung yang layak. Kembali lagi disini penentuan yang layak itu seperti apa? Pertama, yang memenuhi standar kesehatan bagi keseluruhan anggota keluarga yang tinggal. Kedua, yang memenuhi standar kesehatan lingkungan sekitar (terhadap keluarga lain dan terhadap keseimbangan lingkungan fisik itu sendiri)
- Penentuan garis kemiskinan berdasarkan akses ke pelayanan kesehatan yang layak. Pelayanan kesehatan menjadi kebutuhan dasar karena berhubungan dengan peranannya sebagai penentu kualitas hidup. Melalui pelayanan kesehatan yang baik orang miskin mendapatkan pelayanan kesehatan yang manusiawi .

Berikutnya adalah penentuan garis kemiskinan sekunder:

- Penentuan garis kemiskinan berdasarkan akses ke pelayanan pendidikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan karena pendidikan memiliki peranan dalam pembentukan kualitas kehidupan seseorang yang nantinya diharapkan dapat menjadi bekal untuk keluar dari kemiskinan. Pendidikan merupakan satu-satunya cara keluar dari kemiskinan bagi orang miskin.
- Penentuan garis kemiskinan menurut kepemilikan akan faktor produksi seperti tanah, keahlian, dan modal.
- Penentuan garis kemiskinan berdasarkan akses kemudahan perolehan pekerjaan.

- Penentuan garis kemiskinan berdasarkan angka ketergantungan yang tinggi dalam suatu keluarga.

UNDP menentukan kemiskinan berdasarkan beberapa ukuran berikut:

- *Human Development Index* yang meliputi usia harapan hidup ketika lahir (*life expectancy at birth*), jumlah orang dewasa yang melek aksara (*adult literacy*), jumlah orang yang bersekolah (*educational enrollment*), dan pendapatan per kapita;
- *Gender related Development Index* yang meliputi rendahnya perbedaan gender;
- *Gender Empowerment Measure* yang mencakup persentase wanita yang duduk dalam parlemen, perempuan yang menduduki jabatan administrator dan manajer, wanita yang berkerja sebagai teknisi dan profesional dan pangsa pendapatan perempuan;
- *Human Poverty Index* (untuk negara berkembang) yang mencakup penduduk yang tidak bertahan sampai umur 40, tingkat buta huruf, akses pada air bersih, akses pada pelayanan kesehatan dan bayi dengan bobot badan rendah.

2.2. Teori Ketimpangan dan Distribusi Pendapatan

2.2.1. Konsep Dasar Ketimpangan

Ketimpangan merupakan fenomena umum yang terjadi di seluruh dunia, tidak hanya di negara atau daerah yang masih berkembang saja, tetapi juga terjadi di negara dan daerah maju. Berbagai studi menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan cenderung meningkat dan bahkan ada negara atau daerah yang mengalami ketimpangan hampir sempurna. Tentunya pemerintah melakukan berbagai upaya dan kebijakan untuk mengatasi kondisi ketimpangan pendapatan, dengan tujuan meminimalisasi dampak negatif yang dapat ditimbulkannya. Selain itu, banyak pemerintahan di dunia yang sadar bahwa meningkatkan standar hidup penduduk berpendapatan rendah merupakan bagian dari upaya pemenuhan hak asasi manusia. Dengan adanya kesadaran tersebut, setidaknya seluruh penduduk dapat terpenuhi standar hidup minimalnya dan mengejar ketertinggalannya dari

kehidupan penduduk yang tidak miskin. Intinya, setiap orang memiliki hak sipil dan politik yang sama, terpenuhi kebutuhan hidup minimalnya, dan mampu merealisasikan kehidupan ekonomi, sosial, dan budayanya (Green, 2008).

Pentingnya penanganan masalah ketimpangan pendapatan didasarkan pada kesadaran bahwa dampak yang ditimbulkan dari ketimpangan sangat besar pengaruhnya terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Dengan munculnya ketimpangan, potensi konflik sosial, politik dan ekonomi, menjadi lebih besar, dan dapat merusak pencapaian pembangunan yang telah terjadi sebelumnya. Meskipun banyak studi yang menekankan bahwa ketimpangan pendapatan memiliki manfaat positif sebagai salah satu perwujudan untuk mendorong orang agar lebih produktif, tetapi ternyata banyak studi juga yang menemukan besarnya dampak negatif dari ketimpangan. Para penentang ketimpangan memiliki argumen bahwa ada peran negatif dari ketimpangan. Dijelaskan bahwa ternyata ketimpangan dapat menghapus bakat yang sebenarnya potensial. Sebagai contoh, jika sebuah bank menolak meminjamkan uang kepada masyarakat miskin, maka masyarakat miskin yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk mengembangkan aktifitas ekonomi gagal mewujudkannya akibat tidak ada modal.

Dalam konteks sosial, ketimpangan dapat mengancam kohesi sosial dan institusi, akibat adanya kecemburuan sosial antar kelompok masyarakat dan munculnya kriminalitas (Stewart, Brown, & Mancini, *Why Horizontal Inequalities Matter: Some Implications for Measurement*, 2005). Lebih lanjut, ketimpangan yang terjadi secara terus menerus, dapat menciptakan kemiskinan antar generasi, sehingga muncullah (*vicious circle of poverty*). Rumah tangga yang miskin tidak mampu membiayai kebutuhan hidup anaknya secara memadai, sehingga akhirnya anak mereka kelak menjadi orang miskin pula.

Secara umum, ketimpangan dapat dibagi ke dalam dua konsep besar, yaitu ketimpangan vertikal dan horisontal, dimana keduanya terkait erat. Ketimpangan vertikal secara sederhana mengukur ketimpangan di antara individu, dimana biasanya mengacu pada ketimpangan pendapatan, konsumsi, dan kekayaan (*income, consumption, and wealth*). Pengukuran jenis ini pada kebanyakan studi biasanya menggunakan kurva Lorenz dan indeks Gini. Kedua indikator tersebut secara jelas dapat menginformasikan perbandingan antar kelompok pendapatan,

antara penduduk yang paling miskin dengan paling kaya. Sebaliknya, ketimpangan horisontal biasanya dilakukan dengan memperbandingkan antar kelompok masyarakat berdasarkan suku, ras, agama, gender, dan sebagainya, pengukuran jenis ini lebih dalam menggunakan indeks theil.

Pembahasan lebih lanjut terhadap keduanya terkait dengan tingkat kepentingan analisis yang ingin dilakukan. Pada umumnya, ketimpangan vertikal lebih sering digunakan untuk menggambarkan kondisi ketimpangan di suatu daerah. Tetapi sebenarnya pembahasan ketimpangan vertikal tidak dapat menjelaskan fenomena mengapa ketimpangan dapat terjadi. Padahal, ketimpangan vertikal merupakan hasil dari gejala ketimpangan pendapatan dimana kesempatan setiap orang tidak sama.

Sebagai contoh, seseorang pendapatannya jauh tertinggal dibanding orang lain karena tingkat pendidikan yang dimilikinya jauh lebih rendah. Akibatnya tingkat upah yang dapat diperolehnya juga rendah. Pertanyaan selanjutnya, apakah yang menyebabkan tingkat pendidikan orang tersebut rendah? Ternyata karena orang tersebut tinggal di perdesaan yang akses pendidikannya juga sulit. Jika orang tersebut tinggal di kota yang akses pendidikannya jauh lebih mudah, mungkin pendapatannya akan lebih tinggi.

Dengan penjelasan di atas, terlihat bahwa ketimpangan horisontal dapat menjelaskan fenomena ketimpangan vertikal yang ada. Namun demikian, cukup sulit untuk menentukan atas dasar apa klasifikasi kelompok horisontal dibuat? Apakah benar bahwa ada diskriminasi akses pendidikan untuk setiap kelompok suku tertentu? (Stewart, Brown, & Mancini, *Why Horizontal Inequalities Matter: Some Implications for Measurement*, 2005). Adanya ketidaksamaan akses terhadap politik, ekonomi dan sumberdaya sosial dapat menyebabkan munculnya ketimpangan vertikal (misalnya ketimpangan pendapatan). Ketimpangan horisontal dapat mengurangi kemampuan masyarakat untuk mewujudkan potensinya lebih baik. Ketimpangan horisontal juga dapat menunjukkan adanya kendala dalam pengentasan kemiskinan, karena mereka yang miskin sulit memperoleh akses pelayanan publik (Stewart, *Addressing Discrimination and Inequality*, 2007).

Untuk mengatasi masalah ketimpangan horisontal, setidaknya ada tiga jenis tujuan yang terdiri dari kebijakan langsung (sesuai target tertentu); kebijakan tidak langsung yang bersifat umum (indirect policies); dan kebijakan yang terintegrasi. Kebijakan langsung bercirikan pendekatan langsung terhadap kelompok target tertentu (spesifik). Sebaliknya, kebijakan tidak langsung (indirect policies) berlaku untuk seluruh kelompok masyarakat (tidak hanya yang miskin), dimana masyarakat miskin akan memperoleh manfaat paling besar. Kebijakan yang terintegrasi bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai kelompok masyarakat.

Seluruh jenis kebijakan ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sebagai contoh, kebijakan langsung yang ditujukan secara spesifik untuk penduduk miskin, dampaknya akan langsung terasa secara cepat dibanding kebijakan tidak langsung. Namun hal ini justru dapat memperkuat munculnya perbedaan dan pertentangan antar kelompok, karena dianggap hanya kelompok tertentu yang menerima manfaat kebijakan.

Tabel 5. Ringkasan Pendekatan Kebijakan yang dapat Mendukung Pengurangan Ketimpangan Horisontal.

Jenis Kebijakan	Langsung	Tidak Langsung	Terintegrasi
Definisi	Beberapa kelompok tertentu menerima program. Hanya anggota kelompok yang memperoleh bantuan program tersebut	Kebijakan tidak langsung yang dapat memberikan implikasi pada pemerataan diantara kelompok masyarakat	Kebijakan yang dapat meminimalkan kesenjangan atau perbedaan yang ada, dengan mengedepankan satu identitas bersama
Contoh	Bantuan pendidikan untuk masyarakat tidak mampu	Penerapan pajak progresif; penetapan undang-undang anti diskriminasi	Sekolah yang terintegrasi; peristiwa olah raga yang dapat mempersatukan masyarakat
Keunggulan	Dampaknya langsung dirasakan masyarakat miskin dan dapat mengurangi ketimpangan lebih cepat	Seluruh kelompok masyarakat dapat memperoleh manfaat kebijakan tanpa ada perbedaan.	Mempererat hubungan antar kelompok dan menghilangkan munculnya perasaan berbeda antar kelompok (ada perserikatannya)
Kelemahan	Dapat memunculkan pertentangan antar masyarakat, terutama yang tidak menerima bantuan program; rawan korupsi	Lambat; manfaat bagi kelompok miskin bisa saja tidak terlalu besar	Hilangnya identitas kultural tertentu dan bersifat sementara

Source: (Stewart, Addressing Discrimination and Inequality, 2007)

Beberapa teori pertumbuhan seperti teori Lewis dan Kaldor juga menjelaskan terjadinya disparitas pendapatan antar daerah atau antar golongan. Menurut Lewis (Boediono, 1981) apabila dalam suatu perekonomian dituntut adanya akumulasi kapital dan pertumbuhan, maka harus ada tabungan (*saving*) dari masyarakat, dan tabungan tersebut berasal dari golongan kapitalis di sektor modern, karena menurut Lewis dalam perekonomian dua sektor (modern dan tradisional), golongan buruh tidak memiliki sisa dari pendapatan yang dapat ditabung, karena upah yang diterima merupakan upah subsisten.

Oleh sebab itu dalam perekonomian seperti ini terjadinya ketimpangan antar golongan memang diperlukan untuk memupuk tabungan sebagai sumber pendanaan investasi. Dalam model Kaldor menunjukkan bahwa semakin tidak merata pola distribusi pendapatan, semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi, dan seandainya laju pertumbuhan GDP adalah satu-satunya tujuan masyarakat, maka strategi terbaik adalah membuat pola distribusi setimpang mungkin. Model ini menunjukkan adanya "*trade off*" antara pertumbuhan GDP yang cepat, namun disertai dengan ketimpangan dalam distribusi pendapatan, dan sekaligus memberi peringatan bahwa laju pertumbuhan GDP seharusnya tidak dijadikan satu-satunya tujuan pembangunan.

Pembangunan daerah tidak terlepas dari peran pemerintah dan para agen ekonomi yang terlibat di dalamnya. Namun demikian, berbagai faktor seperti distribusi kepemilikan sumberdaya, kondisi sosial dan budaya, serta karakteristik demografi juga mempengaruhi keberhasilan pembangunan itu sendiri. Adanya perbedaan berbagai faktor di setiap daerah, menyebabkan pembangunan daerah bersifat unik dan tidak sekedar replikasi keberhasilan pembangunan di daerah lain saja. Intinya, dengan memahami karakteristik serta akar permasalahan yang ada di suatu daerah, maka pemerintah dapat menetapkan langkah kebijakan strategis yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya.

Salah satu indikator penting untuk mengevaluasi pembangunan ialah angka kemiskinan dan distribusi pendapatan di antara kelompok masyarakat. Setelah berakhirnya perang dunia kedua, seluruh negara maupun daerah di dunia terfokus pada upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Masalahnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu menciptakan

keadilan bagi masyarakatnya. Ada beberapa kelompok masyarakat yang memperoleh sedikit saja manfaat pembangunan. Sebaliknya di lain pihak, kelompok lainnya memperoleh manfaat yang sangat besar. Karena terfokus pada pertumbuhan ekonomi, kebijakan pengentasan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan seringkali tidak dianggap sebagai prioritas. Asumsi bahwa trickle down effect dari hasil-hasil pembangunan ternyata tidak sepenuhnya benar terjadi. Menurut Kuznets (1955), seluruh penduduk (kelompok masyarakat) harus memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

Distribusi pendapatan yang tidak merata dapat menimbulkan 2 efek yang saling bertentangan. Efek pertama, ketimpangan memacu orang yang pendapatannya rendah untuk lebih produktif, inovatif, dan meningkatkan kualitas sumberdayanya agar dapat mengejar ketertinggalan dari orang lain. Efek kedua, ketimpangan akan memicu munculnya berbagai masalah sosial seperti kejahatan, kemiskinan, kecemburuan sosial, dan sebagainya.

Untuk mengukur ketimpangan pendapatan dapat menggunakan 2 jenis pendekatan. Pendekatan pertama ialah pendekatan konsumsi. Kelebihan pendekatan ini diantaranya validitas data yang lebih *reliable*, mengingat dalam household survey biasanya responden ditanya mengenai konsumsi mereka dalam 1 minggu terakhir. Dengan rentang waktu yang pendek, responden masih dapat mengingat dengan baik pengeluaran konsumsi mereka sehingga data yang disampaikan relatif lebih akurat. Kelebihan lain pendekatan konsumsi ialah bahwa konsumsi individu dalam jangka pendek relatif stabil dan tidak berfluktuasi secara signifikan.

Pendekatan kedua ialah pendekatan pendapatan, dimana income inequality diukur dengan menggunakan data *gross income*, *factor income*, dan *labor income*. Kelebihan pendekatan konsumsi menjadi kelemahan pendekatan ini, hanya saja, dengan melakukan dekomposisi pendapatan, dapat diketahui sumber penyebab terjadinya ketimpangan pendapatan. Pendekatan ini juga dapat mengidentifikasi peranan pasar tenaga kerja, aset produktif, dan transfer dalam kehidupan berbagai kelompok pendapatan penduduk. Masalahnya, data pendapatan untuk Indonesia

sulit diperoleh, sehingga perhitungan ketimpangan pendapatan lebih sering menggunakan pendekatan konsumsi.

2.3. Beberapa Ukuran Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan regional dapat diukur dengan berbagai indikator, diantaranya Gini Rasio, dan kurva Lorenz dan Indeks Theil.

2.3.1. Koefisien Gini

Koefisien Gini adalah alat ukur ketimpangan pendapatan selain Kurva Lorenz. Keduanya memiliki keterkaitan erat, dimana Koefisien Gini merupakan ringkasan statistik ketimpangan yang dihitung dari Kurva Lorenz. Koefisien Gini dihitung sebagai rasio antara luas area A (*di Kurva Lorenz*) dengan luas area A + B. Nilai Koefisien Gini bervariasi antara 0 hingga 1, dimana angka 0 menunjukkan kasus pemerataan sempurna, sedangkan angka 1 merupakan ketimpangan sempurna. Sehingga, Koefisien Gini memberikan informasi derajat ketimpangan dalam hal distribusi pendapatan penduduk.

Ketimpangan pendapatan dapat menjadi sinyal adanya ketimpangan horizontal di dalam masyarakat, dimana akses setiap penduduk terhadap fasilitas publik seperti pendidikan dan kesehatan dan juga kesempatan kerja tidak sama. Tingkat ketimpangan yang semakin besar memperburuk kualitas hidup masyarakat, khususnya yang berpendapatan rendah, serta menghambat pembangunan modal manusia. Selain itu, ketimpangan pendapatan juga memicu tingginya angka kriminalitas dan menciptakan kualitas sumberdaya manusia yang buruk di masa mendatang. Adanya ketimpangan juga mempersulit tercapainya konsensus politik di antara kelompok pendapatan akibat banyak penduduk yang merasa tidak puas dengan kondisi ekonomi mereka sebagai hasil pembangunan. Koefisien Gini menghitung ketimpangan pendapatan dalam suatu negara/daerah, dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dengan Kurva Lorenz dibagi luas seluruh segi empat dimana kurva Lorenz tersebut berada. Koefisien Gini merupakan ukuran ketimpangan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu ketimpangan sempurna). Formula yang digunakan adalah :

$$I_G = 1 + \frac{1}{N} - \frac{2}{N^2 \bar{y}} (y_1 + 2y_2 + \dots + Ny_n) \quad (2.1)$$

I_G = Index Gini

Y_h = Pendapatan unit ke-h ($h=1,2,\dots,N$), unit : person atau rumah tangga.

\bar{y} = Pendapatan rata-rata.

Semakin tinggi Index Gini, semakin tinggi ketidakmerataan antar kelompok RT atau individu penerima pendapatan Indikator ini banyak digunakan di banyak negara sebagai ukuran ketidakmerataan, namun demikian indikator ini memiliki kelemahan, diantaranya sangat sensitif terhadap perubahan distribusi pendapatan kelas menengah, kurang memenuhi prinsip transfer dan sulit dilakukan dekomposisi.

2.3.2. Kurva Lorenz

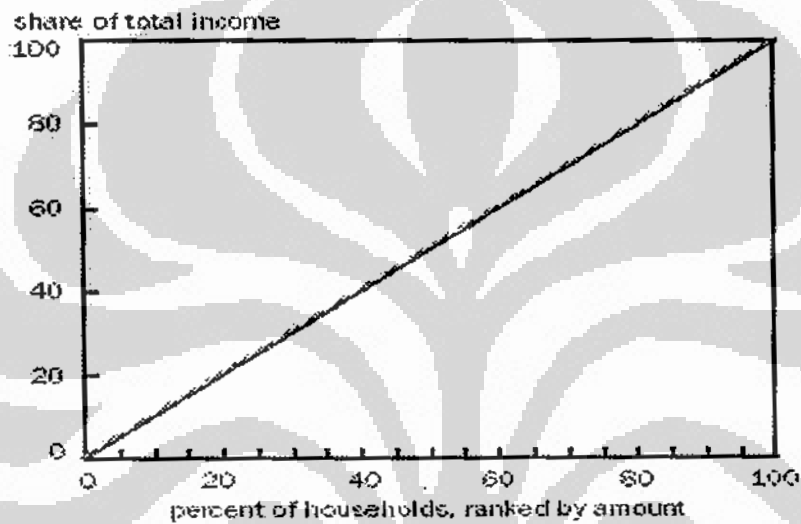
Setelah membahas mengenai pendekatan pengukuran, maka hal penting lainnya ialah alat ukur apa yang digunakan untuk melihat ketimpangan pendapatan. Kurva Lorenz merupakan salah satu alat yang dapat menyediakan informasi mengenai ketimpangan pendapatan. Kurva Lorenz menunjukkan hubungan kuantitatif aktual antara prosentase penerima pendapatan dengan prosentase pendapatan total yang diterima oleh golongan tersebut. Semakin jauh jarak kurva Lorenz dari garis diagonal (yang merupakan garis pemerataan sempurna), semakin timpang distribusi pendapatan dalam suatu daerah.

Untuk menggambarkannya, hal pertama yang perlu dilakukan ialah mengurutkan rumah tangga atau observasi menurut ranking pendapatan, dimulai dari yang berpendapatan paling rendah hingga yang tertinggi. Selanjutnya, dilakukan plot hubungan antara persentase kumulatif penduduk (pada sumbu horisontal) dengan proporsi pendapatan yang diperoleh masing-masing kelompok atau setiap persentase kumulatif pendapatan (pada sumbu vertikal).

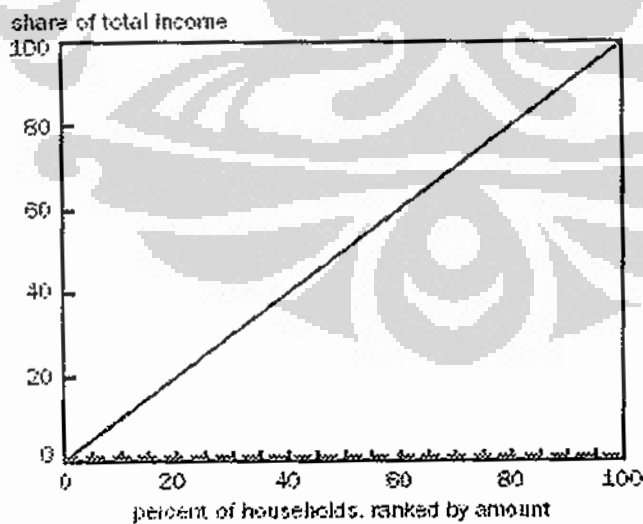
Gambar di bawah menunjukkan Kurva Lorenz dengan dua kasus yang paling ekstrim, yaitu ketidaktimpangan (*kemerataan*) sempurna dan ketimpangan sempurna. Pada kasus *kemerataan* (*ketidak timpangan*) sempurna, setiap orang memiliki proporsi pendapatan yang sama, sehingga Kurva Lorenz

berimpit dengan garis 45 derajat (*lihat gambar 2.1.*). Pada kasus ketimpangan yang sempurna, hanya ada satu orang yang memperoleh seluruh pendapatan di dalam perekonomian. Sedangkan penduduk lainnya tidak memperoleh pendapatan sama sekali.

Gambar 2.1. Kurva Lorenz untuk Kasus Kemerataan Sempurna

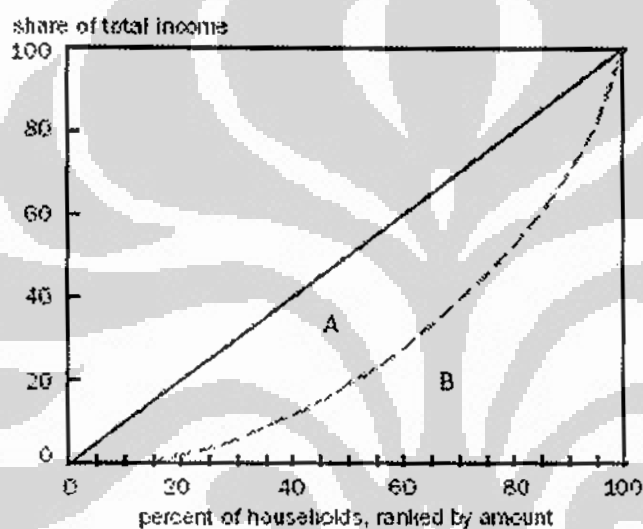


Gambar 2.2. Kurva Lorenz untuk Kasus Ketimpangan Sempurna



Pada kasus ketimpangan sempurna, Kurva Lorenz tetap flat dan loncat ke angka 100 pada rumah tangga atau individu terakhir. Dalam dunia nyata tentunya kedua kasus ekstrim di atas tidak pernah terjadi. Namun, tetap saja ada rumah tangga yang pendapatannya tinggi dan ada yang rendah. Oleh karenanya, Kurva Lorenz biasanya berada di antara kondisi pemerataan sempurna dan ketimpangan sempurna (lihat gambar 2.2).

Gambar 2.3. Kurva Lorenz untuk Kasus Umum



2.3.2. Indeks Theil

Index Theil merupakan alat analisis untuk mengetahui disparitas antar daerah, dengan melakukan dekomposisi sumber-sumber disparitas, yaitu menjadi disparitas antar wilayah (between region) dan dalam wilayah (within region). Komponen antar wilayah (between region) adalah rata-rata tertimbang dari ketimpangan pendapatan antar wilayah dalam propinsi, sedangkan komponen dalam wilayah (within region) merupakan rata-rata tertimbang dari ketimpangan pendapatan antar kabupaten dalam wilayah tertentu.

Perlu dicatat bahwa dalam melihat ketimpangan pendapatan dengan menggunakan index Theil mampu memberikan gambaran kondisi ketimpangan yang ada, namun demikian tidak mampu memecahkan permasalahan intrinsik yang ada dalam ketimpangan pendapatan regional (Akita, 2001).

2.3. Teori Kesejahteraan Sosial

Pada dasarnya setiap manusia ingin hidup sejahtera. Di dalam ekonomi, konsep kesejahteraan telah menjadi pembahasan sejak lama. Secara individual, kesejahteraan seseorang diukur dari besarnya tingkat utilitas yang diperolehnya. Sedangkan secara agregat, penjumlahan seluruh utilitas individu merupakan kesejahteraan yang dicapai keseluruhan masyarakat.

Kesejahteraan adalah bahasan yang normatif di dalam ilmu ekonomi memiliki berbagai permasalahan di dalam pengukurannya. Kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai pengukuran terhadap kesejahteraan seluruh masyarakat dalam suatu perekonomian, dimana besarnya kesejahteraan tersebut tergantung dari kesejahteraan yang diterima oleh masing-masing individu (Sen, 1982). Kesejahteraan sosial sendiri merupakan fungsi dari seluruh utilitas individu sebagai anggota masyarakat dalam suatu perekonomian. Sedangkan utilitas masing-masing individu merupakan fungsi dari berbagai kombinasi konsumsi barang. Kesejahteraan sosial akan meningkat jika paling tidak ada satu individu yang mengalami peningkatan kesejahteraan dimana individu lainnya memperoleh tingkat kesejahteraan yang tetap. Langkah awal di dalam setiap solusi dalam kesejahteraan ialah pengukuran terhadap kesejahteraan individu. Ini adalah konsekuensi yang alami dari pembentukan model perilaku individu konsumen dengan menggunakan tingkat kepuasan kebutuhan dasar/pokok.

Adapun literatur yang membahas mengenai konsep kesejahteraan (ekonomi normatif) terpecah menjadi dua kelompok, kelompok pertama disebut *New Welfare Economics*, yang merupakan pecahan dari Partian (penganut ajaran tradisional Pareto). Kelompok inipun terbagi menjadi dua yaitu pertama yang mengikuti *Nicholas Kaldor (1939)*, *John Hicks (1939)* dan *Tibor Scitovsky (1941)* dengan menerapkan prinsip kompensasi. Pada prinsip ini, setiap adanya perubahan kebijakan, pihak yang diuntungkan akan memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan untuk meningkatkan kesejahteraan yang diperoleh. Sedangkan Abram Bergson (1938) dan Paul Samuelson (1950) menunjukkan bahwa prinsip tersebut menyebabkan inconsistent orderings, dan lebih mempercayai bahwa pembahasan kesejahteraan bersifat normatif. John Chipman (1973) dan James Moore (1980) menunjukkan bahwa prinsip kompensasi

menghasilkan indikator kesejahteraan yang valid hanya jika preferensi individu adalah identik dan homotetik.

Kelompok kedua ialah kelompok yang lebih percaya pada tradisi pengukuran kesejahteraan yang tradisional di dalam ilmu ekonomi, yaitu prinsip Pareto. Di dalam prinsip ini, suatu perubahan kebijakan akan meningkatkan kesejahteraan sosial hanya jika kebijakan tersebut menyebabkan paling tidak ada satu individu yang berada pada kondisi lebih baik, sementara individu lainnya tetap (kesejahteraannya). Konsep optimalitas Pareto memiliki peran penting dalam teori keseimbangan kompetitif umum yang dikemukakan oleh Arrow dan Gerard Debreu (1954), melalui dua teorema mendasar dari ekonomi kesejahteraan. Prinsip kompensasi akan tergantung dari validitas asumsi mengenai preferensi terhadap kondisi empiris. Amartya Sen (1977) menjelaskan bahwa prinsip kompensasi yang dianut oleh New Welfare Economics menggunakan ukuran ordinal untuk kesejahteraan individu dan tidak dapat dibandingkan antar individu.

Kaldor dan Hicks lebih lanjut mengembangkan konsep kesejahteraan melalui kriteria Kaldor-Hicks, sedangkan Scitovsky mengembangkan konsep yang disebut Scitovsky Reversals and the Double Criteria. Kelompok Harvard berusaha membangun konsep yang kemudian dikenal dengan Bergson-Samuelson Social Welfare Functions. Bergson dan Samuelson menjelaskan bahwa tingkat kesejahteraan sosial di dalam suatu perekonomian merupakan fungsi dari utilitas seluruh individu yang ada. Apabila fungsi kesejahteraan sosial Bergson-Samuelson berbentuk linier, maka dikenal dengan Benthamite atau Utilitarian Social Welfare Function. Selain itu, Rawlsian Social Welfare Function merupakan salah satu pengembangan Bergson-Samuelson Utility Function, dengan menggunakan kriteria maksimum. Artinya, Rawlsian model lebih terfokus pada pengamatan kelompok masyarakat yang memiliki tingkat utilitas paling rendah.

Kriteria dasar dari Utilitarian adalah bahwa kesejahteraan sosial merupakan jumlah kebahagiaan di dalam masyarakat. Kesejahteraan sosial akan meningkat jika jumlah kebahagiaan dari anggota masyarakat meningkat. Sebagai pecahan dari pemikiran *Bergson-Samuelson*, pengukuran kesejahteraan sosial

kaum Utilitarian lebih strict. Salah satu tokoh utama dibalik pengembangan konsep Utilitarian adalah *Harsanyi (1955)* yang tertarik dengan pemikiran *Jeremy Bentham (1832)*.

Filosofi Utilitarian ialah suatu situasi B akan lebih baik dibanding situasi A untuk seorang individu, jika individu tersebut lebih menyukai B dibanding A. Observasi terhadap situasi tersebut dapat dilakukan dengan mengetahui preferensi dan tingkat kepuasan individu. Oleh karena itu, maka kemudian muncul teori mengenai Revealed Preferences dengan postulat bahwa kepuasan dapat diketahui dari tindakan yang dilakukan pada kondisi yang pasti. Salah satunya dengan menggunakan konsep indirect utility function, di dalam mengukur atau mengagregasi kesejahteraan yang tercipta.

Bagi Utilitarian (telah mendominasi sebagian besar pembahasan ekonomi), preferensi adalah segalanya, dengan asumsi bahwa preferensi adalah tertentu, tidak berubah, dan sama untuk setiap individu (seringkali asumsi ini tidak dituliskan secara formal). Asumsi tersebut menjadi salah satu alasan di dalam penelitian disertasi ini, dimana preferensi diasumsikan given, tidak berubah, dan sama untuk setiap rumah tangga. Acuan terhadap konsep Utilitarian di dalam ilmu ekonomi mulai berkurang, sebagai akibat dari pengaruh *Amartya Sen* mengenai kebebasan individu (*freedom*) terhadap kemungkinan perbedaan preferensi antar individu.

Kesejahteraan sosial akan mencapai kondisi maksimum jika utilitas seluruh individu dalam suatu kelompok sosial masyarakat juga maksimum. Seperti yang sudah diketahui bahwa utilitas seorang individu konsumen akan mencapai kondisi maksimum apabila alokasi konsumsi untuk setiap barang adalah efisien. Dalam fungsi utilitas tidak langsung, diketahui bahwa utilitas dipengaruhi oleh harga dan pendapatan. Pasar persaingan sempurna secara teoritis akan menghasilkan tingkat harga terendah dan produksi terbesar, sehingga harga pasar persaingan sempurna paling tidak dapat mencerminkan alokasi produksi dan konsumsi yang efisien. Artinya bahwa jika mekanisme harga tidak dapat menghasilkan alokasi yang efisien, alokasi produksi dan konsumsi juga tidak akan mencapai alokasi efisien, sehingga konsumsi individu tidak maksimum yang

berakibat pada kesejahteraan sosial dalam suatu kelompok masyarakat tidak maksimum.

Penentuan alokasi sumberdaya yang optimal secara sosial membutuhkan perbandingan tingkat kepuasan antar individu yang beragam dalam suatu komunitas sosial. Diperlukan pengetahuan mengenai perubahan manfaat yang diterima oleh salah satu agen ekonomi yang mempengaruhi tingkat kepuasan agen ekonomi lainnya.

2.4. Pembangunan Ekonomi Daerah

2.4.1. Kesenjangan Antar Daerah

Terdapat satu pertanyaan penting yang sangat sederhana di dalam mempelajari pembangunan ekonomi, yaitu: mengapa satu negara atau daerah dapat menjadi maju dalam hal pembangunan (*well-developed*), sedangkan negara atau daerah lain tidak bisa? (Mookherjee dan Ray, 1999). Dengan kata lain bahwa terdapat kesenjangan/disparitas yang cukup tajam di seluruh dunia. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah negara atau daerah berkembang (*developing countries/regions*) dapat mengejar kemajuan negara maju? Jika tidak, apa alasannya? Sebaliknya, jika bisa, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Apakah kebijakan pemerintah akan memiliki peranan penting dalam proses ini? Apakah pembangunan akan tergantung pada pasar?

Dimulai dari hasil kerja Robert Solow (1956), paradigma yang dominan untuk beberapa dekade terakhir yang dianut oleh tradisi neoklasik ialah bahwa akan terjadi konvergensi antar negara atau wilayah ekonomi. Ide dasarnya ialah bahwa dengan adanya *the law of diminishing returns to inputs*, negara-negara yang belum banyak memanfaatkan sumberdaya modal (miskin), seharusnya akan mencapai *higher rates of return to capital*. Konsekuensinya, dengan asumsi bahwa tingkat tabungan dan pertumbuhan penduduk sama, pendapatan perkapita di negara miskin akan tumbuh lebih cepat, dan standar hidup antar negara menjadi konvergen. Argumen selanjutnya ialah bahwa disparitas antara negara miskin dan kaya selama jangka waktu tertentu, pasti disebabkan oleh faktor lain, misalkan tingkat tabungan dan pertumbuhan penduduk yang tidak sama.

Kenyataannya, hipotesis neoklasik tersebut secara empiris tidak terbukti. Penyebab tidak tercapainya konvergensi pembangunan antar negara ialah adanya *variable fundamental* lainnya yang berbeda. Variabel tersebut dari yang mulai

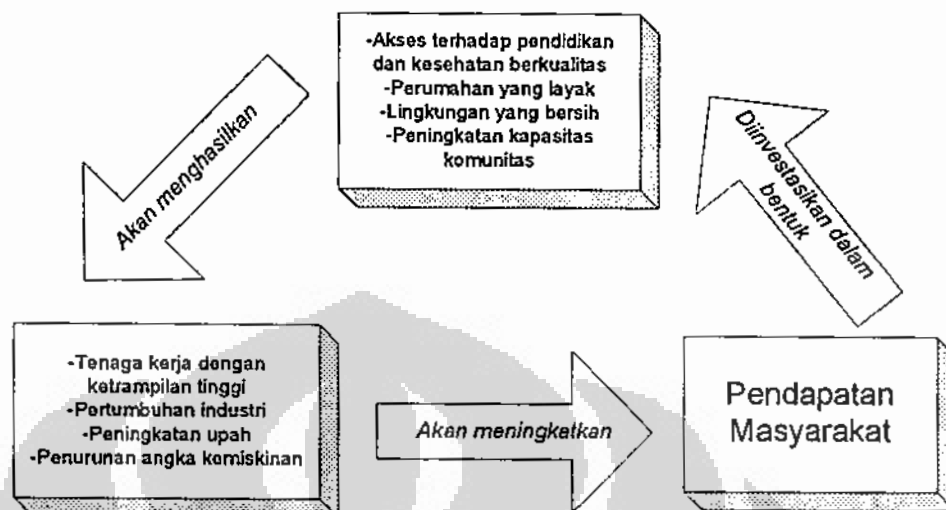
bersifat endogeneous seperti *saving rates* dan *population growth* hingga variable eksogen seperti korupsi, pemerintah yang tidak kompeten, kondisi geografi dan iklim, *attitudes*, kultur, preferensi, dan sebagainya.

Untuk dapat mencapai suatu pembangunan ekonomi yang berhasil, setiap negara atau daerah sebagai suatu entitas ekonomi, harus mampu mengidentifikasi variabel endogen dan eksogen yang akan mempengaruhi kecepatan pembangunan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu perencanaan, pengetahuan terhadap karakteristik masing-masing variabel, dan kemampuan analisis kebijakan publik untuk pembangunan ekonomi, baik dalam konteks nasional maupun daerah.

2.4.2. Ruang Lingkup Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi memiliki definisi yang beragam bagi banyak orang. Bagi beberapa orang, pembangunan ekonomi identik dengan penciptaan berbagai kesempatan kerja yang baru. Bagi pihak lainnya, pembangunan ekonomi dimaknai dengan meningkatnya pendapatan perkapita. Sedangkan beberapa kelompok menganggap pembangunan ekonomi sebagai suatu proses konsumsi sumberdaya yang terbatas, sehingga menyebabkan degradasi lingkungan global. Sebenarnya, pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang dapat menyebabkan peningkatan kapasitas komunitas dan kesejahteraan penduduk secara berkesinambungan.

Dengan definisi ini, pembangunan tidak hanya meningkatkan akses terhadap lapangan pekerjaan, tetapi juga mampu menciptakan akses terhadap lapangan pekerjaan yang baik. Sehingga hal ini akan mendukung peningkatan standar kehidupan bagi seluruh penduduk secara langgeng. Hal lain yang perlu diperhatikan bahwa definisi berkesinambungan (*sustainable*) ialah bahwa pemanfaatan sumberdaya saat ini tidak mengorbankan kualitas hidup jangka panjang. *The Circle of Prosperity* mendeskripsikan hal tersebut.

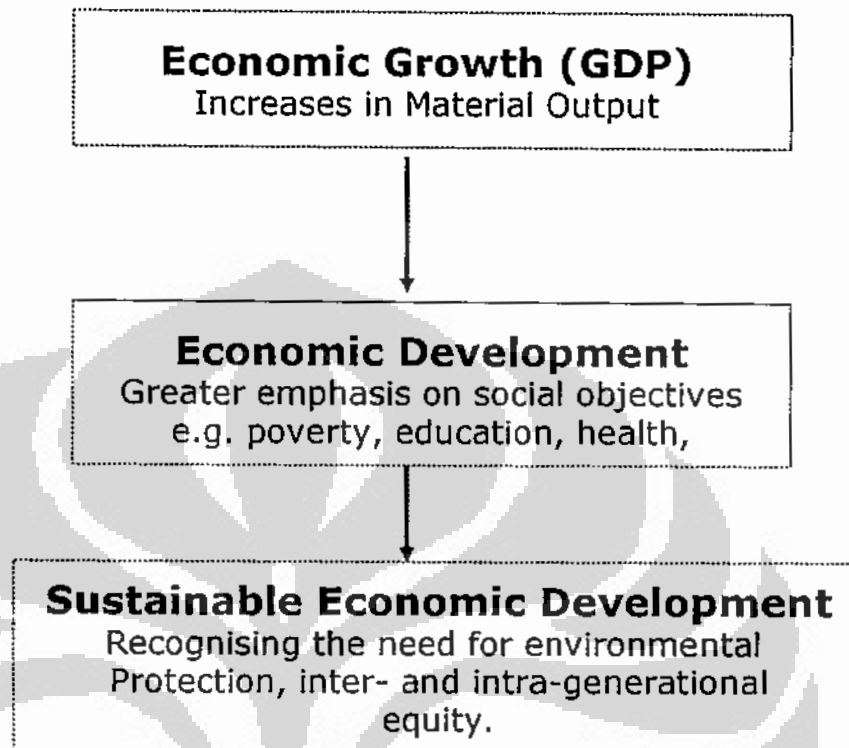


2.4.3. Indikator Keberhasilan Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi dapat dikatakan berhasil jika:

1. Peningkatan kesempatan kerja yang memiliki etika kerja yang baik;
2. Stabilitas harga barang dan jasa sebagai akibat adanya mekanisme pasar yang baik;
3. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tanpa merugikan kesempatan pertumbuhan di masa mendatang;
4. Pencapaian kualitas hidup yang lebih baik (pendidikan, kesehatan);
5. Adanya akses yang baik bagi masyarakat terhadap pusat aktifitas ekonomi (*major market areas*);
6. Peningkatan pemanfaatan teknologi dalam proses produksi;

Pada dasarnya, pembangunan ekonomi memiliki 3 kriteria dasar yang akan dicapai, yaitu mengurangi kemiskinan, mengatasi pengangguran, dan pemerataan pendapatan. Berikut adalah perbedaan antara pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan:



2.4.4. Beberapa Isu dalam Pembangunan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor terpenting yang dapat membantu mengurangi angka kemiskinan dan mendorong pembangunan ekonomi. Tingkat efektifitas pertumbuhan ekonomi tergantung pada struktur pertumbuhan itu sendiri, pemerataan, dan bagaimana keuntungan dari pertumbuhan tersebut dapat terdistribusi ke seluruh penduduk sehingga tidak terdapat ketimpangan antar daerah maupun dalam daerah itu sendiri. Ketidakmerataan pendapatan merupakan fungsi dari distribusi kepemilikan aset/kekayaan (lahan, industri, keuangan, dsbnya), dan *human capital* yang terwujud dalam bentuk pendidikan dan keterampilan.

Pemerintah perlu menciptakan suatu keseimbangan distribusi pendapatan dan kekayaan. Tingkat efektifitas pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan juga tergantung pada besarnya angka pertumbuhan kesempatan kerja yang tercipta, pada wilayah dan sektor di mana sebagian besar orang miskin berada. Keberhasilan beberapa negara Asia (Korea Selatan, Taiwan, dan Malaysia) ialah pada penciptaan kesempatan kerja di sektor

informal (tidak hanya di sektor formal) yang tumbuh sangat cepat mengikuti pertumbuhan ekonomi.

Fenomena dari banyaknya perusahaan besar multinasional yang mengoperasikan perusahaannya di beberapa negara berkembang, membawa dampak bahwa keputusan seorang pembuat kebijakan perusahaan akan mempengaruhi perekonomian negara bersangkutan. Di satu sisi dampak positifnya ialah terbukanya kesempatan kerja yang semakin luas. Namun di sisi lain, jika perusahaan tersebut berpindah tempat ke negara lain, maka akan terjadi peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan. Proses inilah yang disebut dengan globalisasi dan integrasi ekonomi. Kenyataan yang terjadi hingga sekarang yaitu bahwa negara berkembang seringkali menjadi korban dari adanya globalisasi. Oleh karena itu, pemerintah negara berkembang perlu mempersiapkan diri menghadapi globalisasi dengan membangun industri yang memiliki keunggulan komparatif, meningkatkan kemampuan teknologi, dan meningkatkan produktifitas.

Menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*), transparan dan aktif. Pemerintahan yang jujur, bebas dari korupsi, terbuka terhadap publik, dan menindaklanjuti keputusan yang dibuat, merupakan syarat yang diperlukan untuk keberhasilan pembangunan ekonomi. Penyediaan kebutuhan dasar dan kebijakan anggaran. Alokasi sumberdaya publik memiliki dampak yang besar terhadap pembangunan suatu negara. Sebuah kebijakan anggaran yang *fair* dan seimbang dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan, dan membuat pembangunan berpihak pada orang miskin. Contoh negara yang memiliki kebijakan anggaran berpihak pada orang miskin ialah India, Brazil dan Uganda. Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan dan pendidikan, dikombinasikan dengan kebijakan lainnya untuk mendorong pembangunan ekonomi yang berkesinambungan.

Negara-negara seperti Costa Rika, Kuba, Sri Lanka and Vietnam dan India berusaha mengalokasikan anggarannya untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terutama penciptaan kondisi kesehatan yang lebih baik, mengurangi angka kematian dan alokasi sumberdaya yang lebih merata. Vietnam, dengan pendapatan perkapita sebesar 350 USD, berhasil menekan angka kematian bayi dari 60 menjadi 31 per 1000 kelahiran bayi. Mauritius, sebagai sebuah negara kepulauan kecil di Samudera Hindia memotong anggaran militernya dan mengalihkannya ke bidang kesehatan, sehingga saat ini 98% penduduknya dapat

menikmati air bersih dan 97% kelahiran bayi ditangani oleh staf kesehatan yang memiliki keterampilan baik.

Mendorong kesamaan gender (kesamaan hak laki-laki dan perempuan) untuk mengurangi kemiskinan. Sebagian besar kaum miskin absolut adalah wanita. Krisis ekonomi seringkali menjadikan kaum wanita sebagai korban. Hanya sedikit dari mereka yang mendapat pekerjaan layak, dan pada saat tingkat pengangguran tinggi, kaum wanitalah yang pertama kali dipecat dari pekerjaan mereka. Kondisi inilah yang menyebabkan mereka mudah masuk ke dalam golongan miskin. Oleh karena itu dalam program pengentasan kemiskinan, perlu adanya suatu kebijakan yang menyeimbangkan persamaan hak antara kaum wanita dan pria untuk memperoleh pendidikan dan pekerjaan yang layak.

2.5. Penelitian Sebelumnya

Definisi kemiskinan menurut Chambers (1983) adalah suatu kondisi hidup yang ditandai kekurangan gizi, tuna aksara, wabah penyakit, lingkungan kumuh, mortalitas bayi yang tinggi dan harapan hidup yang rendah, definisi ini disebut kemiskinan mutlak. Lebih lanjut Chambers menyatakan kemiskinan suatu keadaan kompleks dan menyangkut banyak faktor yang saling terkait dan menyebabkan orang-orang dalam kategori miskin tetap berada dalam perangkap ketidakberdayaan. Faktor yang saling terkait dan menyebabkan orang-orang dalam kategori miskin tetap berada dalam perangkap ketidakberdayaan. Faktor yang saling terkait tersebut seperti pendapatan rendah, kelemahan fisik, isolasi atau keterasingan, kerawanan dan tidak memiliki kekuatan politik tawar menawar. (kartubi,2003)

Menurut Chambers, unsur-unsur kemelaratan terjalin erat dalam suatu mata rantai, mata rantai itu kadang-kadang disebut juga sebagai perangkap kemiskinan. Dengan pendapatan yang rendah, kelompok miskin ini tidak dapat membeli makanan untuk memenuhi kebutuhan fisik minimumnya. Hal ini berpengaruh terhadap lemahnya kondisi fisik dan mental yang dapat menyebabkan tingkat produktifitas yang rendah menderita dan mudah terserang penyakit. Tubuh yang lemah memperpanjang kerentanan seseorang karena keterbatasan seseorang untuk mengatasi krisis atau keadaan darurat, misalnya dengan bekerja lebih keras, mencari kegiatan baru atau mencari bantuan.

Keterasingan baik karena disebabkan oleh tidak berpendidikan, tempat tinggal yang terpencil atau diluar jangkauan komunikasi maupun karena alasan lain, juga menopang timbulnya suatu kemiskinan. Pelayanan dan bantuan pemerintah tidak samapi menjangkau mereka, karena mereka buta huruf maka informasi yang bernilai ekonomi tidak sampai kepada mereka.

Kemiskinan tidak sekedar mencangkup kemiskinan secara absolute tetapi juga melibatkan persoalan struktural yang telah menyebabkan suatu situasi ketidak berdayaan dan ketergantungan. Karena itu, kemiskinan dapat dilihat dalam konteks absolute atas dasar kecukupan pemenuhan kebutuhan dasar minimum kalori dan dalam konteks relative sebagai kemiskinan relative atas dasar distribusi pendapatan antara penduduk suatu Negara dalam kurun waktu tertentu (poerwanto,1998). Faktor penyebab kemiskinan antara lain;

- (1) kurang keterampilan,
- (2) Produktivitas rendah,
- (3) Rendahnya pendapatan,
- (4) Rendahnya akses terhadap fasilitas social ekonomi,
- (5) Tidak berdaya secara fisik, social,ekonomi dan politik,serta
- (6) Tidak adanya mekanisme social guna mengalokasikan dan mendistribusikan sumberdaya dan surplus ekonomi.

BAB III METODOLOGI

3.1. Tahapan Penelitian

Dalam penelitian ini akan menghitung melalui data yang sudah tersedia (melalui data Primer) untuk mengetahui Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan yang terjadi di Propinsi Lampung (Periode tahun 1995-2005) menggunakan metodologi yang berkaitan dengan studi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

3.2. Konsep Pengukuran Garis Kemiskinan dan indikator

3.2.1. Definisi

Definisi umum, penduduk miskin didefinisikan sebagai mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumsi dasar, termasuk komponen makanan dan bukan makanan. Jadi garis kemiskinan diperoleh dengan menentukan sekelompok pengeluaran (*Consumption bundle*) yang diperkirakan cukup untuk kebutuhan konsumsi dasar dan selanjutnya dengan memperkirakan biaya dari kebutuhan dasar ini. Dengan kata lain, garis kemiskinan dikonseptualisasikan sebagai standar minimum yang diperlukan individu untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan.

Setelah kita hitung konsumsi rumah tangga, kita perlu mengevaluasi apakah jumlah konsumsi tersebut menempatkan rumah tangga dalam kemiskinan, atau sebagai rumah tangga miskin. Batasan yang kita gunakan untuk penentuan ini adalah garis kemiskinan. Garis kemiskinan menentukan tingkat konsumsi (pendapatan) yang diperlukan bagi sebuah rumah tangga untuk keluar dari kemiskinan. Tampak bahwa sebuah garis kemiskinan dapat diartikan sebagai "Garis pembatas" yang membedakan tingkat kesejahteraan. Dengan mengangkat dari bawah keatas garis kemiskinan, rumah tangga (individu) bergerak dari kondisi yang menyedihkan kepada kondisi kesejahteraan minimum yang seharusnya dicapai rumah tangga (Individu)

Secara lebih formal, garis kemiskinan bagi suatu rumah tangga dapat didefinisikan sebagai pengeluaran/konsumsi (atau pendapatan atau ukuran lain) minimum yang diperlukan untuk mencapai paling tidak tingkat utilitas minimum.

No.	Ukuran kemiskinan	Indikator
1.	Presentase Penduduk Miskin	Presentase Penduduk miskin (P_0)
2.	Tingkat kedalaman kemiskinan	Indeks kedalaman kemiskinan (P_1)
3.	Tingkat keparahan Kemiskinan	Indeks keparahan kemiskinan (P_2)

Adapun definisi dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

- a. *Presentase penduduk miskin (P_0) / Poverty Headcount Index* adalah jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan dalam presentase terhadap populasi.
- b. *Indeks kedalaman kemiskinan (P_1) / Poverty Gap Index* adalah ukuran rata-rata kesenjangan (jarak) pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas miskin (garis kemiskinan).
- c. *Indeks keparahan kemiskinan (P_2) / Poverty Severity index* adalah penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks berarti pengeluaran diantara penduduk miskin semakin menyebar dari pusat rata-ratanya.

3.3. Metode Penyelesaian

3.3.1. Analisis Deskriptif

Proses analisis deskriptif pada dasarnya meliputi proses penelusuran dan pengungkapan informasi relevan yang terkandung di dalam data, yang hasilnya disajikan dalam bentuk ringkas dan sederhana. Pada akhirnya analisis akan mengarah pada keperluannya. Statistika deskriptif merupakan upaya penyederhanaan data kedalam bentuk diagram, tabel, dan grafik atau ringkasan data dengan tujuan untuk mempermudah pengambilan dan informasi atau deskripsi yang ada dalam data.

3.3.2. Ukuran Kemiskinan

Ada banyak ukuran kemiskinan yang biasanya digunakan diantaranya Indeks Foster-Greer-Thorbecke (*Headcount Index*, *Poverty Gap Index* dan *Poverty Severity Index*)

a. Indeks Foster-Greer-Thorbecke (FGT)

Indeks FGT mempunyai rumus umum sebagai berikut :

$$P_{\alpha} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^Q \left(\frac{Z - Y_i}{Z} \right)^{\alpha}$$

Dimana:

$I = 1, 2, \dots,$

Q = Banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (individu miskin)

N = Jumlah penduduk

Z = adalah Garis Kemiskinan,

Y_i = Rata - rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (income dari i) dan

$\alpha = 0, 1,$ atau 2 dengan definisi sebagai berikut :

Jika α sama dengan 0, ini disebut sebagai Indeks Angka Kemiskinan (*poverty headcount index*, P_0). Indeks ini adalah angka jumlah penduduk yang memiliki tingkat konsumsi dibawah garis kemiskinan. Terkadang indeks ini juga disebut sebagai angka insiden kemiskinan (*poverty incidence*) yang merupakan ukuran kemiskinan yang paling populer. Keuntungan yang besar dari *headcount index* adalah mudah dihitung dan dipahami. Namun ukuran ini tidak dapat membedakan diantara sub-kelompok penduduk miskin dan tidak menunjukkan jangkauan tingkat kemiskinan. Ukuran ini tak berubah meskipun seorang penduduk miskin menjadi lebih miskin atau menjadi lebih sejahtera, selama orang tersebut berada dibawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, untuk

mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kemiskinan, indeks ini penting dengan dilengkapi dua ukuran kemiskinan lainnya dari Indeks FGT. (*World Bank : 2006 : 31*).

Jika α sama dengan 1, ini disebut sebagai juga sebagai *poverty gap index* atau Indeks kesenjangan kemiskinan (P1) merupakan rata – rata gap antara standar hidup orang miskin dan garis kemiskinan yang dihitung terhadap seluruh penduduk, yang dinyatakan dalam rasio terhadap garis kemiskinan. Nilai agregat dari *poverty gap index* menunjukkan biaya pengentasan kemiskinan dengan membuat target transfer yang sempurna terhadap penduduk miskin (yakni menghilangkan seluruh gap kemiskinan atau $Z - Y_i = 0$), dalam hal tidak adanya biaya transaksi (operasional) dan faktor penghambat. Hal ini tentunya tidak realistis tetapi ukuran tersebut sungguh memberikan informasi yang berguna mengenai skala minimum dari sumber keuangan yang diperlukan untuk menangani masalah kemiskinan.

b. Analisis Indeks kedalaman kemiskinan (Poverty Gap Index)

Ukuran kemiskinan yang cukup Populer adalah indeks jurang kemiskinan (Poverty Gap Indeks), yang menghitung seberapa jauh individu jatuh dibawah garis kemiskinan (jika mereka termasuk kategori miskin) dan menyatakan indeks tersebut sebagai suatu presentase terhadap garis kemiskinan. Secara lebih spesifik, mendefinisikan jurang kemiskinan (Poverty Gap) sebagai garis kemiskinan dikurangi pendapatan/pengeluaran sebenarnya y_i dari individu/penduduk miskin; jurang(gap) bernilai 0 untuk mereka yang tidak miskin, dengan menggunakan fungsi Indeks:

$$G_n = (z - y_i) \cdot I(y_i < z)$$

Jika α sama dengan 1, ini disebut sebagai juga sebagai *poverty gap index* atau Indeks kesenjangan kemiskinan (P1) merupakan rata – rata gap antara standar hidup orang miskin dan garis kemiskinan yang dihitung terhadap seluruh penduduk, yang dinyatakan dalam rasio terhadap garis kemiskinan. Nilai agregat

dari *poverty gap index* menunjukkan biaya pengentasan kemiskinan dengan membuat target transfer yang sempurna terhadap penduduk miskin (yakni menghilangkan seluruh gap kemiskinan atau $Z - Y_i = 0$), dalam hal tidak adanya biaya transaksi (operasional) dan faktor penghambat. Hal ini tentunya tidak realistis tetapi ukuran tersebut sungguh memberikan informasi yang berguna mengenai skala minimum dari sumber keuangan yang diperlukan untuk menangani masalah kemiskinan.

Poverty gap index pada dasarnya dapat menunjukkan arti/nilai menggunakan informasi survei untuk mempelajari karakteristik penduduk miskin. Cara pengentasan kemiskinan yang mahal adalah dengan melakukan transfer pada seluruh penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan tanpa target sasaran. Indeks ini memberikan nilai rasio dari biaya pengentasan kemiskinan berdasarkan transfer dengan target sasaran sempurna dibandingkan dengan yang berdasarkan transfer yang sepenuhnya tanpa target sasaran. Sehingga semakin kecil nilai indeks ini maka semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program (BPS : 2002 : 71).

Poverty gap index adalah rata-rata gap antara standar hidup orang miskin dan garis kemiskinan yang dihitung terhadap seluruh penduduk, yang dinyatakan sebagai rasio terhadap garis kemiskinan. Nilai agregat dari Poverty Gap Index menunjukkan biaya mengentaskan kemiskinan dengan membuat target transfer yang sempurna terhadap penduduk miskin (yakni menghilangkan seluruh gap kemiskinan atau membuat nilai $G_n = 0$), dalam hal tidak adanya transaksi (operasional) dan faktor penghambat. Hal ini tentunya tidak realistis tetapi ukuran tersebut sungguh memberikan informasi yang berguna mengenai skala minimum dari sumber keuangan yang diperlukan untuk menangani masalah kemiskinan.

Lebih lanjut, Poverty gap index juga dapat menunjukkan arti/nilai menggunakan informasi survei untuk mempelajari karakteristik penduduk miskin. Cara pengentasan kemiskinan yang mahal adalah dengan melakukan transfer pada seluruh penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan tanpa target sasaran. Poverty gap index memberikan nilai rasio dari biaya pengentasan

kemiskinan berdasarkan transfer yang sepenuhnya tanpa target sasaran. Jadi semakin kecil nilai Poverty gap index, semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program.

c. Analisis Indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index/squared Poverty Gap Index*)

Untuk memecahkan masalah ketimpangan pendapatan/pengeluaran diantara penduduk miskin, beberapa peneliti menggunakan ukuran *Squared Poverty Gap Index*. Ukuran ini secara sederhana merupakan jumlah dari poverty gap tertimbang (sebagai proporsi garis kemiskinan) dimana penimbangannya adalah sebanding dengan poverty gap itu sendiri.

Dan jika α sama dengan 2, ini menunjukkan indeks keparahan kemiskinan (*poverty severity index, P2*). Ukuran kemiskinan ini memberi bobot yang lebih besar bagi penduduk yang sangat miskin dengan mengkuadratkan jarak garis kemiskinan. Angka tersebut kemudian dihitung dengan mengkuadratkan penurunan relatif konsumsi per kapita terhadap garis kemiskinan dan nilai tersebut dirata-ratakan dengan seluruh penduduk, sambil memberikan nilai nol (0) bagi penduduk yang berada diatas garis kemiskinan. Ketika bantuan dialihkan dari orang miskin ke orang lain yang lebih miskin, angka ini akan menurunkan angka kemiskinan secara keseluruhan (*The World Bank : 2006 : 31*).

3.4 Konsep Pengukuran Ketimpangan Pendapatan

Menjelaskan lebih dalam berbagai pengukuran ketimpangan pendapatan dan apa manfaat dari mengukur ketimpangan pendapatan. Ketimpangan didefinisikan sebagai sebuah konsep yang lebih luas dalam arti bahwa ketimpangan didefinisikan terhadap seluruh populasi dan tidak hanya pada penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan. Sebagian besar ukuran ketimpangan tidak tergantung pada rata-rata dari distribusi dimana ukuran ketimpangan dapat dihitung untuk setiap distribusi, tidak hanya konsumsi,

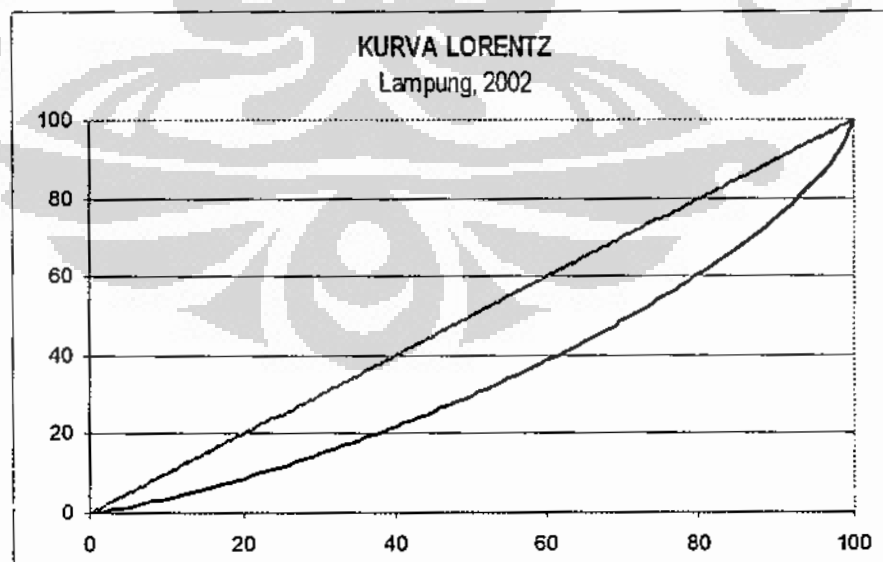
pendapatan atau variabel moneter lainnya, tetapi juga bisa untuk tanah dan variabel lain.

3.4.1. Ukuran ketimpangan

a. Indeks Gini dan Kurva Lorenz

Ukuran ketimpangan tunggal yang paling luas digunakan adalah koefisien Gini. Koefisien Gini di dasarkan pada kurva Lorenz, sebuah kurva frekuensi kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variable tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili pemerataan. Untuk membentuk koefisien Gini. Gambar dibawah ini merupakan grafik presentase kumulatif rumah tangga (dari termiskin hingga terkaya) pada sumbu horizontal, dan presentase kumulatif pengeluaran (Pendapatan) pada sumbu vertikal. Pada garis diagonal menggambarkan pemerataan sempurna. Koefisien Gini didefinisikan sebagai $A/(A+B)$, dimana A dan B seperti yang ditunjukkan grafik. Jika $A=0$ koefisien gini bernilai 0 yang berarti pemeratan sempurna, sedangkan jika $B = 0$ koefisien gini akan bernilai 1 yang berarti ketimpangan sempurna.

Gambar 3.1.



Koefisien gini memenuhi beberapa kriteria bagi sebuah ukuran ketimpangan yang baik, antara lain:

- **Tidak tergantung pada nilai rata-rata** (*mean independence*). Ini berarti bahwa jika semua pendapatan bertambah dua kali lipat, ukuran ketimpangan tidak akan berubah,
- **Tidak tergantung pada jumlah Penduduk** (*population size independence*), jika penduduk berubah, ukuran ketimpangan seharusnya tidak berubah, jika kondisi lain tetap (*Ceteris paribus*),
- **Simetris**. Jika si A dan si B bertukar tempat tingkat pendapatannya, seharusnya tidak ada perubahan dalam ukuran ketimpangan.
- **Sensitivitas Transfer Pigou – dalton**. Dalam kriteria ini, transfer pendapatan dari si kaya dan si miskin akan menurunkan ketimpangan.

Namun indeks gini juga memiliki kekurangan dari syarat ukuran ketimpangan yang baik, antara lain :

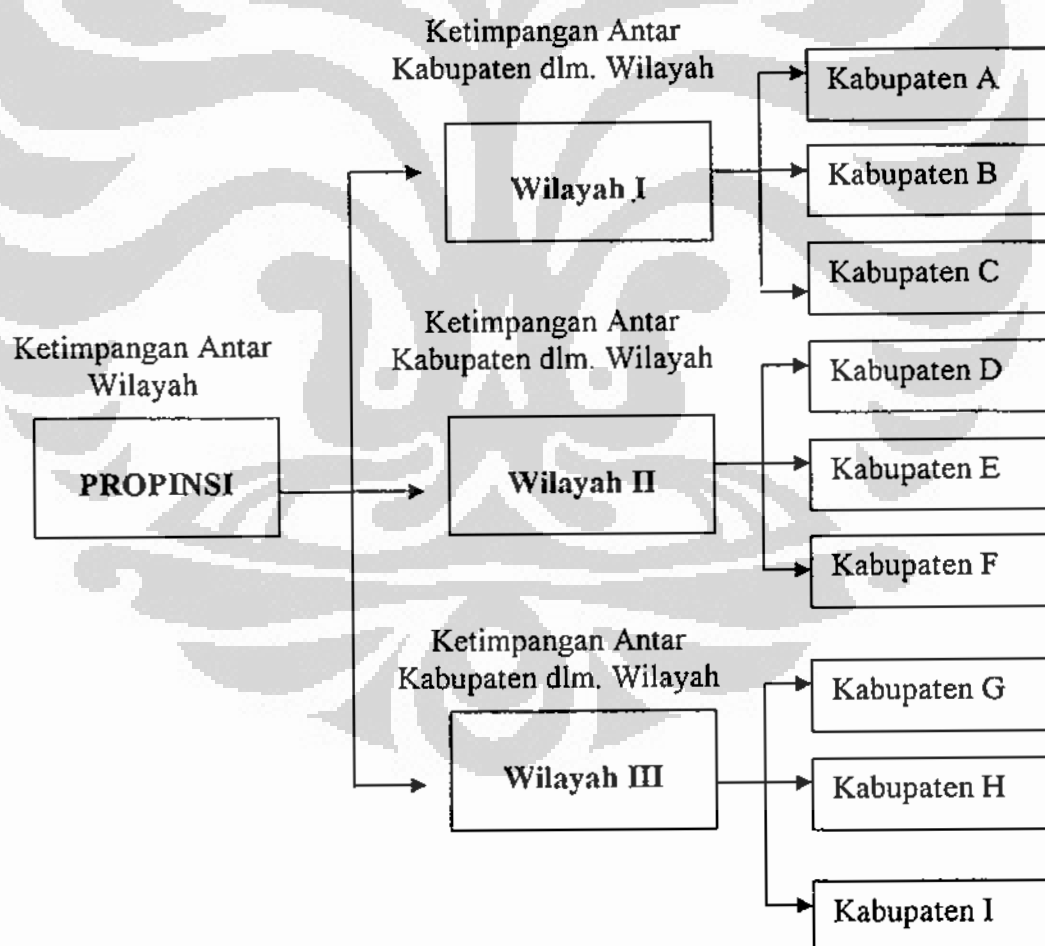
- **Tidak dapat didekomposisi**, ketimpangan dapat di pecah menurut kelompok penduduk/sumber pendapatan dalam dimensi lain. Indeks gini bersifat aditif antar kelompok, yaitu nilai total koefisien gini dari suatu masyarakat tidak sama dengan jumlah nilai Indeks Gini dari sub-kelompok masyarakat.
- **Tidak dapat diuji secara statistik**, seseorang harus dapat menguji signifikansi perubahan indeks antar waktu. Hal ini sebelumnya menjadi masalah , tetapi dengan tehnik bootstrap interval (selang) kepercayaan, umumnya dapat dibentuk.

b. Indeks Theil

Kelemahan pengukuran ketimpangan pendapatan yang berdasarkan pada Indeks gini dapat menggunakan Indeks Theil (one stage nested Theil inequality decomposition) dimana tingkat penghitungan yang lebih spesifik yaitu untuk mengetahui ketimpangan pendapatan regional (antar wilayah dan antar kabupaten dalam suatu wilayah)

Index Theil merupakan alat analisis untuk mengetahui disparitas antar daerah, dengan melakukan dekomposisi sumber-sumber disparitas, yaitu menjadi disparitas antar wilayah (between region) dan dalam wilayah (within region). Komponen antar wilayah (between region) adalah rata-rata tertimbang dari ketimpangan pendapatan antar wilayah dalam propinsi, sedangkan komponen dalam wilayah (within region) merupakan rata-rata tertimbang dari ketimpangan pendapatan antar kabupaten dalam wilayah tertentu.

Perlu dicatat bahwa dalam melihat ketimpangan pendapatan dengan menggunakan index Theil mampu memberikan gambaran kondisi ketimpangan yang ada, namun demikian tidak mampu memecahkan permasalahan interinsik yang ada dalam ketimpangan pendapatan regional (Akita, 2001).



Gambar 3.1. Hirarki Pembagian Wilayah dalam Index Theil Satu Tingkat.

Index Theil di formulasikan sebagai berikut :

$$T_p = \sum_i \sum_j \left(\frac{Y_{ij}}{Y} \right) \log \left(\frac{Y_{ij}/Y}{n_{ij}/n} \right)$$

jika kita mendefinisikan T_i sebagai ukuran ketimpangan antar kabupaten dalam wilayah i , maka :

$$T_i = \sum_j \left(\frac{Y_{ij}}{Y_i} \right) \log \left(\frac{Y_{ij}/Y_i}{n_{ij}/n_i} \right)$$

sehingga dekomposisi ketimpangan pendapatan dalam suatu propinsi dapat dituliskan sebagai :

$$T = \sum_i \left(\frac{Y_i}{Y} \right) T_i + \sum_i \left(\frac{Y_i}{Y} \right) \log \left(\frac{Y_i/Y}{n_i/n} \right) = T_w + T_B$$

dimana:

T = Index Theil T

T_w = Ketimpangan dalam wilayah.

T_B = Ketimpangan antar wilayah

Y_i = Jumlah Pendapatan Kabupaten/kota dalam satu Region (SWP)

Y_{ij} = Pendapatan Kabupaten/kota j dalam region i

Y = Jumlah Pendapatan Propinsi

n = Penduduk Propinsi

n_i = Jumlah Penduduk dalam satu region.

Karena dengan pelaksanaan otonomi daerah pembagian wilayah administratif diubah dengan menekankan otonomi pada tingkat kabupaten dan tidak ada hirarki pembagian wilayah yang secara resmi dan baku di tingkat provinsi, maka pembagian wilayah yang digunakan dalam analisa ini mengacu pada pembagian wilayah berdasarkan Kabupaten/Kota, sehingga Propinsi Lampung di bagi menjadi 11 (sebelas) Kabupaten/kota sebagai berikut:

1. Kota Bandar Lampung.
2. Kota Metro
3. Kabupaten Lampung Selatan

4. Kabupaten Lampung Tengah
5. Kabupaten Lampung Timur
6. Kabupaten Lampung Barat
7. Kabupaten Lampung Utara
8. Kabupaten Tanggamus
9. Kabupaten Waykanan
10. Kabupaten Tulang Bawang
11. Kabupaten Pesawaran (*Kabupaten pemekaran dari Tanggamus*)

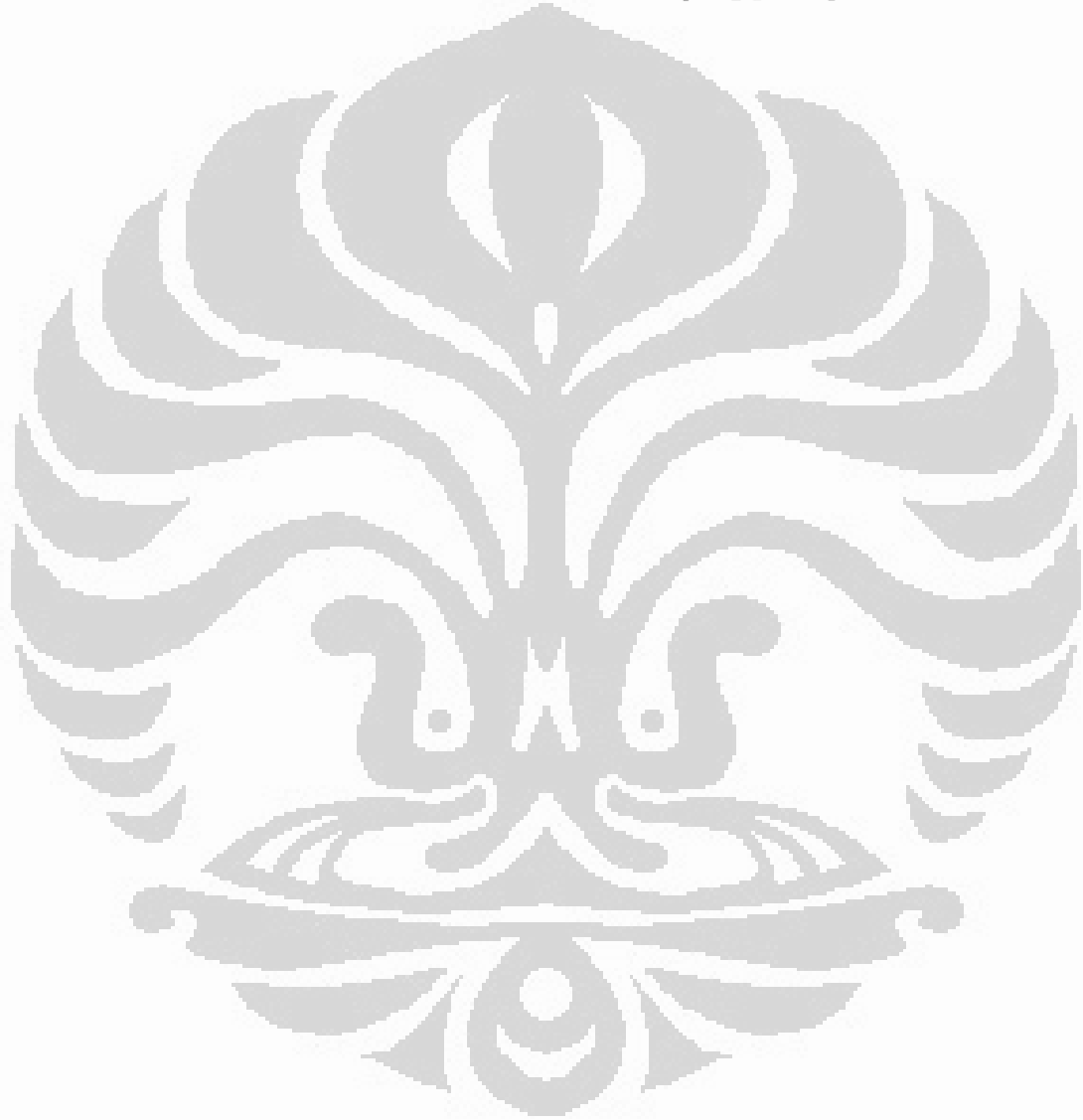
Adapun pendapatan rata-rata nasional gagal untuk menjelaskan penyebaran pendapatan individu secara nasional maupun penyebaran pendapatan dalam suatu wilayah (Metwalli dan Jensen dalam Akita, 2003). Sangat mungkin dispersi pendapatan dalam suatu daerah mengecil, namun demikian penyebaran pendapatan aktual justru menunjukkan trend yang sebaliknya. Index Theil mencoba mengatasi kelemahan tersebut, dengan mendekomposisi sumber-sumber ketimpangan menjadi ketimpangan dalam suatu wilayah (*within region*) dan ketimpangan antar wilayah (*between region*).

Index Theil ini dapat digunakan untuk hirarki daerah tiga tingkat (*two stage nested Theil decomposition method*) maupun hirarki daerah dua tingkat (*one stage nested theil decomposition method*). Bebarapa kelebihan dari index Theil ini adalah :

- dapat melakukan dekomposisi, sehingga pengaruh di dalam dan antar group dapat diketahui.
- memenuhi beberapa sifat sebagai ukuran ketidakmerataan dalam kesejahteraan,

misalnya : *mean independence*, yang mengakibatkan index tidak berubah bila setiap pendapatan suatu wilayah berubah dengan proporsi yang sama, *population size independence*, index tidak berubah bila jumlah penduduk dalam suatu wilayah berubah dengan proporsi yang sama. Index ini juga memenuhi *prinsip transfer Pigou Dalton*, dimana setiap transfer pendapatan dari wilayah yang kaya terhadap wilayah yang miskin tidak mengakibatkan berbaliknya ranking pendapatan relative, sehingga dapat mengurangi nilai index.

Terdapat dua jenis index Theil, yaitu Teil T yang dibobot pendapatan proporsi pendapatan dan Theil L yang dibobot proporsi penduduk. Index Theil ini merupakan penjumlahan dari komponen dalam group (T_w dan L_w) dan antar group (T_B dan L_B). Apabila index theil semakin mendekati 0, maka semakin kecil ketimpangan pendapatan antar wilayah, demikian pula sebaliknya apabila semakin mendekati 1, maka akan semakin timpang pendapatan antar wilayah.



BAB IV

GAMBARAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

4.1. Geografis dan Administrasi

Provinsi Lampung memiliki letak yang sangat strategis karena menjadi pintu masuk aliran barang dan orang dari Pulau Jawa ke Sumatera. Sebagai *transshipment point* (tempat berpindahnya barang atau orang dari satu moda transportasi ke moda transportasi lainnya), Provinsi Lampung memiliki potensi besar untuk berkembang dan menjadi salah satu pusat pertumbuhan di Sumatera. Dengan posisi strategisnya sebagai gerbang Sumatera, maka Lampung tumbuh menjadi provinsi terpadat di luar Jawa dan Bali serta berfungsi sebagai wilayah penyangga Pulau Jawa di bagian Barat. Kondisi ini tentunya membawa konsekuensi terhadap tantangan pembangunan yang menjadi semakin berat akibat kuatnya tekanan jumlah penduduk yang semakin tidak seimbang dengan daya dukung lingkungan dan lahan yang tersedia.

Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung sebelumnya berjumlah 10 (sepuluh) dan pada akhir tahun lalu mengalami pemekaraan hingga pada saat ini jumlah keseluruhan kabupaten berjumlah 11 (sebelas). Dari 11 kabupaten/kota yang ada memiliki potensi sumberdaya yang sangat beragam, sehingga sangat mempengaruhi pilihan kebijakan dan prioritas yang diambil oleh masing-masing daerah. Konsekuensinya sangat berpengaruh terhadap variasi kemajuan masing-masing daerah.

Terdapat sekitar 130 buah pulau-pulau besar dan kecil, di antaranya terdapat di Kabupaten Lampung Selatan dengan pulau-pulau terbesar, yaitu di Pulau Sebesi (2.472 Ha), Pulau Legundi (1.820 Ha), Pulau Sebuku (1.771 Ha), Pulau Rakata (1.343 ha), dan Pulau Sertung dan gugusan kepulauan Krakatau (1.057 Ha), serta Pulau Pahawang (696 Ha). Di Kabupaten Lampung Barat terdapat dua buah pulau yaitu Pulau Pisang (142 Ha) dan Pulau Butuah (63 Ha). Di Kabupaten Tanggamus terdapat 10 pulau dan yang terbesar adalah Pulau Tabuan (19.374 Ha), serta di Kota Bandar Lampung sebanyak 1 (satu) buah pulau yaitu Pulau Pasaran (6 Ha).

Provinsi Lampung memiliki luas wilayah sekitar 3.528.835 Ha. Sekitar 7,70% dari luas yang ada digunakan sebagai wilayah pemukiman, kemudian sawah seluas 364.237 Ha atau 10,32 %, tegalan/ladang seluas 868.256 Ha atau 24,60 %, dan penggunaan lainnya seluas 1.938.099 Ha atau 54,92 %. Berdasarkan topografi wilayah, Provinsi Lampung terbagi dalam 5 (lima) satuan ruang, yaitu: (a) daerah topografi berbukit sampai bergunung; (b) berombak sampai bergelombang; (c) dataran *alluvial*; (d) dataran rawa pasang surut; (e) daerah aliran sungai (*river basin*).

Daerah topografi berbukit sampai bergunung terdiri atas lereng-lereng yang curam atau terjal dengan kemiringan berkisar 25% dan ketinggian rata-rata 300 m di atas permukaan laut (d.p.l). Daerah ini meliputi Bukit Barisan dengan puncak tonjolannya berada di Gunung Tanggamus (2.102 m), Gunung Salak (1.570 m), Gunung Pematang Halupan (1.646 m) di Selatan bagian Barat, Gunung Pesagi (2.239 m), Gunung Pugung (1.964 m), Gunung Sebabayan (1.774 m), Gunung Subhanallah (1.623 m) di bagian Barat, Gunung Ratay (1.682 m), dan Gunung Rajabasa (1.281 m) di bagian Selatan, Gunung Punggur (1.877 m), Gunung Haji (1.710 m), dan Gunung Ulu Sabuk (1.713 m) di Lampung Utara, serta Gunung Balau (1.653 m) di Bandar Lampung. Daerah-daerah tersebut sebagian besar masih ditutupi oleh vegetasi hutan primer dan sekunder, tetapi beberapa bagian tertentu sudah terbuka menjadi perladangan atau perkebunan kopi rakyat.

Daerah topografi berombak sampai bergelombang memiliki ciri-ciri khusus, terdiri atas bukit-bukit sempit dengan kemiringan antara 8-15% dan ketinggian antara 300-500 m d.p.l. Daerah ini membatasi daerah pegunungan dengan dataran *alluvial* dengan vegetasi tanaman perkebunan seperti kopi, lada, kakao, kelapa, karet, perkebunan buah-buahan campuran, dan tanaman perladangan seperti padi, jagung, dan sayur-sayuran. Daerah topografi ini berada di sekitar wilayah Kecamatan Gedong Tataan, Sukoharjo, dan Pulau Panggung di wilayah Kabupaten Lampung Selatan dan Tanggamus, serta wilayah Kecamatan Kalirejo dan Bangunrejo di Kabupaten Lampung Tengah.

Daerah dataran *alluvial* merupakan daerah yang sangat luas meliputi sebagian besar wilayah Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur,

sebagian Lampung Utara, Way Kanan serta Tulang Bawang, sampai mendekati sebelah Timur, yang merupakan bagian hilir (*down stream*) dari sungai-sungai besar seperti Way Sekampung, Way Seputih, Way Tulang Bawang, dan Way Mesuji. Ketinggian rata-rata daerah ini berkisar antara 25-75 m dengan kemiringan 0-3%. Pada bagian pantai sebelah Barat terdapat pula dataran alluvial yang menyempit dan memanjang mengikuti arah Bukit Barisan.

Daerah dataran rawa pasang surut terletak di sepanjang Pantai Timur dengan ketinggian 0,5-1,0 m, yang pengendapan airnya menurut perubahan pasang surut air laut. Daerah ini terletak di sebagian Lampung Timur bagian Timur dan Lampung Selatan Bagian Timur yang dikenal dengan daerah Rawa Sragi, dengan luas areal mencapai 30.000 Ha. Sebagian lagi terletak di daerah Mesuji dengan luas areal mencapai 40.000 Ha dan dikenal sebagai daerah pemukiman transmigrasi Mesuji-Tulang Bawang. Sebagian digunakan untuk tanaman padi, jagung, dan tanaman semusim lainnya, sedang sebagian besar di wilayah pesisir sudah berubah menjadi areal tambak rakyat, untuk budidaya udang dan ikan bandeng.

Luas kawasan hutan di Provinsi Lampung menurut SK. Menhutbun No. 256/KPTS/II/2000 dan Perda Nomor 5/2001 tentang Penataan Ruang Wilayah Provinsi Lampung tercatat seluas 1.004.735 Ha (BPS, 2003) atau 30,43 % dari total luas wilayah Lampung. Luas areal kawasan hutan ini terdiri atas: Hutan Lindung seluas 317.615 Ha (31,6 %), Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata seluas 462.030 Ha (46 %), Hutan Produksi Terbatas seluas 33.358 Ha (3,32 %) dan Hutan Produksi Tetap seluas 191.732 Ha (19 %).

Di Daerah Lampung, tidak terdapat lagi HPH karena tidak ada lagi hutan yang dapat diusahakan, yang ada adalah Hutan Tanaman Industri (HTI) yang dikelola oleh Inhutani V seluas 175.647 Ha. Hampir sebagian besar wilayah kawasan hutan tersebut sudah terbuka menjadi areal budidaya terutama untuk perkebunan kopi. Sejalan dengan perkembangan waktu dan bertambahnya jumlah penduduk, maka kawasan hutan yang masih tersisa juga mengalami "alih fungsi" untuk berbagai kepentingan.

Dengan kondisi ini, diperkirakan areal hutan efektif sesuai fungsinya masih tersisa 50-60 %. Berdasarkan hasil citra *landsat* tahun 2000, kawasan Hutan Lindung telah mengalami kerusakan 80%, Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata 43 %, Hutan Produksi 76,74 %, dan Hutan Produksi Terbatas 76,34 %.

4.2. Kependudukan

Berdasarkan hasil sensus tahun 1971, penduduk Lampung berjumlah 2.764.344 jiwa, sensus tahun 1980 sebanyak 4.624.239 jiwa, sensus tahun 1990 sebanyak 6.015.803 jiwa, atau dengan pertumbuhan di atas 5 % per tahun. Penurunan tren pertumbuhan terjadi dalam kurun waktu 1990-2000, karena berdasarkan sensus tahun 2000, penduduk Lampung tercatat 6.659.869 jiwa. Sejak tahun 2000, pertumbuhan penduduk Lampung cenderung datar dengan pertumbuhan rata-rata 0,9-1 %. Pada tahun 2007 jumlah penduduk Lampung mencapai 7.231.878 jiwa, seperti tersaji pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Rekapitulasi Jumlah Kecamatan, Desa/Kampung/Pekon, Kelurahan, Luas Wilayah, dan Jumlah Penduduk Provinsi Lampung Tahun 2007

N o.	Kabupaten/Kota	Kode Wil.	Kec. (bh)	Kel. (bh)	Desa (bh)	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Lampung Selatan	18.01	20	3	374	318.078	1.183.986
2	Lampung Tengah	18.02	27	10	277	478.982	1.085.151
3	Lampung Utara	18.03	23	15	216	272.563	582.357
4	Lampung Barat	18.04	17	6	179	495.040	410.892
6	Tulang Bawang	18.05	28	6	235	777.084	856.624
5	Tanggarnus	18.06	28	8	371	335.661	896.243
7	Lampung Timur	18.07	24	5	241	433.789	937.380
8	Way Kanan	18.08	14	3	207	392.163	372.756
9	Bandar Lampung	18.71	13	98	-	19.296	753.972
10	Metro	18.72	5	22	-	6.179	152.817
Jumlah Total =			199	176	2.100	3.528.835	7.231.878

Sumber : Biro Tapem, Juli 2007

Proporsi penduduk diperkirakan 32,25% merupakan etnis Lampung asli dan 67,75% merupakan warga Lampung pendatang. Mayoritas pendatang berasal dari Pulau Jawa, Sumatera Selatan dan daerah lainnya di Pulau Sumatera serta sebagian kecil berasal dari daerah lain di Nusantara.

Jumlah angkatan kerja tercatat mencapai 4.488.878 jiwa atau sekitar 64,28% dari total penduduk. Sebagian besar angkatan kerja bekerja di sektor pertanian, dimana 63,12% berpendidikan sekolah dasar ke bawah dan merupakan tenaga kerja tidak terampil. Jumlah pengangguran dari tahun 2005 sampai tahun 2006 menunjukkan jumlah yang meningkat. Pada tahun 2005 tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 8,5%; sedangkan tahun 2006 mencapai 9,13%.

Penduduk Propinsi Lampung pada tahun 1990 berjumlah 6,0 juta jiwa dan tahun 2001 jumlahnya hampir mencapai 7 juta jiwa. Dengan potensi jumlah penduduk yang cukup besar berarti propinsi Lampung mempunyai sumber daya manusia yang besar terutama untuk potensi tenaga kerja.

Keberhasilan pembangunan di bidang kependudukan membawa dampak kepada perubahan komposisi penduduk menurut umur, yaitu dengan semakin kecilnya proporsi penduduk tidak produktif (berumur muda dan lanjut usia) yang berarti angka beban tanggungan akan semakin kecil. Hal ini dapat dilihat dari turunnya angka beban tanggungan, yaitu pada tahun 1998 tercatat sebesar 63,9 turun menjadi 57,5 pada tahun 2001. Dengan demikian dampak kualitas sumber daya manusia semakin meningkat. Secara rata-rata tanggungan setiap 100 penduduk produktif berkurang dari 64 menjadi 58 penduduk tidak produktif.

4.3. Sosial Budaya

Indikator utama yang dapat merefleksikan kualitas manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)* yang terdiri atas 3 variabel yaitu: Indeks Kelangsungan Hidup, Indeks Pengetahuan, dan Indeks Daya Beli. Angka IPM Provinsi Lampung pada tahun 2002 sebesar 65,8; berarti status pembangunan manusia di Provinsi Lampung termasuk dalam kategori bawah.

Salah satu variabel yang menyebabkan kategori bawah dari data IPM tersebut adalah masih rendahnya daya beli di Provinsi Lampung sebesar 51,60 yang merupakan efek dari krisis moneter lalu yang berkepanjangan dan kenaikan harga-harga barang (inflasi) antara periode tahun 1999-2000.

Indeks Kelangsungan Hidup dan Indeks Pengetahuan pada tahun 2002 cukup tinggi, yaitu 68,50 dan 77,30. Hal ini berarti bahwa tingkat kesehatan di Provinsi Lampung sudah cukup berhasil untuk penduduk mencapai "usia hidup" yang panjang dan sehat, dan begitu pula untuk mendapatkan pengetahuan yang merupakan bagian dari variabel angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah.

Pada tahun 2003 IPM Provinsi Lampung menjadi 66,00. Nilai ini diperoleh dari variabel Indeks Kelangsungan Hidup 68,70; Indeks Pengetahuan 77,10; dan Indeks Daya Beli 52,30 (BPS, 2003). Hal ini berarti bahwa pada tahun 2003 Provinsi Lampung memasuki *kategori menengah bawah*. Pada tahun 2004 nilai IPM Provinsi Lampung mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu mencapai 68,4; dan pada tahun 2005 kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 68,8. Pada tahun 2006 nilai IPM meningkat secara signifikan menjadi 70,1 sehingga Lampung termasuk kategori menengah atas.

4.4. Perekonomian

Pada tahun 2005, nilai PDRB Provinsi Lampung berdasarkan harga konstan tahun 2000 mencapai Rp.29,32 triliun dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 3,76%. Sedangkan pada tahun 2006, mencapai Rp.30,66 triliun dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,76%. Lapangan usaha yang paling dominan adalah sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 42,35%, disusul oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran (15,79%) dan sektor industri pengolahan (13,32%).

Indikator pendapatan masyarakat per kapita atas dasar harga konstan 2000, pada tahun 2006 mencapai Rp 4.254.788,-. Nilai ini berarti mengalami kenaikan bila dibandingkan tahun 2005 yang mencapai Rp. 4.199.153,-.

Pada sisi lain, laju inflasi pada tahun 2005 mencapai 21,17%, sedangkan pada tahun 2006 mencapai 5,74%. Tingginya laju inflasi pada tahun 2005 terutama disebabkan oleh adanya kenaikan harga BBM yang terjadi pada bulan

November 2005. Meskipun demikian disadari bahwa jalu inflasi di Provinsi Lampung tahun 2006 masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata laju inflasi nasional yang mencapai 5,27%.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung tersebut lebih banyak disebabkan oleh adanya pertumbuhan di sektor-sektor pertambangan dan penggalian, listrik, gas dan air bersih, sektor konstruksi, serta sektor transportasi dan komunikasi. Sektor-sektor lainnya, walaupun mengalami pertumbuhan namun relatif tidak terlalu tinggi.

Selama 8 tahun terakhir, mulai tahun 1998 sampai dengan tahun 2005, sektor pertanian merupakan sektor yang kontribusi nilai tambah brutonya terbesar dalam total produksi regional Provinsi Lampung. Hal ini berarti bahwa selama 8 tahun sektor pertanian adalah sektor yang peranannya paling mendominasi perekonomian Lampung. Sementara sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor yang mempunyai kontribusi nilai tambah bruto terbesar kedua.

Sedangkan untuk posisi sektor dengan kontribusi nilai tambah bruto terbesar ketiga, secara umum pergeseran peran hanya terjadi antara dua sektor yaitu sektor jasa-jasa dan sektor industri pengolahan. Hal ini mengindikasikan bahwa sampai dengan tahun 2005 sektor jasa dan sektor industri pengolahan adalah sektor yang peranannya relatif tidak dominan dalam perekonomian Provinsi Lampung.

Pada sisi permintaan (*demand side*) peranan konsumsi domestik masih menonjol dalam pembentukan PDRB. Permintaan konsumsi rumah tangga merupakan komponen terbesar dalam perekonomian regional, disusul oleh permintaan konsumsi lembaga swasta nirlaba, dan konsumsi pemerintah. Peranan konsumsi rumah tangga mencapai tingkat di atas 50% sepanjang tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa peranan rumah tangga di masyarakat sangat penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah, produksi sektoral, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Nilai ekspor Provinsi Lampung pada tahun 2006 tercatat mencapai US\$ 2.217.792.388, yang menunjukkan peningkatan bila dibandingkan tahun 2005 dengan ekspor US\$ 1.832.442.029. Komponen ekspor tersebut berasal dari sektor

pertanian dan kehutanan sebesar 31%; sektor industri sebesar 60%; dan sektor pertambangan sebesar 9%.

Komoditas ekspor di daerah Lampung umumnya berasal dari produk-produk pertanian serta perikanan seperti kopi, udang segar, lada, damar, pisang segar, gaplek, biji kakao, udang segar dan sebagainya. Sedangkan ekspor hasil produk industri daerah antara lain nenas kaleng, monosodium glutamat, *particle board*, gula tetes, minyak sawit, kayu lapis, karet, kopi bubuk dan lain sebagainya. Dengan demikian terlihat bahwa secara keseluruhan ekspor Provinsi Lampung sangat tergantung pada produksi sektor pertanian dan pengolahannya.

4.5. Kemiskinan di Provinsi Lampung

Bila dilihat dari indikator kemiskinan menurut BPS Provinsi Lampung, tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung tahun 2006 sebesar 785.041 rumah tangga miskin yang berarti berada pada peringkat ke 25 dari atas atau ke 9 dari bawah di Indonesia. Tingkat kemiskinan ini mengalami kenaikan bila dibandingkan kondisi tahun 2005, yaitu sebanyak 663.018 rumah tangga miskin.

Kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multidimensi, tidak hanya masalah rendahnya pendapatan tetapi juga menyangkut tidak terpenuhi akses kebutuhan dasar, pelayanan kesehatan, pendidikan dasar maupun infrastruktur dasar seperti sanitasi dan air bersih. Aspek-aspek tersebut termuat dalam *Millenium Development Goals* (Tujuan Pembangunan Milenium) yang menitikberatkan pentingnya arti sebuah pembangunan yang berkelanjutan.

4.6. Faktor Penyebab Kemiskinan

Terdapat 3 variabel penyebab kemiskinan dari sisi ekonomi, Dari sisi mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitas rendah. Dari sisi lain, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Menurut Komite Penanggulangan Kemiskinan (2003) dampak kemiskinan menimbulkan masalah seperti menurunnya kualitas sumber daya, munculnya ketimpangan dan kecemburuan sosial, serta terganggunya stabilitas sosial dan meningkatnya kriminalitas. Penyebab dasar kemiskinan yang dapat diidentifikasi adalah :

- a. Kegagalan kepemilikan, terutama tanah dan modal
- b. Terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana
- c. Kebijakan pembangunan yang bias antara perkotaan dan perdesaan dan sektor
- d. Perbedaan kesempatan antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung
- e. Perbedaan sumberdaya manusia dan perbedaan antara sektor ekonomi
- f. Rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat
- g. Kurang adanya tatanan pemerintahan yang bersih dan baik.
- h. Pengelolaan SDA yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan

Hasil pendataan BPS pada tahun 2005 terdapat 663.018 RT Miskin, dengan kriteria yang berhak mendapatkan kompensasi BBM tersebut adalah rumah tangga yang memenuhi 9 atau lebih dari 14 kriteria sebagai berikut :

- a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 3 m²/orang.
- b. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/ bambu/kayu murahan.
- c. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
- d. Tidak memiliki fasilitas Buang Air Besar atau bersama-sama dengan rumah tangga lain.
- e. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
- f. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air yang tidak terlindung/sungai/air hujan.
- g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar dari arang/minyak tanah.

- h. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam 1 kali dalam 1 minggu.
- i. Hanya dapat membeli 1 stel pakaian baru dalam 1 tahun.
- j. Hanya sanggup makan sehari 1 kali/2 kali.
- k. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ klinik.
- l. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 Ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan atau pekerjaan lain dengan pendapatan di bawah Rp 600.000,- per bulan.
- m. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah, tidak tamat SD/hanya SD.
- n. Tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp 500.000,- seperti sepeda motor (kredit/nonkredit), kapal motor atau barang modal lainnya.

Indikator Kemiskinan menurut BKKBN berdasarkan karakteristik keluarga miskin pada aspek kegiatan ekonomi dapat ditinjau dari sumber penghasilannya. Secara umum kondisi keluarga miskin tersebut ditandai dengan:

- a. Kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, sandang pangan dan kesehatan
- b. Kesulitan membiayai pendidikan anak
- c. Penghasilan yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar secara layak
- d. Sanitasi dan kesehatan lingkungan yang buruk
- e. Kondisi fisik rumah yang tidak layak dari segi kesehatan, dan kebersihan
- f. Pemanfaatan lahan/pekarangan tidak maksimal
- g. Rendahnya tingkat pendidikan kepala keluarga
- h. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan
- i. Terindikasi terjadi kekurangan Gizi

Beranekaragamnya penyebab kemiskinan dari beberapa instansi menimbulkan keberagaman faktor dan variabel penyebab kemiskinan yang selanjutnya menyebabkan beberapa data kemiskinan yang secara *real* tidak bisa

diperbandingkan. Variasi data kemiskinan ini mempersulit Pemerintah Daerah untuk mengambil kebijakan dalam pengentasan kemiskinan, sementara di sisi lain akibat dari kebijakan Pemerintah menimbulkan masalah baru bagi daerah. Sebagai ilustrasi sebelum diluncurkannya program SLT jumlah masyarakat miskin di Lampung berdasarkan data BPS tahun 2005 hanya berjumlah 554 RT tetapi setelah munculnya program SLT menjadi 785 RT. Peningkatan ini sebagai akibat desakan masyarakat. Selain itu, juga menimbulkan ketergantungan masyarakat terhadap Pemerintah.

4.7. Klasifikasi Kemiskinan

4.7.1. Kemiskinan Atas Dasar Wilayah

Berdasarkan wilayah, klasifikasi kemiskinan dapat dikemukakan bahwa dari 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung terdapat 5 Kabupaten Tertinggal, yaitu: Lampung Selatan, Lampung Utara, Lampung Barat, Lampung Timur dan Way Kanan.

Sedangkan berdasarkan nilai PDRB, 3 kabupaten dengan nilai PDRB terendah adalah: Metro, Way Kanan, dan Lampung Barat. Nilai PDRB menengah berada di Kabupaten Tanggamus, Tulangbawang, Lampung Utara, dan Lampung Timur. Kabupaten lainnya, yaitu: Bandar Lampung, Lampung Selatan, dan Lampung Tengah merupakan kabupaten dengan nilai PDRB tiga besar di Lampung.

4.7.2. Kemiskinan Atas Dasar RTM

Data kemiskinan juga dapat diklasifikasikan berdasarkan RTM. Masalahnya, terdapat perbedaan data antara RTM dari BKKBN dan RTM dari BPS. Perbedaan tersebut dapat disimak sebagai berikut:

1. Data R T M Menurut BKKBN

Berdasarkan data BKKBN tahun 2004, di Provinsi Lampung terdapat 510.885 KK dari 1.707.646 atau sebesar 29,92 %. Sejak tahun 2006 BKKBN tidak lagi melakukan sensus atau pencacahan keluarga miskin, bersamaan dengan

peran BKKBN yang tidak lagi bertugas untuk mengumpulkan data keluarga sejahtera. Angka kemiskinan menurut BKKBN tidak keluarga yang termasuk dalam kriteria miskin, disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.2. Jumlah Keluarga Miskin di Provinsi Lampung Tahun 2003 – 2004

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin			Ranking
		2002	2003	2004	
1	Lampung Selatan	87.035	90.565	94.065	2
2	Lampung Tengah	41.941	40.020	38.316	7
3	Lampung Utara	36.392	38.781	41.585	6
4	Bandar Lampung	26.790	28.776	32.265	8
5	Lampung Barat	15.349	16.170	17.299	9
6	Tulang Bawang	106.856	105.839	111.780	1
7	Tanggamus	56.801	57.682	58.865	4
8	Kota Metro	2.657	2.636	2.557	10
9	Lampung Timur	57.924	58.638	64.002	3
10	Way Kanan	44.303	46.374	50.151	5
Provinsi		476.048	485.481	510.885	
(Total KK Miskin)		(29,21%)	(29,13%)	(29,92%)	
Provinsi (Total KK)		1.629.771	1.666.520	1.707.646	

(Sumber: BPS Prop. Lampung)

2. Data RTM Menurut BPS

Menurut pendataan yang dilakukan BPS tahun 2006 untuk pelaksanaan program PKPS BBM, terjadi peningkatan kelompok Rumah Tangga Miskin (RTM) dibandingkan tahun 2005, yakni dari 663.018 RTM menjadi 785,041 RTM pada kondisi Mei 2006, seperti disajikan Tabel 4. Pada Tabel 4 terlihat bahwa jumlah RTM sebanyak 663.018 RT yang merupakan data BPS yang cukup valid dengan kriteria yang jelas. Tetapi mengingat adanya program SLT/BLT dan beras untuk keluarga miskin maka angka tersebut bertambah sebanyak 122.023 RT miskin. Jumlah tersebut selalu bertambah dan secara statistik menyebabkan kinerja pemerintah cenderung menurun.

Jumlah RT miskin yang bertambah terbanyak pada kabupaten Lampung Selatan sebanyak 172.155 KK, Lampung Tengah sebanyak 113.634 KK, Lampung Timur 99.633 KK, Tanggamus sebanyak 84.713 KK, dan Tulangbawang sebanyak 81.154 KK. Walaupun demikian tidak ada satu kabupaten pun yang memiliki data statistik yang tidak berubah. Hal ini disebabkan masyarakat menuntut pembagian bantuan secara merata tanpa memperhatikan kriteria kemiskinan, data BPS mungkin saja tidak tepat. Penambahan berikut terlihat pada Tabel 4.3. sebagai berikut :

Tabel 4.3 : Jumlah Rumah Tangga Miskin Tahun 2005 dan 2006

NO	KABUPATEN/ KOTA	Tahun 2005	Kondisi 31 Mei 2006		
			JUMLAH RTM Tahap I	JUMLAH RTM Tahap II	TOTAL JUMLAH RTM
1	Lampung Barat	39.233	37.007	12.499	49.506
2	Tanggamus	68.894	67.167	17.546	84.713
3	Lampung Selatan	151.704	144.857	27.298	172.155
4	Lampung Timur	90.236	84.005	15.628	99.633
5	Lampung Tengah	97.914	91.215	22.419	113.634
6	Lampung Utara	66.280	64.838	4.896	69.734
7	Way Kanan	38.864	38.203	9.707	47.910
8	Tulang Bawang	51.675	49.870	31.284	81.154
9	Bandar Lampung	53.361	50.097	9.086	59.183
10	Metro	4.857	4.771	2.648	7.419
PROVINSI		663.018	632.030	153.011	785.041

Sumber: BPS Prop. Lampung

4.7.3. Kemiskinan Atas Dasar Pendidikan

Kemiskinan juga disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah. Data pendidikan yang mengarah pada indikator kemiskinan adalah angka *drop out* anak usia sekolah yang ditunjukkan oleh indikator Angka Partisipasi Murni (APM). Angka Partisipasi Murni adalah prosentase anak usia sekolah dibandingkan dengan jumlah siswa yang bersekolah. Nilai APM pada tingkat SD atau yang sederajat sebesar 97,63 atau jumlah penduduk usia sekolah yang tidak

bersekolah sebanyak 2,38%. Diduga jumlah ini adalah penduduk usia sekolah tetapi tidak mampu bersekolah. APM SMP sederajat hanya sebesar 67,13%; yang berarti terdapat sejumlah 22,87% anak usia sekolah SMP sederajat yang tidak bersekolah. Alasannya antara lain karena faktor ekonomi dan mereka cenderung bekerja ataupun membantu orang tua.

Indikator lain yang mampu menunjukkan kemiskinan dari sektor kependidikan adalah angka putus sekolah. Pada tahun 2004-2006 terjadi kecenderungan menurunnya angka *drop out* atau putus sekolah untuk tingkat SD dan SMP sederajat. Angka putus sekolah SD sederajat cenderung menurun dari 0,33 tahun 2004 menjadi 0,31 pada tahun 2006. Sedangkan untuk SMP menurun dari 0,97% pada tahun 2004 menjadi 0,68% pada tahun 2006.

**Tabel 4.4. : Data Perkembangan Wajar Dikdas Lampung
Tahun 2003/2004 s/d 2005/2006**

No	Komponen	Tahun 2003/ 2004	Tahun 2004/ 2005	Tahun 2005/ 2006
1	Penduduk			
	a. Jumlah penduduk usia 7 - 12 Th.	904.205	909.394	920.573
	b. Jumlah penduduk usia 13 - 15 Th	454.616	458.224	445.378
	c. Jumlah penduduk usia 7 - 15 Th	1.358.821	1.367.618	1.365.951
2	Angka Partisipasi			
	a. APK Tingkat SD+MI+Paket A	111,52	111,28	111,48
	b. APM Tingkat SD+MI+Paket A	93,84	97,29	97,62
	c. APK Tingkat SMP+MTs+Paket B	78,94	81,94	84,92
	d. APM Tingkat SMP+MTs+Paket B	66,84	63,20	67,13
3	Angka Mengulang (%)			
	a. Tingkat SD/MI	4,08	4,11	4,00
	b. Tingkat SMP/MTs	0,36	0,30	0,22
4	Angka Putus Sekolah (%)			
	a. Tingkat SD/MI	0,33	0,33	0,31
	b. Tingkat SMP/MTs	0,97	0,81	0,68
5	Rata-rata UAN			
	a. Tingkat SMP/MTs	5,40	5,67	5,67
	b. Tingkat SMA/SMK/MA	6,38	6,16	6,16

Sumber: BPS Prov. Lampung

Berdasarkan data ini dapat disimpulkan bahwa program penanggulangan kemiskinan melalui PKPS BBM mampu menurunkan angka putus sekolah sehingga tingkat pendidikan meningkatkan. Kondisi ini ternyata didukung dengan data indikator pembangunan manusia yang bersumber pada data indek pengetahuan; yaitu angka melek huruf dari 93,1% pada 2004 menjadi 93,5% pada tahun 2005.

4.7.4. Kemiskinan Atas Dasar Kesempatan Kerja

Angka kemiskinan dapat ditelaah pula dari angka pengangguran. Data pada tahun 2004 angka pengangguran sebanyak 8,27%. menurun menjadi 8,17% pada tahun 2005 dan pada tahun 2006 menurun menjadi 8,16% seperti dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut ini:

Tabel 4.5: Kondisi Tenaga Kerja Provinsi Lampung Tahun 2004-2006

NO	INDIKATOR	KONDISI			KETERANGAN
		2004	2005	JUNI 2006	
1	Usia kerja	4.806.534	4.895.054	4.950.973	Pertumbuhan penduduk tinggi, kesempatan kerja terbatas, Pengangguran cenderung menurun
2	Angkatan kerja	4.303.1236	4.488.878	4.587.186	
3	Kesempatan kerja	3.949.383	4.488.878	4.587.186	
4	Pengangguran	355.740 (8,27%)	366.920 (8,17%)	375.325 (8,16%)	
5	Tingkat partisipasi kerja	89,49	91,70	92,65	
6	Dependency ratio	57,08	59,02	59,70	

Meskipun data pada Tabel 4.5 memperlihatkan penurunan jumlah penganggur, namun secara kuantitatif jumlah penganggur justru mengalami peningkatan. Dengan demikian data [pada Tabel 4.5 harus dibaca dengan penuh pertimbangan.

4.3. Survei Desa IDT

Survei mengenai kondisi umum desa IDT dilakukan di 10 Kabupaten/Kota dengan cara mendatangi secara langsung desa-desa IDT terdaftar. Enumerator melakukan wawancara dengan aparat desa serta mencatat berbagai data sekunder yang diperlukan. Ringkasan jumlah desa yang telah disurvei disajikan pada Tabel 4.6 berikut:

Tabel 4.6. Rencana dan Realisasi Survei Serta Distribusi Desa IDT Peserta Program Penanggulangan Kemiskinan di Setiap Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Rencana Jumlah Desa Disurvei	Realisasi Jumlah Desa Disurvei	Jumlah Desa Peserta Program Tahun	
				2008	2009
1	Lampung Utara (LUT)	64	70	33	
2	Lampung Selatan (LST)	87	99	40	59
3	Lampung Tengah (LTG)	47	48	24	24
4	Lampung Barat (LBR)	81	82	41	
5	Lampung Timur (LTM)	24	24	12	12
6	Way Kanan (WKN)	94	107	47	60
7	Tanggamus (TGM)	125	125	45	80
8	Tulang Bawang (TBW)	75	81	36	45
9	Metro (MTR)	0	1	1	1
10	Bandarlampung (BDL)	2	2	1	1
11	Jumlah Total	566	639	280	359

Sumber: BPS Provinsi Lampung

Tabel 4.6 memperlihatkan bahwa survei telah dilakukan terhadap seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung. Survei tidak hanya dilakukan terhadap desa IDT yang sejak awal direncanakan dan terdaftar. Namun dalam kenyataan di lapangan jumlah desa mengalami perubahan menjadi lebih banyak, karena adanya penambahan maupun penggantian nama desa.

Selanjutnya, data desa di evaluasi menggunakan sistem skoring yang telah ditetapkan sejak perencanaan awal (terlampir). Kemudian hasil skoring di *array*, dengan hasil skor terbesar ditempatkan pada bagian atas dan mengecil ke bagian bawah. Semakin besar nilai skor, berarti semakin besar masalah di desa IDT tersebut yang harus dipecahkan, sehingga menjadi prioritas yang lebih didahulukan dibandingkan dengan desa yang memiliki skor yang lebih kecil.

Pada tahap selanjutnya, setelah proses *array* selesai, desa-desa tersebut dibagi menjadi 2 (dua) secara proporsional pada setiap kecamatan dalam setiap Kabupaten/Kota. Dengan demikian, sekitar 40-50% dari desa-desa tersebut akan diprogramkan untuk penanganan pada tahun 2008, dan sisanya akan ditangani pada tahun 2009. Distribusi pembagian desa berdasarkan tahun penanganan pada setiap Kabupaten/Kota secara lengkap disajikan pada lampiran.

Selama proses survei di lapangan telah muncul beberapa masalah yang sedikit banyak akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam penentuan nama dan jumlah desa, beserta distribusi pembagiannya dalam tahun 2008 atau 2009. Masalah itu umumnya berakibat pada perubahan nama desa pada kecamatan. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa perubahan tersebut berasal dari kesepakatan di tingkat lapangan. Masalah-masalah yang berhasil diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Jumlah desa

Selama survei berlangsung terdapat kecenderungan adanya upaya untuk melakukan penambahan jumlah desa yang dikategorikan desa IDT dari hampir setiap Kabupaten/Kota. Sehingga, dari rencana awal survei sebanyak 566 desa, ternyata desa yang terdaftar dalam survei berubah menjadi 639 desa.

Adanya pembengkakan jumlah desa IDT, secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi besarnya anggaran yang harus disediakan Pemerintah Daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan pada tahun 2008 dan 2009.

2. Perubahan desa

Pada beberapa kecamatan tertentu ternyata terdapat perubahan nama desa. sehingga meskipun secara jumlah adalah tetap, namun nama desa IDT pada kecamatan tersebut telah mengalami perubahan. Pada lembar lampiran, kasus ini ditandai dengan tanda asterik (*). Karena nama desa baru ini tidak terdapat pada rencana awal survei, maka nama desa IDT dengan kasus ini, meskipun memiliki skor besar, langsung dimasukkan ke dalam Tahun Anggaran 2009.

3. Data tidak masuk

Masalah juga muncul dari beberapa nama desa IDT yang sebenarnya terdapat pada rencana awal survei, namun ternyata oleh sesuatu dan lain sebab. desa tersebut tidak memasukkan data umum desa, sehingga data desa menjadi *blank*. Pada lembar lampiran, kasus ini ditandai dengan *double asterik (**)*. Karena data tidak masuk, maka proses evaluasi tidak dapat dilakukan, sehingga nama desa IDT dengan kasus ini langsung dimasukkan ke Tahun Anggaran 2009.

4. Data tidak lengkap

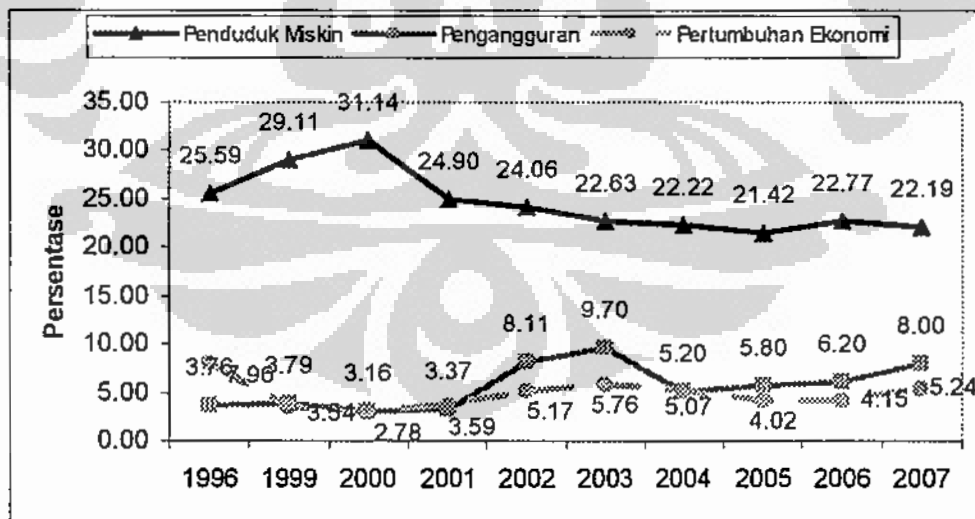
Pada beberapa desa IDT terdapat data desa yang tidak diisi dengan lengkap, padahal setiap isian data memiliki nilai skor tertentu. Akibatnya, terdapat desa IDT yang sebenarnya sangat perlu untuk segera ditangani, namun karena datanya tidak lengkap menyebabkan skor menjadi rendah, sehingga skala prioritasnya mengalami penurunan. Dengan demikian desa IDT tersebut akan ditangani pada Tahun Anggaran 2009.

BAB V HASIL DAN ANALISIS

5.1. Tren Kemiskinan di Lampung

Atas dasar wilayah, menurut Kementerian Daerah Tertinggal, terdapat 5 kabupaten yang masuk dalam kategori miskin yaitu Lampung Barat, Lampung Utara, Way Kanan, Lampung Selatan, Dan Lampung Timur. Sedangkan berdasarkan dari data desa tertinggal, diperkirakan terdapat sekitar 35% dari seluruh desa di Provinsi Lampung yang termasuk kategori desa tertinggal (765 dari 2.198 desa). Adapun Kabupaten yang memiliki desa tertinggal terbanyak diantaranya Way Kanan, Tanggamus, Lampung, Selatan, Lampung Barat, Tulang Bawang. Pada umumnya dalam kabupaten tersebut memiliki keterbatasan infrastruktur. Hal yang menarik ialah adanya keterkaitan antara banyaknya jumlah desa miskin dengan rendahnya PDRB perkapita. Ternyata 4 dari 5 kabupaten dengan desa tertinggal terbanyak memiliki PDRB perkapita terendah di Provinsi Lampung (kecuali Tulang Bawang).

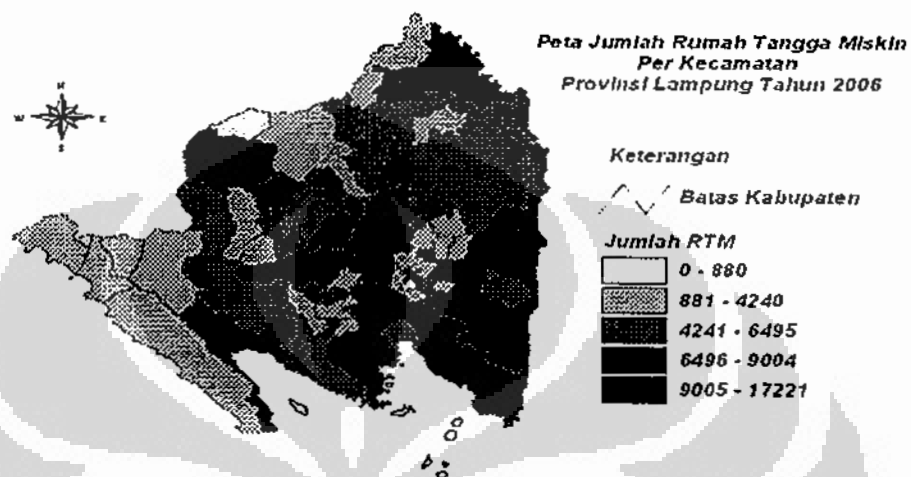
Gambar 5.1. Penduduk Miskin, Pengangguran, dan Pertumbuhan Ekonomi



Gambar 5.1. di atas secara deskriptif dapat menjelaskan hubungan tren antara penduduk miskin, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Secara umum terlihat, bahwa semakin tinggi angka pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung, maka angka kemiskinan cenderung semakin rendah. Sebagai contoh, pada saat pertumbuhan ekonomi hanya mencapai angka 2,78% di tahun 2000, angka kemiskinan (*poverty headcount ratio*) melonjak hingga 31,14% di tahun yang sama. Hal ini memperlihatkan bahwa secara tidak langsung, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu kondisi yang dapat membantu mengurangi angka kemiskinan. Hal disebabkan karena penduduk miskin memperoleh langsung manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Apabila dilihat dari angka kemiskinannya saja, tren yang ada menunjukkan adanya fluktuasi persentase penduduk miskin. Hanya saja, sebenarnya selama 11 tahun terakhir (1996 hingga 2007), meskipun sedikit menurun, persentase penduduk miskin tidak banyak mengalami perubahan. Yang berarti bahwa kondisi kesejahteraan di Provinsi Lampung tidak mengalami peningkatan yang berarti.

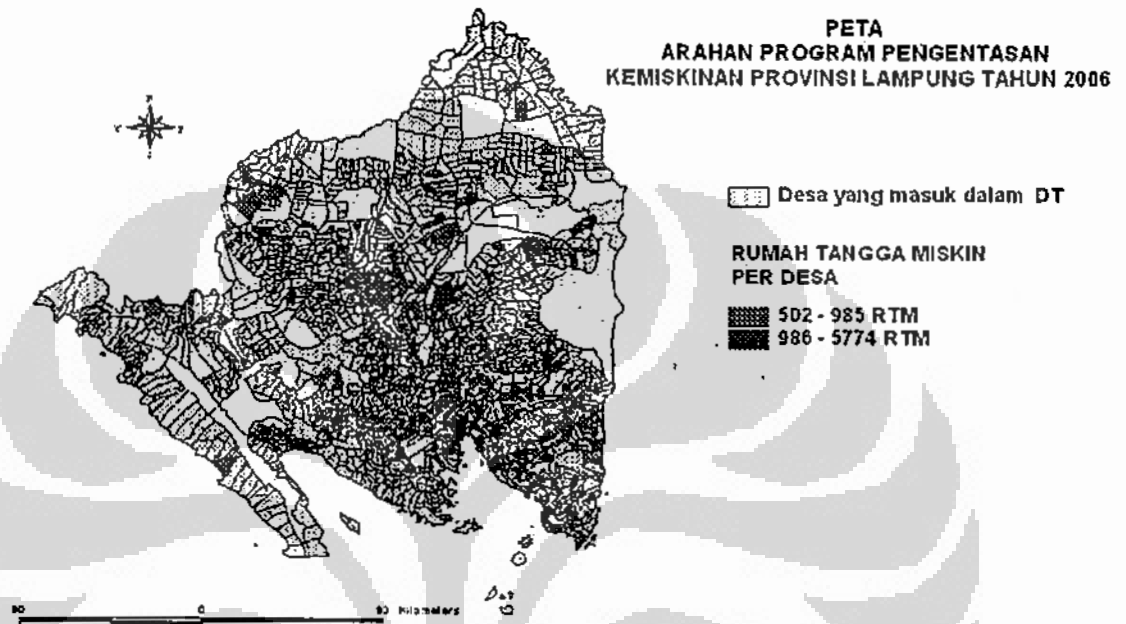
Hal lain yang menarik untuk diamati ialah adanya kecenderungan hubungan searah antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Pada saat pertumbuhan ekonomi tinggi, angka pengangguran di Provinsi Lampung juga relatif tinggi. Berdasarkan berbagai literatur yang ada, fenomena tersebut terjadi akibat sektor yang memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi tinggi memiliki angka penyerapan tenaga kerja. Sebaliknya, sektor yang penyerapan tenaga kerjanya tinggi (*labor intensive industry*) justru mengalami pertumbuhan yang rendah. Jadi, perlu ada strategi investasi yang lebih baik di masa mendatang, untuk mendorong pertumbuhan sektor yang penyerapan tenaga kerjanya tinggi.

Gambar 5.2. Peta Jumlah Rumah Tangga Miskin per Kecamatan Lampung



Berdasarkan peta jumlah rumah tangga miskin per kecamatan di Provinsi Lampung terlihat bahwa tidak banyak kecamatan yang hanya sedikit rumah tangga miskinnya. Konsentrasi rumah tangga miskin justru terdapat di kecamatan (bagian selatan) yang berbatasan dengan Pulau Jawa. Dalam ekonomi perkotaan dan regional dijelaskan adanya fenomena *spatial mismatch*. Penduduk miskin cenderung memilih pusat aktifitas ekonomi sebagai lokasi tinggal, dengan alasan agar dekat tempat (mencari) kerja. Padahal, di pusat aktifitas ekonomi, biasanya dibutuhkan tenaga kerja yang memiliki ketrampilan tertentu (*skilled labor*). Akibatnya, penduduk miskin sulit untuk menemukan pekerjaan di sektor formal, dan cenderung tetap miskin.

Gambar 5.3. Peta Arah Program Pengentasan Kemiskinan di Lampung



Peta di atas memperlihatkan arah program pengentasan kemiskinan yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2006. Desa yang termasuk tertinggal (DT) jumlahnya cukup banyak dan tersebar hampir di sebagian besar wilayah Provinsi Lampung.

Tabel 5.1. Berbagai Indikator Kesejahteraan Provinsi Lampung (2004-2007)

No	Indikator	Tahun			
		2004	2005	2006	2007
1	APK SD (%)	111,82	111,28	111,48	112
2	APK SMP (%)	78,94	81,94	84,71	89,0
3	APK SMA (%)	38,31	41,17	43,15	44,0
4	APM SD (%)	93,84	97,29	97,62	98,0
5	APM SMP (%)	66,84	63,20	67,13	71,0
6	Angka Harapan Hidup	67,6	68,0	68,5	69,1
7	Posyandu per 1.000 penduduk	1,02	1,0	1,0	1,1
8	Jumlah Tenaga Dokter per 100.000 penduduk	7,75	13,6	12,6	13,4
9	Indeks Kelangsungan Hidup	71,0	71,7	72,5	73,5
10	Indeks Pengetahuan	77,6	78,3	78,6	78,91
11	Indeks Daya Beli	56,6	56,4	57,1	57,24
12	IPM	68,4	68,8	69,4	70,1

Sumber: BPS Provinsi Lampung

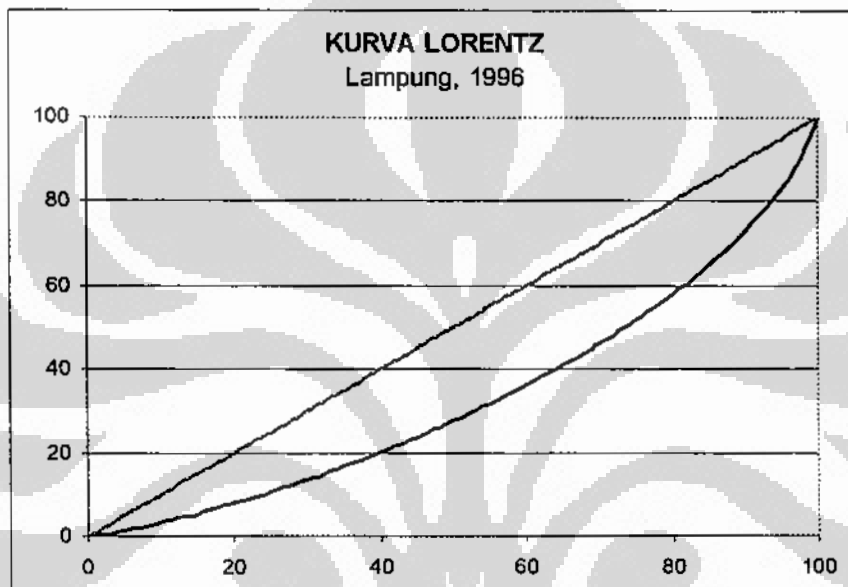
Perkembangan indikator kesejahteraan selama 4 tahun terakhir (2004-2007) menunjukkan adanya tren positif. Berbagai indikator pendidikan seperti APK dan APM untuk tingkat SD, SMP dan SMA memperlihatkan kondisi yang membaik. Artinya, akses masyarakat Lampung terhadap pendidikan semakin baik. Sedangkan indikator kesejahteraan yang terkait dengan kesehatan dan daya beli masyarakat juga menunjukkan tren peningkatan. Jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin tahun 2004-2007, kondisinya sedikit berbeda. Pada tahun 2004, persentase penduduk miskin di Lampung sebesar 22,22%, sedangkan di tahun 2005, 2006, dan 2007 masing-masing sebesar 21,42%, 22,77%, dan 22,19%. Memang perlu diingat bahwa perbaikan kondisi pendidikan dan kesehatan memiliki dampak jangka panjang dan tidak langsung berpengaruh terhadap kemiskinan pada tahun yang sama.

5.2. Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Lampung

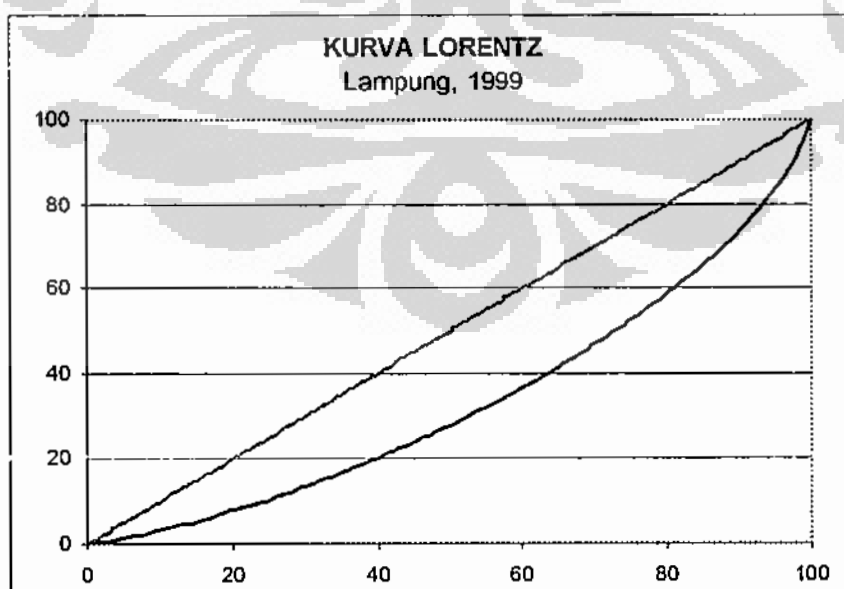
Meskipun pemerintah Provinsi Lampung dalam beberapa tahun terakhir menaruh perhatian yang cukup mendalam terhadap kemiskinan, namun kebijakan yang ada belum cukup untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Hal ini disebabkan karena perhatian pemerintah terhadap masalah ketimpangan

pendapatan belum memadai. Manfaat kebijakan redistribusi pendapatan tidak hanya menguntungkan bagi mereka yang miskin saja, tetapi juga mereka yang tidak miskin. Alasannya karena pemerataan pendapatan dapat menciptakan stabilitas politik dan sosial di Lampung, termasuk stabilitas ekonomi yang menguntungkan bagi semua pihak.

Gambar 5.4. Kurva Lorenz Provinsi Lampung, 1996

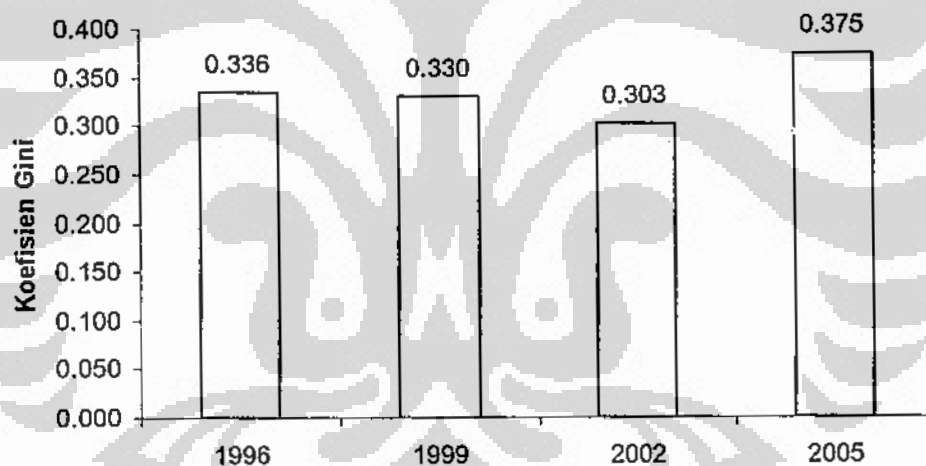


Gambar 5.5. Kurva Lorenz Provinsi Lampung, 1999

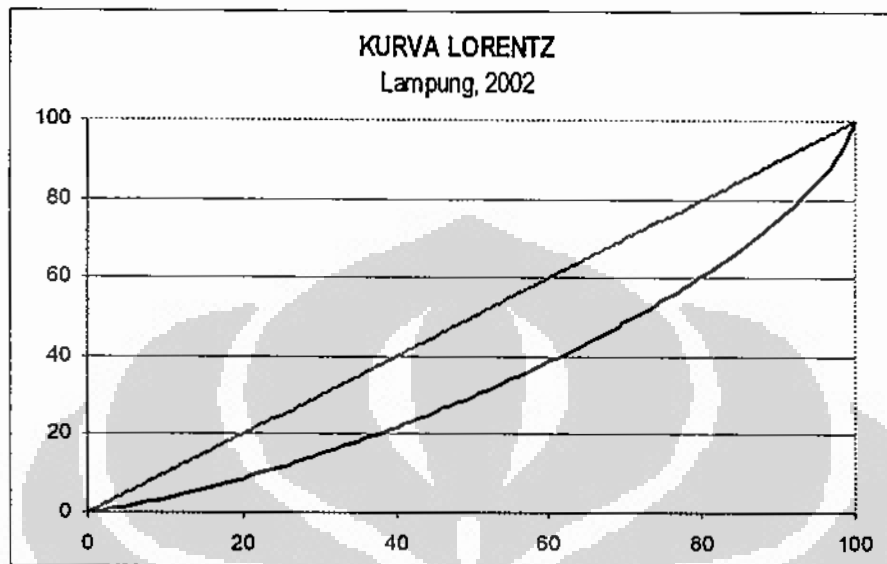


Selanjutnya, jika dibandingkan dengan tahun 1999, ternyata distribusi pendapatan di Provinsi Lampung semakin membaik, dengan angka Koefisien Gini sebesar 0,3033 di tahun 2002. Hal ini memperlihatkan bahwa ketimpangan pendapatan di Provinsi Lampung tidak terlalu besar dan cenderung membaik. Ketimpangan pendapatan antar kelompok penduduk kaya dan miskin tidak terlalu besar. Namun jika dicermati lebih lanjut, di tahun 2005 angka Koefisien Gini naik secara signifikan menjadi 0,3749. Kondisi ketimpangan di tahun 2005 ini bahkan lebih buruk dibanding tahun 1996. Ini menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan pendapatan selama periode 2002-2005. Hal tersebut juga tercermin dari kurva Lorenz yang semakin landai kemiringannya.

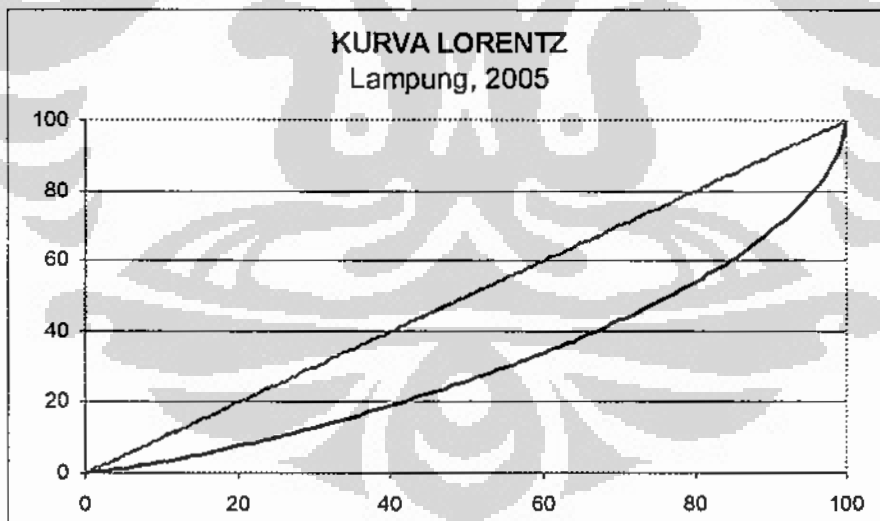
Gambar 5.6. Perkembangan Koefisien Gini Provinsi Lampung



Gambar 5.7. Kurva Lorenz Provinsi Lampung, 2002



Gambar 5.8. Kurva Lorenz Provinsi Lampung, 2005



Tabel 5.2. Nilai Kuartil Pengeluaran Rumah Tangga per Bulan di Lampung

Quartile	Tahun			
	1996	1999	2002	2005
Q1	128,851.8	275,224.0	365,389.0	446,707.5
Q2	181,608.0	393,784.0	502,934.5	618,452.4
Q3	268,513.8	574,497.0	701,281.5	919,765.5

Tabel 5.3. Pertumbuhan Pengeluaran Rumah Tangga per Kuartil ung

Kuartil	1996-1999	1999-2002	2002-2005
Q1	113.60%	32.76%	22.26%
Q2	116.83%	27.72%	22.97%
Q3	113.95%	22.07%	31.15%

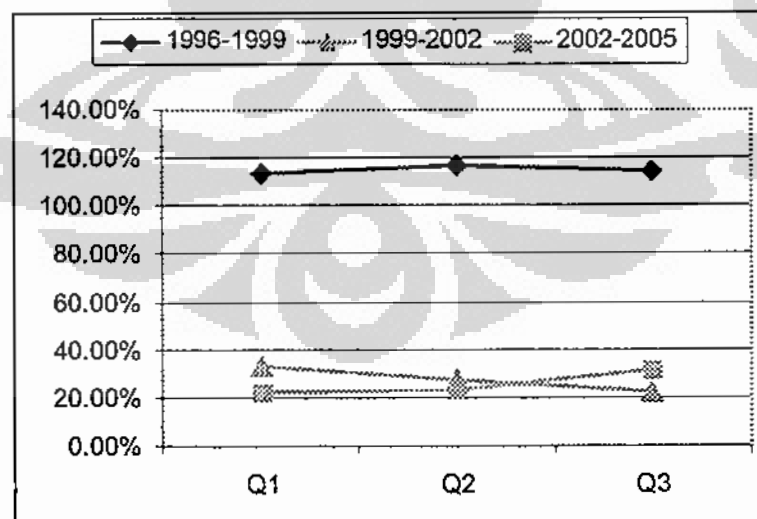
Berdasarkan perhitungan nilai kuartil pengeluaran rumah tangga sebulan, diketahui bahwa pengeluaran setiap kelompok kuartil meningkat dari tahun 1996 hingga 2005. Tentunya peningkatan pengeluaran dapat saja dipicu oleh adanya inflasi. Hal yang penting untuk diamati ialah perbedaan pengeluaran untuk setiap batas kuartil. Di tahun 1996, nilai pengeluaran di kuartil 1 (25% penduduk dengan konsumsi terendah) sebesar Rp. 128.851,8 yang hanya sekitar 70,95% dibanding nilai di kuartil 2. Sedangkan di tahun 2005, nilai pengeluaran kuartil 1 lebih tinggi yaitu sekitar 72,23% dibanding nilai di kuartil 2. Ini artinya, ketimpangan antara kelompok pendapatan terendah dengan kelompok pendapatan menengah mulai mengecil. Sedangkan jika kita membandingkan antara kelompok kuartil 2 dengan 3, ternyata selama 1996 hingga 2005 tidak terjadi banyak perubahan.

Ditinjau dari pertumbuhan pengeluaran (Tabel 5.3.) terlihat jelas bahwa pada periode 1996-1999 pertumbuhannya sangat tinggi dibanding periode 1999-2002 dan 2002-2005. Namun hal yang menarik ialah bahwa pada periode 1999-2002, kelompok kuartil 1 (penduduk berpendapatan paling rendah) memiliki pertumbuhan pendapatan paling tinggi dibanding kelompok kuartil 2 dan 3. Hal ini jelas mendukung analisis sebelumnya bahwa selama periode 1999-2002, Koefisien Gini menurun yang berarti ketimpangan pendapatan berkurang. Kondisi ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa pendapatan kelompok termiskin

meningkat melebihi pertumbuhan pendapatan kelompok lainnya. Sebaliknya, pada periode 2002-2005, justru pendapatan kelompok penduduk terkaya yang tumbuh dengan cepat. Oleh karenanya, selama periode 2002-2005 terjadi ketimpangan pendapatan yang semakin memburuk.

Kurva Growth Incidence Provinsi Lampung

Ravalion dan Chen (2003) memperkenalkan suatu konsep yang menganalisis dampak dari pertumbuhan ekonomi secara agregat terhadap seluruh kelompok pendapatan. Konsep ini dikenal dengan istilah *Growth Incidence Curve* (GIC). GIC mengindikasikan tingkat pertumbuhan pendapatan atau konsumsi antar poin waktu di setiap persentil distribusi pendapatan. Jika pertumbuhan pendapatan paling tinggi dialami oleh persentil terbawah (kelompok termiskin), maka pertumbuhan ekonomi yang terjadi adalah *pro-poor growth*. Sebaliknya, jika pertumbuhan pendapatan tertinggi justru dialami persentil teratas (kelompok terkaya) maka yang terjadi adalah *anti-poor growth*. Apabila GIC berbentuk garis lurus mendatar (flat), maka sebenarnya pertumbuhan yang terjadi adalah *natural growth*, dimana seluruh kelompok pendapatan mengalami pertumbuhan pendapatan yang sama.



Berdasarkan kurva di atas terlihat jelas bahwa pada periode 1996-1999 dan 1999-2002, pembangunan di Provinsi Lampung bersifat pro-poor growth, dimana kelompok rumah tangga paling miskin mengalami pertumbuhan pendapatan sangat tinggi. Namun demikian, pada periode 1996-1999 sebenarnya seluruh kelompok pendapatan mengalami pertumbuhan pendapatan yang sangat tinggi, dan kelompok rumah tangga Q2 (kuartil 2) paling tinggi pertumbuhannya. Tingginya kenaikan pendapatan (pengeluaran) selama periode tersebut kemungkinan juga terkait dengan inflasi, mengingat dalam penelitian ini pengolahan data tidak menghilangkan faktor inflasi.

Pro-poor growth yang sebenarnya terjadi pada periode 1999-2002, dimana 25% kelompok rumah tangga dengan pendapatan terendah mengalami pertumbuhan pendapatan tertinggi dibanding kelompok pendapatan lainnya. Kondisi yang memprihatinkan justru terjadi pada periode 2002-2005, dimana 25% kelompok pendapatan terendah justru mengalami pertumbuhan pendapatan paling rendah. Ini menjadi sinyal bahwa pembangunan di Provinsi Lampung cenderung semakin tidak pro-poor (anti-poor). Tentunya pemerintah perlu memperhatikan permasalahan mengapa pembangunan di Provinsi Lampung saat ini tidak banyak menguntungkan penduduk miskin.

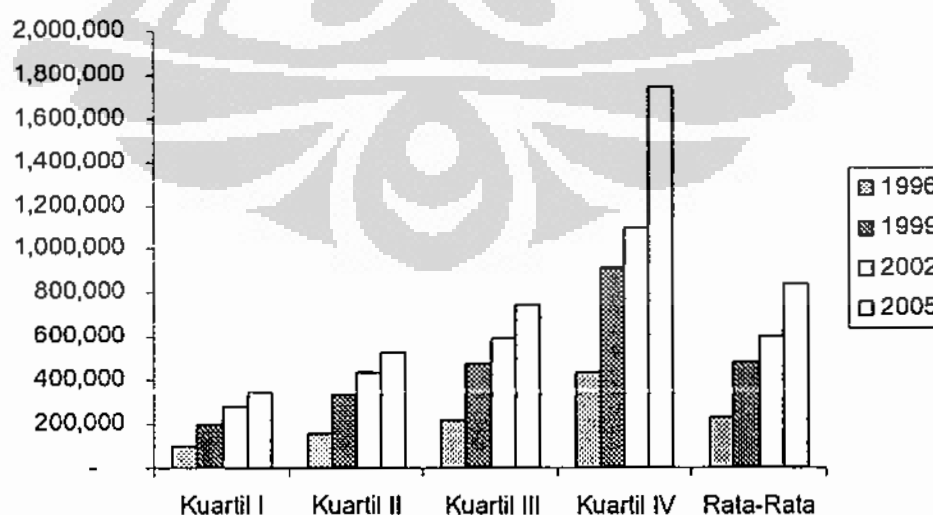
Tabel 5.4. Rata-rata Pengeluaran setiap 25 % Kelompok Pendapatan

Propinsi	1996		1999		2002		2005	
	Expd (mean)	% Rural	Expd (mean)	% Rural	Expd (mean)	% Rural	Expd (mean)	% Rural
Lampung								
25% ke-I	96,611.6	94.50	202,850.8	95.10	282,545.3	89.84	565,955.09	56.58
25% ke-II	154,726.2	89.90	334,212.7	89.30	433,823.9	79.39	962,325.77	45.41
25% ke-III	218,743.2	81.40	472,465.0	78.10	590,120.4	71.97	1,420,440.40	22.68
25% ke-IV	438,754.4		914,171.4	55.86	1,097,305.4	52.85	2,705,099.82	9.43
Propinsi	1996		1999		2002		2005	
	Rasio		Expd (mean)		Expd (mean)		Expd (mean)	
Lampung								
25% ke-I dgn IV	22.02%		22.19%		25.75%		20.92%	
25% ke-II dgn IV	35.26%		36.56%		39.54%		35.57%	
25% ke-III dgn IV	49.86%		51.68%		53.78%		52.51%	
25% ke-IV dgn IV	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%	

Hal yang menarik berikutnya ialah jika kita menganalisis rata-rata pengeluaran setiap 25% kelompok pendapatan. Dari tabel di atas terlihat bahwa tidak banyak perubahan selama tahun 1996 hingga 2005. Hanya saja, jika dibandingkan 2 titik waktu antara 1996 dengan 2005 maka terlihat bahwa kesenjangan antara penduduk termiskin dengan terkaya sedikit meningkat. Tabel di atas menunjukkan adanya penurunan drastis persentase kelompok pendapatan tertinggi yang hidup di wilayah perdesaan. Di tahun 1999, sebanyak 55,86% dari penduduk terkaya tinggal di desa dan sisanya di kota. Sedangkan di tahun 2005, hanya 9,43% penduduk terkaya yang tinggal di desa. Hal yang sama juga terjadi untuk penduduk termiskin. Di tahun 1999, sebanyak 95,10% penduduk termiskin tinggal di desa. Sedangkan di tahun 2005, jumlah penduduk termiskin yang tinggal di desa turun menjadi 56,58%. Artinya, di daerah perkotaan di Lampung, terjadi penumpukan penduduk paling kaya dan paling miskin secara bersamaan. Ini menunjukkan bahwa ketimpangan di kota semakin besar.

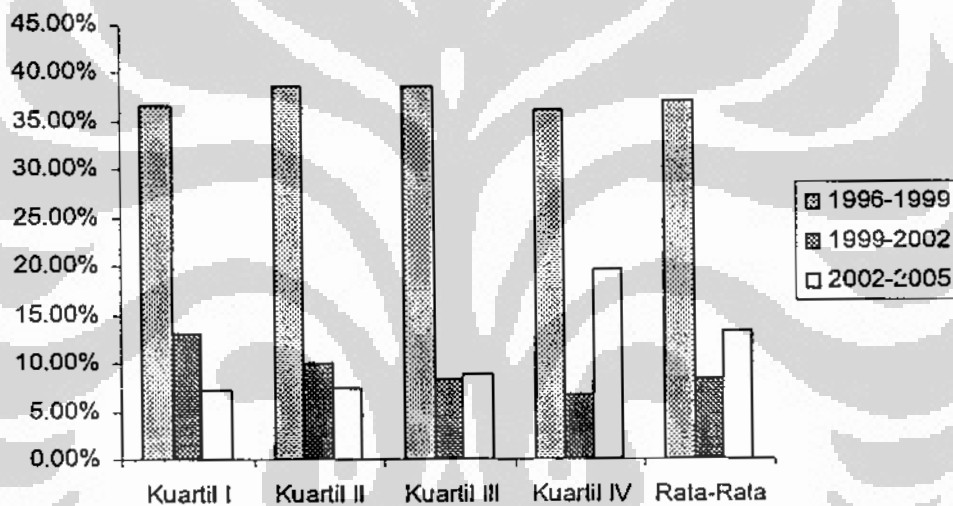
Jika penduduk miskin dan kaya secara bersama tinggal di kota, dimana ini mengindikasikan ketimpangan pendapatan kota yang tinggi, maka akan muncul banyak masalah sosial di perkotaan. Jika hal ini tidak diatasi segera, maka diperkirakan dalam beberapa tahun mendatang, daerah perkotaan di Lampung akan meningkat kriminalitasnya dan terjadi banyak "penyakit sosial". Sedangkan desa di Lampung distribusi pendapatannya relatif lebih merata dibanding di kota.

Gambar 5.9. Perkembangan Pengeluaran Masing-Masing Kelompok Kuartil



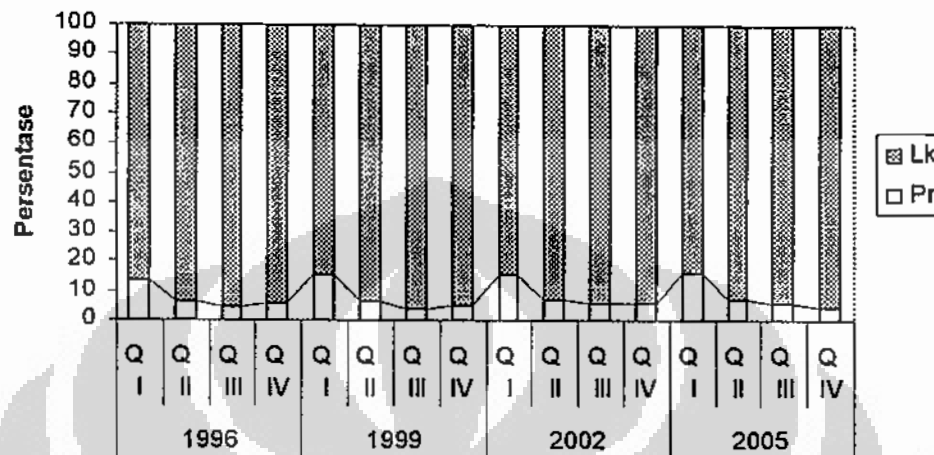
Gambar di atas memperlihatkan bahwa pengeluaran masing-masing kelompok kuartil terus meningkat, namun dengan kecenderungan bahwa kelompok kuartil IV (25% penduduk terkaya) mengalami peningkatan paling besar. Perbandingan lainnya memperlihatkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk di Provinsi Lampung ternyata masih lebih tinggi dibanding pengeluaran kelompok kuartil III (kelompok penduduk terkaya kedua). Berarti, cukup besar perbedaan pengeluaran antara kelompok penduduk yang berada di kuartil III dengan IV.

Gambar 5.10. Rata-Rata Pertumbuhan Pengeluaran Setiap Kuartil



Untuk keempat kuartil kelompok pendapatan, rata-rata pertumbuhan pengeluaran tertinggi terjadi pada periode 1996- 1999. Hal ini konsisten dengan penjelasan sebelumnya. Kelompok pendapatan tertinggi (kuartil IV) selama 2002-2006 menikmati pertumbuhan pendapatan yang jauh lebih tinggi dibanding kelompok kuartil lainnya. Berarti, selama periode tersebut, pembangunan yang dilaksanakan di Lampung lebih banyak memberikan manfaat bagi penduduk kaya.

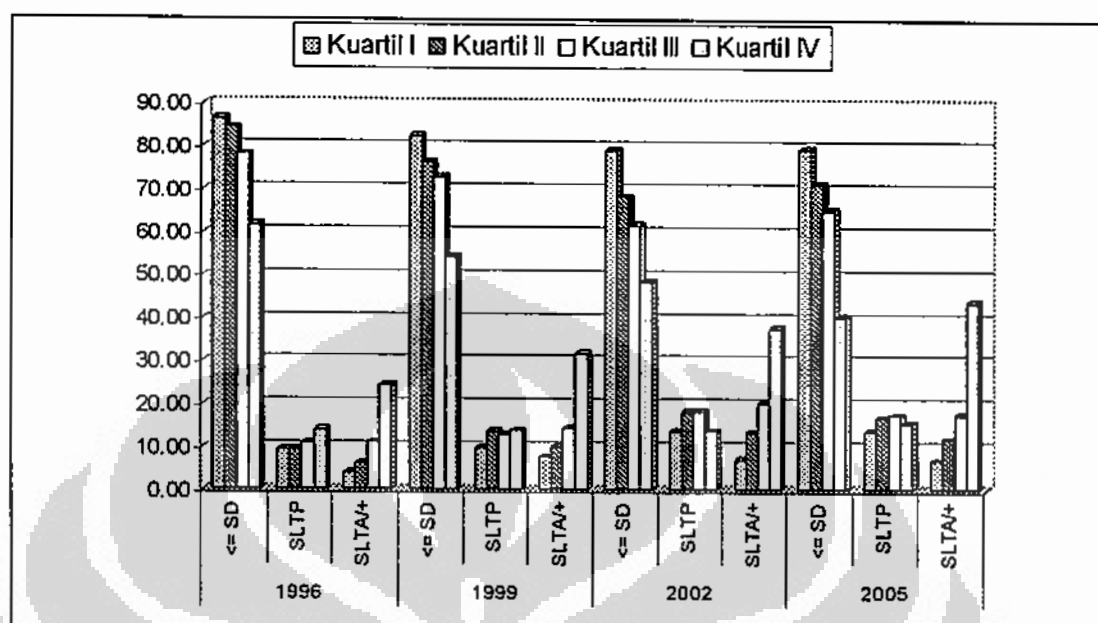
Gambar 5.11. Persentase Kepala Rumah Tangga Menurut Jenis Kelamin



Salah satu tujuan dalam Millenium Development Goals yang ditetapkan oleh PBB ialah adanya kesetaraan gender. Berdasarkan Gambar 5.11 diketahui bahwa persentase kepala rumah tangga perempuan relatif sedikit dibanding laki-laki. Tetapi, ada kecenderungan bahwa rumah tangga yang dipimpin perempuan cenderung miskin. Hal ini ditunjukkan oleh proporsi kepala rumah tangga perempuan yang jumlahnya semakin kecil untuk kelompok pendapatan yang lebih tinggi. Persentase kepala rumah tangga di kelompok 25% pendapatan terendah (paling miskin) selalu lebih besar dibanding persentase kepala rumah tangga berpendapatan tinggi. Bahkan jika diperbandingkan antar tahun selama periode 1996-2005, terlihat kondisinya semakin memburuk. Artinya, jika perempuan menjadi kepala rumah tangga, maka rumah tangga tersebut cenderung miskin.

Kondisi di atas tidak terlepas dari sulitnya perempuan memperoleh pekerjaan. Pada pasar tenaga kerja di Indonesia, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan relatif jauh lebih rendah dibanding laki-laki. Adanya diskriminasi terhadap perempuan di pasar kerja menyebabkan kepala rumah tangga perempuan akan kesulitan memperoleh sumber pendapatan. Dampaknya, rumah tangga tersebut akan cenderung miskin dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarganya.

Gambar 5.12. Pendidikan Kepala Rumah Tangga Menurut Kuartil (%)



Gambar 5.12 di atas memperlihatkan bahwa pendidikan memegang peranan penting bagi kesejahteraan penduduk di Provinsi Lampung. Semakin tinggi pendidikan kepala rumah tangga, semakin tinggi pula pendapatan (pengeluaran) orang tersebut. Sebaliknya, semakin rendah tingkat pendidikan kepala rumah tangga, maka semakin rendah pula pendapatannya. Di kuartil I (kelompok penduduk termiskin), mayoritas kepala rumah tangganya hanya berpendidikan SD. Jika diperbandingkan antar waktu, ternyata pada tahun 1996, kelompok 25% penduduk terkaya mayoritas pendidikannya hanya SD ke bawah. Sedangkan di tahun-tahun berikutnya, secara lambat laun kelompok 25% pendapatan terkaya (kuartil IV) mulai didominasi oleh kepala rumah tangga berpendidikan SLTA ke atas. Ini menjadi indikasi bahwa tingkat pendidikan di Provinsi Lampung semakin membaik, dan pendidikan perlu mendapat perhatian lebih besar oleh pemerintah sebagai instrumen untuk mengurangi kemiskinan (kelompok berpendapatan rendah).

Tabel 5.5. Jumlah Anggota Rumah Tangga Menurut Kuartil (orang)

Tahun	Rumah Tangga Menurut Kelompok Kuartil				Rata-Rata
	1st	2nd	3rd	4th	
1996	3.30	4.32	5.03	5.76	4.60
1999	3.15	4.24	4.84	5.60	4.46
2002	3.06	3.97	4.58	5.08	4.18
2005	3.07	3.91	4.40	4.88	4.06

Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, semakin baik kualitas hidup orang tersebut. Menurut para ahli kependudukan, dengan pendapatan yang semakin tinggi, akses terhadap fasilitas kesehatan orang tersebut akan lebih baik. Sehingga, seharusnya orang tersebut memiliki kecenderungan untuk memiliki anak lebih sedikit. Bagi orang miskin, memiliki anak yang banyak disebabkan karena probabilitas anak tersebut untuk meninggal lebih besar, sehingga perlu "cadangan anak". Namun ternyata pandangan teori tersebut tidak berlaku di Lampung.

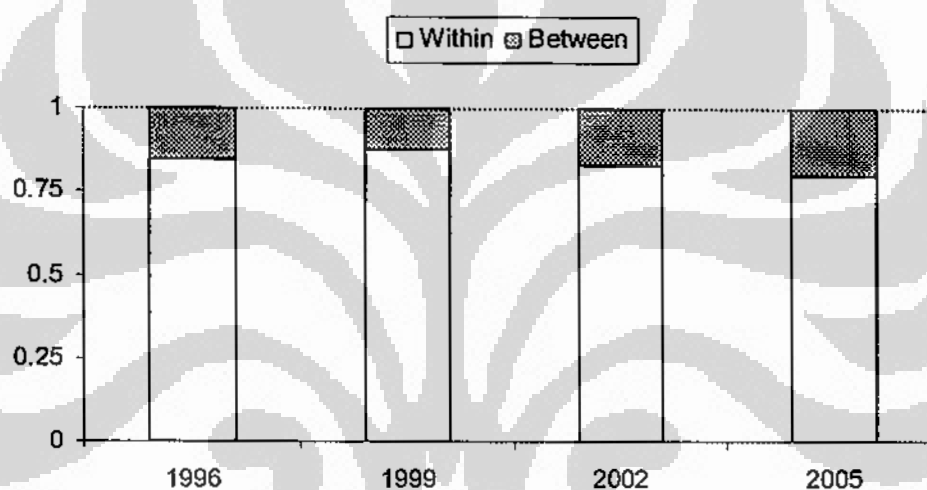
Berdasarkan pengolahan data yang ada, diketahui bahwa semakin tinggi pendapatan rumah tangga, semakin besar jumlah anggota keluarga (anak) yang dimilikinya. Rumah tangga dengan pendapatan rendah justru cenderung memiliki anak lebih sedikit. Analisis yang dapat disampaikan di sini ialah kemungkinan bahwa semakin besar pendapatan suatu rumah tangga, maka semakin besar pula kemampuannya untuk membiayai kebutuhan anak, sehingga memiliki anak banyak tidak masalah. Tetapi ada satu tren lainnya yaitu bahwa jumlah anak yang dimiliki setiap kelompok rumah tangga cenderung semakin sedikit selama periode 1996-2005.

5.3. Ketimpangan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

Salah satu hal yang penting dalam menganalisis ketimpangan di dalam masyarakat ialah dengan mengidentifikasi apakah terjadi horizontal inequality. Untuk mengukur ketimpangan horisontal tersebut, maka masyarakat dapat dikelompokkan bukan menurut kelompok pendapatan, melainkan menurut kelompok sosial tertentu. Untuk tujuan tersebut, penelitian ini mengelompokkan

masyarakat menurut batas administrasi kabupaten/kota. Pendekatan pengukuran yang digunakan ialah *Theil Index*. Theil dalam penelitian ini menggunakan pendekatan pengeluaran (*expenditure*) per kapita. Untuk mengetahui apakah ketimpangan pendapatan yang terjadi lebih bersifat ketimpangan antar daerah (*between region*) atau dalam daerah (*within region*), maka dilakukan dekomposisi.

Gambar 5.13. Ketimpangan Antar Daerah di Provinsi Lampung, 1996-2005



Tabel 5.6. Ketimpangan Antar Daerah di Provinsi Lampung, 1996-2005

	1996	1999	2002	2005
Within	0.8461	0.87661	0.826316	0.797523
Between	0.1539	0.12339	0.173684	0.202477

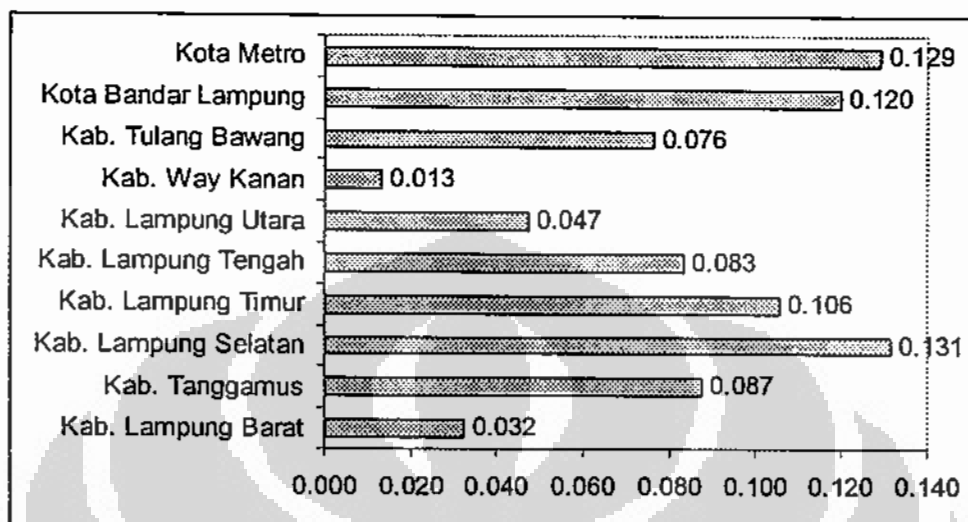
Berdasarkan Gambar 5.13 dan Tabel 5.6 terlihat bahwa ketimpangan antar kabupaten/kota di Provinsi Lampung tidak terlalu menonjol. Artinya, tidak terjadi ketimpangan antar kabupaten/kota, dimana sebetulnya ketimpangan pendapatan di masing-masing kabupaten/kota yang sebenarnya lebih menonjol. Berarti, setiap kabupaten/kota memiliki masalah yang sama yaitu di dalam masyarakatnya sama-sama mengalami ketimpangan pendapatan. Namun demikian, ada hal yang

menarik bahwa meskipun ketimpangan antar daerah (kabupaten/kota) tidak menonjol, tetapi kecenderungannya meningkat. Ada tren bahwa semakin lama, ketimpangan antar daerah meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan kenyataan kenaikan indeks Theil between region, dimana sejak tahun 1999 ke 2005 terjadi kenaikan dari 0,12339 di tahun 1999 menjadi 0,202477 di tahun 2005.

Dengan indikasi bahwa terjadi kenaikan ketimpangan antar daerah di Provinsi Lampung, berarti pembangunan yang terjadi di dalam provinsi ini cenderung tidak seimbang. Ada beberapa daerah yang mengalami kemajuan pembangunan dengan sangat cepat. Sedangkan beberapa daerah lainnya mengalami pembangunan yang lambat. Ini merupakan sinyal bagi pemerintah daerah di Provinsi Lampung untuk lebih memperbaiki pemerataan pembangunan yang ada. Selain itu, ketimpangan antar daerah ini terjadi setelah adanya pemberlakuan otonomi daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kemampuan daerah dalam pemberian pelayanan publik tidak sama, dan daerah yang memiliki sumberdaya yang besar memperoleh manfaat yang lebih besar pula selama era otonomi daerah.

Meskipun ada indikasi bahwa sejak pemberlakuan otonomi daerah ketimpangan antar daerah di Provinsi Lampung meningkat, namun dugaan ini tidak dibuktikan secara lebih lanjut dalam penelitian ini. Dugaan lainnya ialah bahwa koordinasi dan integrasi pembangunan di Provinsi Lampung belum berjalan dengan baik. Jika setiap kabupaten/kota bekerjasama dalam pembangunan, maka hal ini akan memperkecil kesenjangan antar daerah. Perlu upaya lebih lanjut dari Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengurangi atau mencegah meningkatnya ketimpangan antar daerah.

Gambar 5.14. Ketimpangan Dalam Daerah di Provinsi Lampung, 2005



Selanjutnya perlu dianalisis ketimpangan within region. Berdasarkan Gambar 5.14 terlihat jelas bahwa ketimpangan di dalam setiap daerah yang menjadi masalah. Kabupaten yang ketimpangannya cukup rendah ialah Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Barat, dan Kabupaten Lampung Utara. Kedua kabupaten tersebut masing-masing memiliki nilai indeks 0,013, 0,032, dan 0,047. Sedangkan Kabupaten Lampung Selatan (yang berbatasan dengan Pulau Jawa) dan Kota Metro mengalami ketimpangan yang paling buruk dengan indeks masing-masing sebesar 0,131 dan 0,129.

Kabupaten Lampung Selatan mengalami ketimpangan yang buruk, diduga penyebabnya karena kabupaten ini menjadi pintu masuk bagi para migran dari Pulau Jawa. Penduduk dengan pendapatan tinggi dan rendah mengumpul di kabupaten ini. Ada kelompok masyarakat yang menikmati manfaat dari besarnya aktifitas ekonomi di Lampung Selatan. Namun, ada juga kelompok masyarakat yang akibat persaingan justru gagal memperoleh pekerjaan dan hidup dalam kemiskinan. Sebagai gambaran, banyak pekerja yang beraktifitas di Lampung Selatan, namun tinggal di Kota Bandar Lampung. Akibatnya, aktifitas konsumsi mereka sebagian besar dilakukan di tempat lain dan bukan di Lampung Selatan.

Kota Metro merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Lampung Tengah dan menjadi kota terkecil di Provinsi Lampung. Kota ini tidak banyak memiliki sektor unggulan dan sedang berbenah dalam pembangunannya. Arus urbanisasi ke kota ini meningkat seiring dengan pembangunan yang ada. Namun, urbanisasi juga menyebabkan terjadinya penumpukan orang miskin di kota. Di sisi lain, di kota ini juga tinggal penduduk kaya yang sebelumnya berasal dari Kabupaten Lampung Tengah. Dengan demikian ketimpangan di Kota Metro cukup besar. Perlu perhatian Pemerintah Kota Metro (dan juga tentunya Kabupaten Lampung Selatan) untuk mengatasi masalah ketimpangan pendapatan. Hal ini mengingatkan bahwa ketimpangan pendapatan dapat memicu munculnya konflik di dalam masyarakat akibat adanya kecemburuan sosial.



BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. Kesimpulan

Provinsi Lampung memiliki banyak komunitas miskin, dimana sekitar 35% dari seluruh desa di Provinsi Lampung yang termasuk kategori desa tertinggal (765 dari 2.198 desa). Komunitas miskin tersebut bercirikan buruknya infrastruktur yang ada. Ada kecenderungan bahwa kabupaten yang memiliki banyak desa tertinggal, cenderung memang memiliki PDRB perkapita terendah di Provinsi Lampung.

Secara deskriptif, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung dapat membantu mengurangi angka kemiskinan. Semakin tinggi angka pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung, maka angka kemiskinan cenderung semakin rendah. Berdasarkan tren yang ada, Provinsi Lampung mengalami fluktuasi dalam hal persentase penduduk miskin. Namun demikian, ada kecenderungan selama 11 tahun terakhir (1996 hingga 2007), persentase penduduk miskin tidak banyak mengalami perubahan. Berarti kondisi kesejahteraan di Provinsi Lampung tidak mengalami peningkatan yang berarti.

Jika mengkaitkan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran, secara deskriptif dapat dikatakan bahwa terjadi hubungan searah diantara keduanya. Pada saat pertumbuhan ekonomi tinggi, angka pengangguran di Provinsi Lampung juga relatif tinggi. Hal ini terjadi akibat sektor yang mengalami pertumbuhan tinggi, penyerapan tenaga kerjanya rendah. Sedangkan sektor yang penyerapan tenaga kerjanya tinggi (*labor intensive industry*) justru mengalami pertumbuhan yang rendah.

Indikator kesejahteraan di Lampung selama 4 tahun terakhir (2004-2007) memperlihatkan tren positif. Akses masyarakat Lampung terhadap pendidikan dan kesehatan semakin baik. Sedangkan daya beli masyarakat juga menunjukkan tren peningkatan. Di sisi lain, secara umum persentase penduduk miskin relatif tidak banyak berubah. Perlu disadari bahwa perbaikan kondisi pendidikan dan

kesehatan memiliki dampak jangka panjang dan tidak langsung berpengaruh terhadap kemiskinan pada tahun yang sama.

Jika membandingkan koefisien Gini dan kurva Lorenz tahun 1996 dengan 2005 terlihat bahwa ketimpangan pendapatan di Provinsi Lampung memburuk. Berarti pemerataan pendapatan di provinsi ini masih jauh dari harapan. Pembangunan yang berlangsung selama periode 1996-2005 lebih banyak menguntungkan kelompok pendapatan kaya. Selama periode 2002-2005, justru pendapatan kelompok penduduk terkaya yang tumbuh dengan cepat. Oleh karenanya, selama periode 2002-2005 terjadi ketimpangan pendapatan yang semakin memburuk.

Jika dibandingkan 2 titik waktu antara 1996 dengan 2005 maka terlihat bahwa kesenjangan antara penduduk termiskin dengan terkaya sedikit meningkat. Jika dilihat dari tempat tinggal, perkotaan dan perdesaan, penelitian ini menunjukkan bahwa selama periode 1996-2005 telah terjadi penumpukan penduduk paling kaya dan paling miskin secara bersamaan di perkotaan. Ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di kota semakin besar.

Terdapat beberapa karakteristik demografi yang dapat disimpulkan. Berdasarkan penelitian ini diperoleh temuan bahwa persentase kepala rumah tangga perempuan relatif sedikit dibandingkan dengan laki-laki. Tetapi kecenderungannya, rumah tangga yang dipimpin perempuan cenderung miskin. Artinya, jika perempuan menjadi kepala rumah tangga, maka rumah tangga tersebut cenderung miskin. Selain itu, pendidikan memegang peranan penting bagi kesejahteraan penduduk di Provinsi Lampung. Semakin tinggi pendidikan kepala rumah tangga, semakin tinggi pula pendapatan (pengeluaran) orang tersebut, dan sebaliknya. Mayoritas penduduk miskin kepala rumah tangganya hanya mencapai tingkat pendidikan SD. Sedangkan mayoritas penduduk terkaya didominasi oleh kepala rumah tangga berpendidikan SLTA ke atas. Ini menjadi indikasi bahwa tingkat pendidikan di Provinsi Lampung semakin membaik, dan pendidikan perlu mendapat perhatian lebih besar oleh pemerintah sebagai instrumen untuk mengurangi kemiskinan (kelompok berpendapatan rendah).

Karakteristik demografi lainnya ialah bahwa semakin tinggi pendapatan rumah tangga, semakin besar jumlah anggota keluarga (anak) yang dimilikinya. Rumah tangga dengan pendapatan rendah justru cenderung memiliki anak lebih sedikit. Ini agak aneh, mengingat sebenarnya di banyak literatur menunjukkan bahwa umumnya orang miskin lah yang justru cenderung memiliki anak banyak. Tetapi ada tren lainnya yaitu bahwa jumlah anak yang dimiliki setiap kelompok rumah tangga cenderung semakin sedikit selama periode 1996-2005.

Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa ketimpangan antar kabupaten/kota di Provinsi Lampung tidak dominan. Artinya, tidak terjadi ketimpangan antar kabupaten/kota. Ketimpangan pendapatan justru terjadi di masing-masing kabupaten/kota. Setiap kabupaten/kota memiliki masalah yang sama yaitu di dalam masyarakatnya sama-sama mengalami ketimpangan pendapatan. Namun demikian, ada tren bahwa semakin lama, ketimpangan antar daerah meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan kenyataan kenaikan indeks Theil between region, dimana sejak tahun 1999 ke 2005 terjadi kenaikan dari 0,12339 di tahun 1999 menjadi 0,202477 di tahun 2005. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kemampuan daerah dalam pemberian pelayanan publik tidak sama, dan daerah yang memiliki sumberdaya yang besar memperoleh manfaat yang lebih besar pula selama era otonomi daerah.

Kabupaten yang ketimpangannya cukup rendah ialah Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Barat, dan Kabupaten Lampung Utara. Kedua kabupaten tersebut masing-masing memiliki nilai indeks 0,013, 0,032, dan 0,047. Sedangkan Kabupaten Lampung Selatan (yang berbatasan dengan Pulau Jawa) dan Kota Metro mengalami ketimpangan yang paling buruk dengan indeks masing-masing sebesar 0,131 dan 0,129.

6.2. Rekomendasi Kebijakan

Kebijakan yang diambil pemerintah daerah di Provinsi Lampung harus diiringi dengan strategi yang tepat pula sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan sasaran, yaitu langsung dinikmati oleh masyarakat miskin. Pertumbuhan ekonomi dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengurangi kemiskinan. Namun pertumbuhan ekonomi belum dapat menciptakan kesempatan kerja yang

lebih baik. Pemerintah harus menerapkan strategi, agar sektor-sektor yang mempekerjakan banyak tenaga kerja dapat tumbuh lebih cepat. Sektor pertanian yang menyerap tenaga kerja paling banyak perlu didorong agar tumbuh lebih cepat melalui berbagai paket kebijakan pertanian.

Perempuan cenderung menjadi pihak yang miskin di Lampung. Oleh karenanya, berbagai program pemberdayaan perempuan perlu segera dilaksanakan. Intinya, program tersebut harus mampu meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja kaum perempuan. Selain itu, program pendidikan dan kesehatan ternyata efektif untuk mengurangi ketimpangan yang ada di masyarakat serta kemiskinan. Pemerintah Provinsi Lampung perlu menyadari bahwa dampak kebijakan pendidikan dan kesehatan bersifat jangka panjang, dan perlu ada kesadaran politik untuk mengedepankan kedua sektor tersebut.

Urbanisasi dari desa ke kota menyebabkan ketimpangan pendapatan di perkotaan memburuk. Urbanisasi terjadi tentunya karena ada kesenjangan kesempatan kerja desa-kota. Oleh karenanya, pembangunan infrastruktur di perdesaan mutlak diperlukan untuk mendorong terciptanya iklim investasi yang baik di perdesaan. Sudah jelas terlihat bahwa desa miskin umumnya memiliki kondisi infrastruktur yang buruk. Pembangunan infrastruktur perdesaan diharapkan dapat mengurangi arus urbanisasi dan mengurangi potensi instabilitas di perkotaan akibat adanya ketimpangan pendapatan.

Upaya untuk mencegah terus meningkatnya ketimpangan antar daerah perlu segera dilakukan. Rekomendasi kebijakan yang dapat disampaikan ialah perlunya kerjasama antar daerah dan integrasi pembangunan yang lebih baik. Integrasi pembangunan antar daerah di Provinsi Lampung dapat didorong melalui perdagangan yang lebih besar antar kabupaten/kota di Lampung, dan dibukanya akses jalan yang lebih baik antar daerah.

6.3. Rekomendasi Studi Lanjutan

Ada indikasi bahwa sejak pemberlakuan otonomi daerah, kesenjangan antar daerah di Provinsi Lampung meningkat dan persentase penduduk miskin tidak banyak berubah. Sekiranya demikian, perlu ada studi lanjutan yang menganalisis dampak otonomi daerah dan desentralisasi fiskal terhadap

kemiskinan dan ketimpangan di Provinsi Lampung. Selain itu, perlu ada studi yang menggunakan analisis eksplanatori untuk menguji keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan distribusi pendapatan, kemiskinan, dan pengangguran di Provinsi Lampung. Selanjutnya, perlu ada studi lanjutan yang dapat mengidentifikasi bentuk integrasi pembangunan di Provinsi Lampung, yang dapat mencegah munculnya ketimpangan pendapatan di masa mendatang. Studi ini juga akan semakin sempurna jika pada penelitian berikutnya, kelompok pendapatan dibagi menjadi 100 kelompok (persentil), sehingga dapat diketahui secara lebih detail mengenai ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Lampung. Berbagai rekomendasi studi lanjutan tersebut diharapkan mampu memperkaya dan melengkapi penelitian ini dan memberi manfaat bagi pembangunan Provinsi Lampung.



DAFTAR PUSTAKA

- Biro Otonomi Daerah. 2006-2007, *Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung*, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.
- Lampung Dalam Angka (LDA),1997-2006, Penerbit BPS Provinsi Lampung.
- Kabupaten Dalam Angka,1997-2006, Penerbit BPS Provinsi Lampung.
- Blanchard, Oliver. *Macroeconomics*, Fourth Edition.
- Mankew, N Gregory, Sungkono, Criswan, 2004, *Pengantar Ekonomi Mikro Edisi 3* , Penerbit Salemba Empat Salemba
- O' Sullivan, Arthur, *Urban economics*, Fifth edition.
- Nasution,M. Thomas, 1996, *Buku Penuntun Membuat Tesis Skripsi Disertasi Makalah*. Penerbit Bumi Aksara Jakarta.
- Pindyck, RS , Daniel LR. 2005, Pearson Prentice Hall New Jersey, *Microeconomics Sixth Edition*.
- Rahardja, Pratama dan Mandala Manurung (2004), *Pengantar Ilmu Ekonomi, Mikroekonomi dan Makroekonomi*, Volume Kedua, Edisi Revisi, FEUI, Jakarta.
- Moeis, Jossy, 2008, *Bahan Kuliah Kemiskinan, Pemerataan dan Kebijakan Publik*, MPKP FE-UI., Jakarta.
- Yulaswati, Vivi, 2008, *Bahan Kuliah Kemiskinan, Pemerataan dan Kebijakan Publik*, MPKP FE-UI., Jakarta
- Santosa, PB & Ashari, 2005, *Analisis Statistik dengan Microsoft Excel dan SPSS*, Penerbit Andi Yogyakarta
- Sugiarto, dkk (2005), *Ekonomi Mikro, Sebuah Kajian Komprehensif*, Edisi Kedua, Cetakan ketiga, Gramedia, Jakarta.
- Todaro, MP , Stephen CS. 2003, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Jilid 1. Edisi Kedelapan* (Haris Munandar, Puji AL : Penerjemah). Penerbit PT. Erlangga Jakarta
- Badan Pusat Statistik.BPS 2006, *Analisis dan Perhitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2006*.
- S.Pindyck, Robert , L. Rubinfeld, Daniel. *Microeconomics*.
- Courant Purvis Steiner,Lipsey. *Pengantar Makroekonomi*, edisi kesepuluh.
- Sherraden, Michael. 2006 *Aset untuk orang miskin*.

Universitas Indonesia

- Harmadi, Sonny, H. B., 2007, "*Karakteristik Kemiskinan di Perkotaan dan Perdesaan*", makalah disampaikan dalam Diskusi Panel Terbatas Indonesia Economic Outlook dengan topik utama "Meneropong Prospek Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia, Bandung, 9 Juni.
- Harmadi, Sonny, H. B., Shaqina Nuruly, 2006, *Analisis Faktor-Faktor Pembentuk Kesejahteraan Manusia dan Kaitannya dengan PDRB pada 26 Propinsi di Indonesia*, Lembaga Demografi, Warta Demografi No. 4 Tahun 2006.
- Agrawal, Nisha, 1996, "*The Benefits of Growth for Indonesia Worker*", Policy Research Working Paper, No. 1637, Bank Dunia, Agustus.
- Lewis, John P, dan Kallab, Valeriana (editor), 1987, *Mengkaji Ulang Strategi-Strategi Pembangunan*, Jakarta: UI-Press.
- PBB, 2007, "*Global unemployment remains at historic high despite strong economic growth - UN*", UN News Centre, <http://www.un.org/apps/news/story>, didownload 12 Juli 2007
- Lindblad, Thomas J. (editor), 1998, *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia: Berbagai Tantangan Baru*, Jakarta: LP3ES.
- Landes, D. 1999, *Wealth and Poverty of Nations*, New York, New York: W.W. Norton.
- Rowntree, Lavers, 1951, *Karakteristik Kemiskinan*.
- Suyanto, 1995:59, *Pendekatan Kemiskinan dalam Tatahan kehidupan masyarakat miskin*.
- Stewart, Brown, Mancini, 2005, *Why Horizontal Inequalities matter: Some Implication for measurement*.
- Stewart, 2007, *Addressing Discrimination and Inequality*.
- Green, 2008, *Kehidupan Ekonomi, Sosial, Budaya Masyarakat Miskin*.
- Boediono, 1981, *Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi*.
- Kuznets, 1955, *Tren Pertumbuhan Ekonomi*.
- Poerwanto, 1998, *Faktor-faktor penyebab kemiskinan*.
- World Bank, 2006:31, *Konsep pengukuran Kemiskinan*.

- Akita, 2001, *Permasalahan Intristik dalam Ketimpangan Pendapatan Regional*.
- Komite Penanggulangan Kemiskinan, 2003, *Dampak kemiskinan dan permasalahan yang ada*.
- Hicks, Jhon, Allen Roy 1943, *Konsep ukuran kesejahteraan individu*.
- Atkinson, Anthony, 1970, *Social Welfare and income distribution*.
- Meulbaur, Jhon, 1974, Robert, Kevin, 1980, *Pengukuran nilai kesejahteraan didasarkan pada pendapatan*.
- Purwadi, 2008, *Analisis tentang Sumber-sumber Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan*. Tesis MPKP FEUI, Salemba, Jakarta 2008.
- Kartubi, 2003, *Karakteristik Kemiskinan Rumah Tangga di Lampung Tengah*, Tesis MPKP FEUI, 2003.
- Samuelson, Bergson, *Pengukuran kesejahteraan kaum utilitarian*.
- Hersanyi, Bentham, Jeremy, 1995, *Pengembangan Konsep Utilitarian*.
- Mookherjee, Ray, 1999, *Majunya suatu negara dalam Pembangunan*.
- Solow, Robert, 1956, *The law of diminishing to inputs*.
- Chambers, 1983, *Inequality and Poverty*.
- Word Bank, 2003, *Era Baru Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*.
- Zulfachri, Budi, 2006, *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Ketidakmerataan terhadap Kemiskinan di Indonesia*, Tesis Program Pascasarjana Kajian Kependudukan dan Ketenagakerjaan UI, Depok.
- Kuswara, Adi Apriyana, 2005, *Pengaruh Pembangunan Ekonomi dan perubahan sosiodemografis terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia*, Tesis, Program Pascasarjana Kajian Kependudukan dan Ketenagakerjaan, UI Depok.
- Ikhsan, Edy, 1995, *Dukungan masyarakat untuk kesejahteraan sosial, study kasus mengenai buruh perkebunan negara di Simalungun Sumut*, Tesis Program Pascasarjana Study Antropologi UI, Depok.
- Sumaryadi, I Nyoman, 1997, *Pembangunan Masyarakat Desa dalam prespektif penanganan kemiskinan melalui pelaksanaan program Inpres Bantuan Pembangunan Desa dan Inpres Desa Tertinggal*, Tesis, Program Pascasarjana Ilmu Sosial, UI Depok.

- Rajiman, 1994, *Pengaruh Pembangunan Ekonomi dan perubahan sosiodemografis terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia*, Tesis, Program Pascasarjana Kajian Kependudukan dan Ketenagakerjaan, UI Depok.
- Bappenas. 2003. *Sistem Data dan Penentuan Sasaran (Targeting) Dalam Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta
- Bappenas. 2003. *Profil Klaster Komoditas Program KPEL Wilayah Pilot Project*. Jakarta.
- BKKBN Direktorat Pemantauan dan Pelaporan Program. 2000. *Petunjuk Teknis Pencatatan dan Pelaporan Pendataan Keluarga*. Jakarta.
- Dibyso Prabowo. 1995. *Diversifikasi Pedesaan*. UI Press. Jakarta
- Fakultas Pertanian Universitas Lampung dan Poverty Alleviation Through Rural-urban Linkages (PARUL). Desember 2002. *Progress and Financial Report Q4 PSU Lampung Province*. Bandarlampung.
- Hasan Basri. 1999. *Pembangunan Ekonomi Rakyat di Pedesaan Sebagai Strategi Penanggulangan Kemiskinan*. PT. Bina Rena Priwara. Jakarta.
- IwanNugroho dan Rochmin Dahuri. 2004. *Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan*. Penerbit LP3ES. Jakarta.
- Jamasy, Owin. 2004. *Keadilan, Pemberdayaan, dan Penanggulangan Kemiskinan*. Penerbit Belantika. Jakarta.
- Rudiono, Didi. 2007. *Rencana Aksi dan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung*. Bappeda Provinsi Lampung.